



PEMERINTAH KOTA MATARAM

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik. Karena itu Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sebagai satuan kerja yang bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Mataram.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Mataram mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi, yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik yaitu dengan cara:

1. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
2. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; dan
4. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 27 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
 17. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 18. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
 19. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan /atau Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;
 22. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram;

23. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan;
3. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
5. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas; dan
6. Bab VI Penutup.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk utama yang berbatasan dengan Selat Lombok. Selat ini merupakan penghubung antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat dengan panjang garis pantai sejauh 9 km. Ada dua kecamatan yang berbatasan Langsung dengan pantai, yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.

Gambar 2.1
Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB



Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²) menjadikan Kota Mataram sebagai kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada. Secara astronomis Kota Mataram terletak pada posisi antara 08o33' dan 08o38' Lintang Selatan dan antara 116o04' dan 116o10' Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- c. Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- d. Bagian Barat : Selat Lombok.

2.2 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Mataram baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun

menyelesaikan permasalahan dan isu- isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Mataram.

2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) ScarCity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi, Mesin dan Peralatan, Kendaraan, Peralatan Lainnya, Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

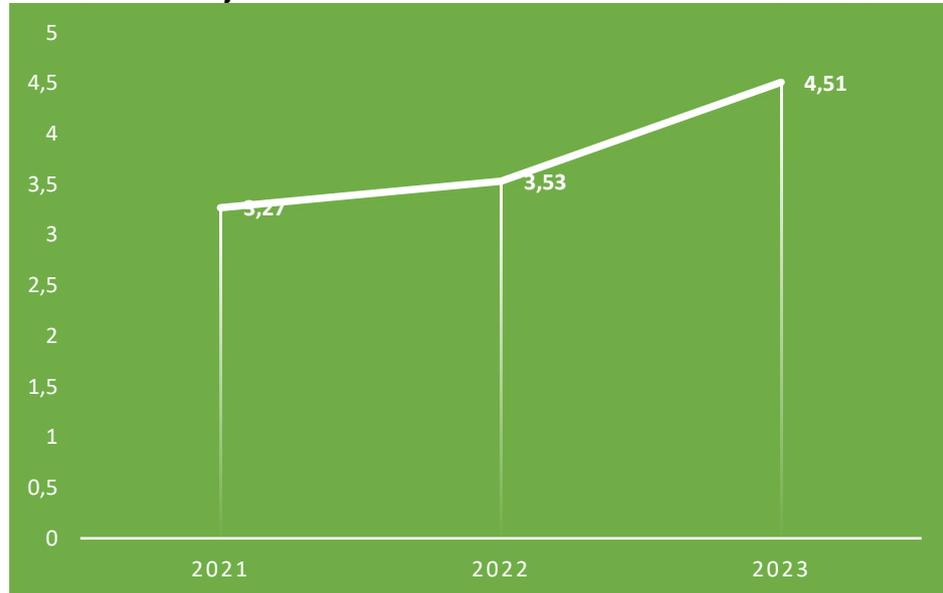
Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pembentuk produk domestik regional bruto di Kota Mataram ada lima lapangan usaha yang paling berpengaruh. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati urutan pertama dengan andil sebesar 21,67 persen, disusul urutan kedua jasa keuangan dan asuransi dengan andil sebesar 10,55 persen. Urutan ketiga adalah konstruksi sebesar 9,37 persen, sedangkan urutan keempat dan kelima adalah jasa pendidikan dan industri pengolahan sebesar 9,01 persen dan 8,96 persen.

Laju pertumbuhan cenderung mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 ditahun 2021 sedangkan laju pertumbuhan kembali positif yaitu pada tahun 2022 sebesar 3,53 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,51. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari tahun 2022 sebesar 7,55 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi juga pada

PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,51 persen.

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB selain itu juga adanya peningkatan komponen PMTB dan perbaikan kinerja ekspor antar daerah. Dari sisi investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga terjadi pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah dalam hal ini sisi ekspor.

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap kategori lapangan usaha.

Tabel 2.1. PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

(dalam persentase)

Kategori industri		2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing.</i>	0,96	-0,02	2,27
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,19	0,11	2,37
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,40	3,03	3,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,68	10,19	5,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	-0,47	-0,04	-0,33
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,35	0,55	8,46

Kategori industri		2021	2022	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,47	5,23	8,53
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,68	13,58	6,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,19	28,70	10,2
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,26	2,78	4,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,11	-2,98	-8,64
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,72	4,26	4,93
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,59	9,14	8,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,38	2,58	1,77
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,00	2,74	5,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	10,67	2,37	6,32
17	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,77	11,58	8,23
18	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	3,27	3,53	4,51

Sumber: BPS Kota Mataram, 2024

2.2.2 PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkapita atau per-satu orang Penduduk.

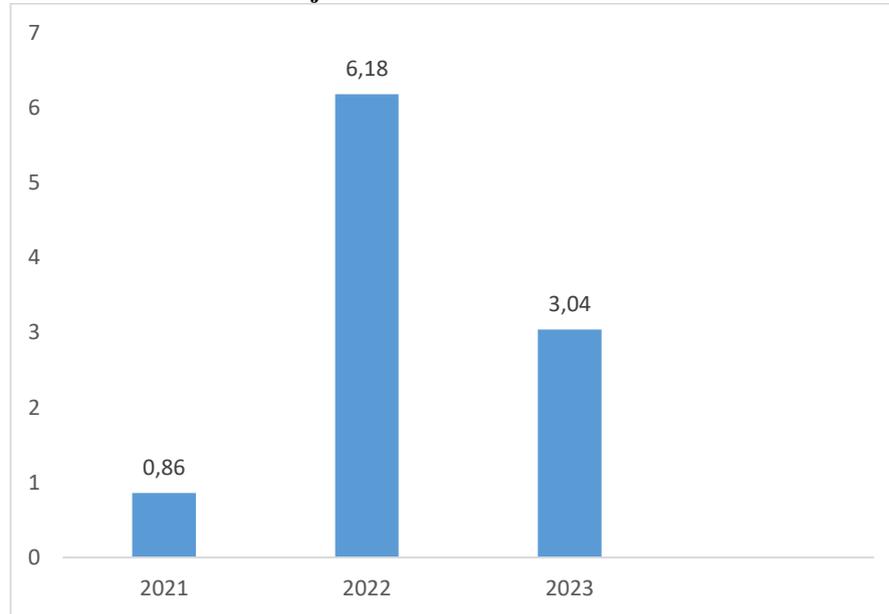
Pengeluaran per kapita per bulan paling banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2023 sebanyak Rp 475.314, menurun dibandingkan tahun 2022 yang besarnya Rp 431.018. Komoditas makanan dan minuman jadi menempati urutan kedua sebesar Rp 357,523 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang besarnya Rp 305.748. Aneka komoditas dan jasa menempati urutan ketiga sebesar Rp 240.007, meningkat dibandingkan tahun 2022. Tiga komoditas tersebut mengambil andil sebesar masing-masing 24,96 persen, 18,78 persen dan 12,60 persen. Pengeluaran per kapita terbesar adalah pengeluaran di atas Rp 1.500.000 yaitu sebesar 48,61 persen, kemudian antara Rp 1.000.000-1.499.999 sebesar 18,44 persen, kemudian yang ketiga Rp 750.000-999.999 sebesar 16,29 persen.

2.2.3 Inflasi

IHK menurut kelompok pengeluaran pada Desember tahun 2023 terbesar terdapat pada kelompok transportasi dengan indeks sebesar 130,67. Sementara itu, urutan kedua kelompok yang memiliki indeks terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 123,23 dengan inflasi sebesar 0,28. Laju inflasi menurut tahun kalender di Kota Mataram tahun 2023 terbesar terdapat pada bulan desember sebesar 3,04, sedangkan laju inflasi terendah yaitu terdapat pada bulan Januari sebesar 0,44. Laju inflasi tahunan menurun dari tahun 2022 sebesar 6,18 menjadi 3,04 pada tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, inflasi yoy pada tahun 2023 di Kota Mataram sudah melandai cukup signifikan, dan sudah on the track dengan target inflasi Kota Mataram yaitu sebesar $3\pm 1\%$, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

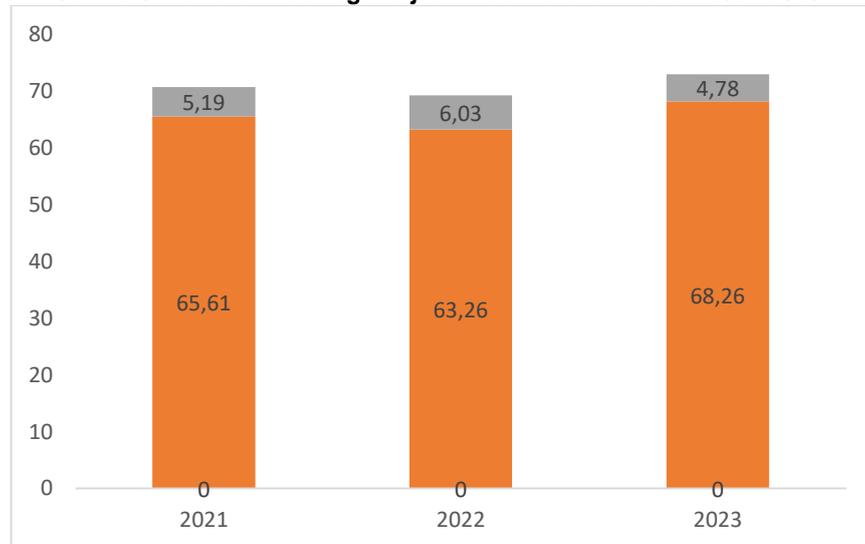
Berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari BPS, jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2023 tercatat sebanyak 441.147 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 221.522 jiwa (50,22 persen) merupakan penduduk perempuan, sedangkan sisanya sebesar 219.62 (49,78 persen) merupakan penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2023 adalah sebesar 99,14 persen. Yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat 99,1 penduduk laki-laki.

Penduduk Kota Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Mataram. Penduduk banyak yang tinggal dan menetap di kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Mataram tercatat sebesar 7.197 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu kecamatan Ampenan dengan tingkat kepadatan 9.652 orang setiap kilometer persegi.

Angkatan kerja pada tahun 2023 68,26 persen di antara penduduk usia kerja. Diantara angkatan kerja terdapat 95,22 persen penduduk yang bekerja. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang bekerja, perguruan tinggi paling banyak sebesar 97,80 persen sedangkan paling rendah sebanyak 93,02 persen berpendidikan sekolah menengah pertama.

Angkatan kerja pada tahun 2023 mencapai 68,26 persen di antara penduduk usia kerja. Diantara angkatan kerja terdapat 95,22 persen penduduk yang bekerja. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang bekerja, perguruan tinggi paling banyak sebesar 97,80 persen sedangkan paling rendah sebanyak 93,02 persen berpendidikan sekolah menengah pertama.

Gafik 2.3 Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2024

Seperti Gambaran akan kinerja aspek ketenagakerjaan di Kota Mataram salah satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota Mataram selama tiga tahun terakhir ini atau periode tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi.

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA". SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2024 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2024 (pertengahan tahun/Juni).

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Istilah migrasi seumur hidup disebut bila provinsi tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat lahirnya. Istilah migrasi risen disebut bila provinsi tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan). Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas

risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, ataupun di non pertanian atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

2.2.5 **Garis Kemiskinan**

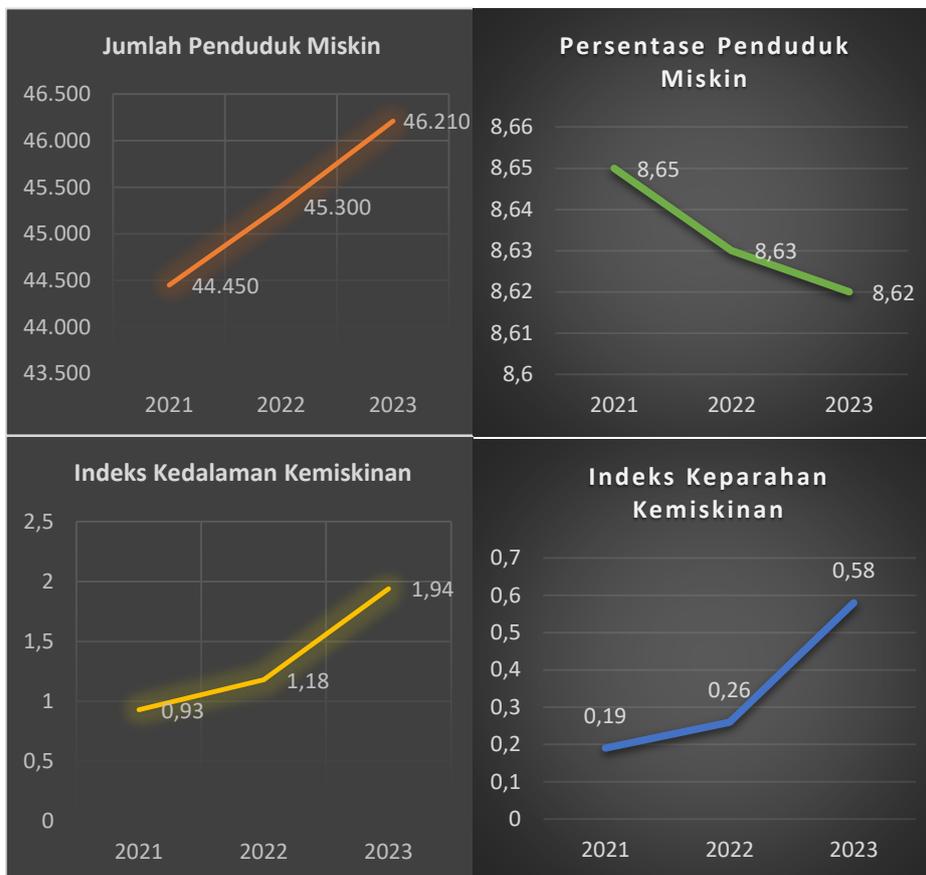
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Ukuran Kemiskinan a. Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan pada periode 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4.
Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2023 sebesar 46,21 ribu orang, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang sebesar 45,30 ribu orang.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya terbatas persoalan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga tingkat kedalaman kemiskinan dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan semakin jauh jarak orang miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Harapan manusia untuk panjang umur adalah dengan hidup sehat. Oleh sebab itu banyak yang mengaitkan rendahnya angka kesakitan dengan tingginya angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Indikator AHH ini menjadi penting dalam strategi pembangunan kesehatan pemerintah daerah karena indikator ini digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup yang rendah pada suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti program kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebanyak 46.210 jiwa, Kota Mataram berada di urutan ketujuh dari sepuluh Kabupaten/Kota.

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram berada di urutan pertama sebesar 81,15 diikuti di urutan kedua Kota Bima sebesar 78,24 dan ketiga Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 74,84.

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Perubahan APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.3.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan

lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Penggalan potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
8. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

2.4. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2023 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, meliputi:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana Insentif Daerah (DID).
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak.

2.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada TA. 2023 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Hibah Air Minum dan Sanitasi.

2.5 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2023.

Pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.572.550.671.882,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan mengalami penambahan sebesar Rp91.288.647.209,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi sebesar Rp1.663.839.319.091,00.

2.6 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

2.6.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023

Sejak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada Perubahan KUA – PPAS yang didasarkan pada Perubahan RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

- b. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.
- c. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- d. Unsur Penunjang di Kota Mataram, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan
- e. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat
- f. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan
- g. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.7 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Kota Mataram dalam Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2023 diperuntukkan, antara lain :

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2023, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, dan keterbatasan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
2. Perkembangan capaian kinerja daerah yang perlu disesuaikan dengan asumsi Perubahan KUA pada Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 antara lain:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya arus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi;
 - d. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 pada dokumen Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2023.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.584.300.671.882,00 bertambah sebesar Rp180.889.583.972,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11% sehingga menjadi Rp1.765.190.255.854,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Belanja Daerah TA. 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.340.527.918.756,00 bertambah sebesar Rp109.152.052.585,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8% sehingga menjadi Rp1.449.679.971.341,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp235.331.403.126,00 bertambah sebesar Rp72.882.657.387,00 atau mengalami kenaikan sebesar 31,% sehingga menjadi Rp308.214.060.513,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp7.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.145.126.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 31% sehingga menjadi Rp4.854.874.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.441.350.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau mengalami

kenaikan sebesar 69,% sehingga menjadi Rp2.441.350.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.8 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2023 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan KUA Tahun 2023, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan semula sebesar Rp14.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp89.600.936.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar 640% sehingga menjadi Rp103.600.936.763,00.

2.9 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD TA. 2023 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD, yaitu PT. Air Minum Giri Menang Mataram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PT. AMGM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PT. AMGM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PT. AMGM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. AMGM dalam rangka memperbesar skala usaha PT. AMGM. Bagi PT. AMGM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PT. AMGM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PT. AMGM dimaksud.

Pada Perubahan KUA Tahun 2023, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 secara makro dapat dilihat dari serapan anggaran pendapatan maupun belanja yang telah disediakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta juga tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

3.1 Pencapaian Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.668.282.889.314,10 atau 100,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.663.839.319.091,00. Bila dibandingkan dengan nilai Pendapatan pada tahun sebelumnya terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 11,20%. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp493.302.232.061,10, mengalami kenaikan sebesar 10,25% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp446.332.721.389,05. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.171.230.657.253,00 mengalami kenaikan sebesar 11,37% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.051.642.188.665,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp3.750.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 62,47% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2.308.183.204,00. Gambaran lengkap dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
PENDAPATAN	1.668.282.889.314,10	1.500.283.093.258,05	11,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	493.302.232.061,10	446.332.721.389,05	10,25
Pendapatan Pajak Daerah	186.734.992.240,00	174.244.254.094,00	7,17
Pendapatan Retribusi Daerah	30.719.987.941,23	26.844.304.569,93	14,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.194.537.893,00	12.273.219.522,00	15,65
Lain-lain PAD yang Sah	261.652.713.986,87	232.970.943.203,12	12,31
PENDAPATAN TRANSFER	1.171.230.657.253,00	1.051.642.188.665,00	11,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.055.252.997.894,00	940.653.144.466,00	12,18
Dana Perimbangan	1.005.123.913.894,00	886.481.780.466,00	13,38
Dana Bagi Hasil (DBH)	143.574.223.905,00	145.384.257.364,00	(1,24)
Dana Alokasi Umum (DAU)	621.774.459.000,00	565.895.019.524,00	9,87
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.596.603.839,00	37.158.655.089,00	141,12
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	150.178.627.150,00	138.043.848.489,00	8,79
Dana Insentif Daerah (DID)	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00	(18,45)
Insentif Fiskal	5.951.544.000,00	-	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.977.659.359,00	110.989.044.199,00	4,49
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.820.864.001,00	35.836.593.901,50	(2,83)
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.146.907.905,00	25.801.040.355,00	(18,04)
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.335.432.893,00	22.271.925.332,00	45,18
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	58.151.495,00	43.574.220,00	33,45
Bagi Hasil Pajak Rokok	26.360.057.865,00	27.035.910.391,00	(2,50)
Bantuan Keuangan	1.256.245.200,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000,00	2.308.183.204,00	62,47
Pendapatan Hibah	3.750.000.000,00	2.250.000.000,00	66,67
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	58.183.204,00	(100,00)

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Pendapatan daerah ini dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar kontribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2023 dan tahun 2022, dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram, dimana Pendapatan Dana Transfer merupakan penyumbang terbesar disusul oleh Pendapatan Asli Daerah kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas Akuntansi per SKPD pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

NO	SKPD	Pendapatan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	26.470.000.000,00	21.718.110.614,00	82,05
2	Rumah Sakit Umum Kota Mataram	180.000.000.000,00	231.002.133.297,07	128,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	58.360.000,00	29,18
4	Dinas Tenaga Kerja	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30
5	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84
6	Dinas Perhubungan	13.000.000.000,00	9.931.655.987,00	76,40
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.040.000.000,00	1.158.104.300,00	111,36
8	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.700.000,00	53.218.500,00	257,09
9	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.900.000.000,00	3.369.604.357,00	68,77
10	Dinas Pertanian	270.000.000,00	516.011.885,00	191,12
11	Dinas Perdagangan	10.055.000.000,00	7.047.075.253,23	70,09
12	Badan Keuangan Daerah	1.417.683.619.091,00	1.388.184.211.460,80	97,92
JUMLAH		1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Permasalahan yang muncul dari sisi Pendapatan Retribusi daerah yang tidak mencapai target dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan yang Muncul dari Sisi Pendapatan Retribusi Tahun 2023

SKPD	Jenis Retribusi	Permasalahan
DISHUB	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Terlalu tingginya target yang diberikan sementara jumlah kendaraan wajib uji yang datang tahun 2023 sebanyak 9.004 kendaraan. - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala pada kendaraan bermotornya. - Kondisi alat uji terutama pada alat uji <i>break tester dan Axle Load</i> (alat uji pengereman dan timbangan) yang sering mengalami trouble/gangguan sehingga pelayanan sering terganggu. - Kurangnya intensitas pemeriksaan operasi laik jalan terhadap kendaraan wajib uji di jalan.
DLH	Retribusi Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PT. AMGM, pungutan pelanggan untuk hotel telah dihentikan sehingga harus dipungut sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. - Adanya perbedaan penggolongan tarif antara PT. AMGM dengan amanat Perda No. 14/2011 J.o No. 12/2016 tentang retribusi jasa umum (saat ini sedang dilakukan penyesuaian tarif termasuk penggolongan). - Realisasi Retribusi Kebersihan ini sangat tergantung pada pembayaran rekening kebersihan air PT. AMGM karena tidak semua pelanggan PT. AMGM yang berjumlah 72.599 pelanggan yang aktif - Realisasi pungutan secara langsung oleh juru pungut yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup mendapat kendala dikarenakan masyarakat merasa double membayar sampah, dalam artian iuran sampah lingkungan dan retribusi sampah dinas.
DPMPSTP	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar permohonan persetujuan bangunan gedung pada tahun 2023 didominasi oleh permohonan PBG bangunan Kompleksitas sederhana sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target PBG tidak signifikan. - Belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap bangunan yang berdiri tanpa PBG sehingga berpengaruh terhadap minat pemilik bangunan untuk mengajukan PBG.
DIKES	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya UHC semua warga Kota Mataram mendapatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya secara gratis. - Tarif retribusi masih mengikuti tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011) yang sudah tidak relevan. - Realisasi yang dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien luar Kota Mataram yang tidak dapat diprediksi.
DIKES	Retribusi Pemakaian Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif yang belum disesuaikan dengan usulan terbaru, tahun 2022 masih menggunakan tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011). - Tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011) bukan berdasarkan Permenkes tetapi berdasarkan SNI Nomor 7388 Tahun 2009. - Ada beberapa pemeriksaan di laboratorium yang dilakukan tetapi tidak tercantum tarifnya di Perda No. 14 Tahun 2011 contohnya pemeriksaan swab, amonia dan lain-lain; - Target yang terlalu tinggi.
DIKES	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi yang dipengaruhi oleh jumlah kepesertaan. - Target yang terlalu tinggi.
D. PUPR	Retribusi Penyedotan Kakus	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelayanan penyedotan lumpur tinja hanya menggunakan armada truk yang tidak bisa melakukan penyedotan di jalan lingkungan/gang kecil sehingga banyak calon pelanggan yang beralih ke penyedotan swasta yang menggunakan roda tiga/pick up.
D. PUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Besaran retribusi yang sangat kecil, retribusi yang berlaku saat ini sesuai Perda No. 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan biaya operasional penyedotan saat ini. Perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak tahun 2021 namun hingga saat ini belum disahkan. - Kondisi alat berat yang sudah tua. - Jumlah penyewa untuk alat tersebut sedikit

SKPD	Jenis Retribusi	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan alat lebih banyak untuk kegiatan sosial - Banyak penyewaan alat milik swasta.
DISDAG	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target yang tinggi dan tidak sesuai potensi karena target yang ditetapkan dihitung berdasarkan tarif baru (2 x lipat), namun regulasi Perdanya belum ada sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, potensi tahun 2023 dihitung sesuai dengan tarif lama sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 2 Tahun 2021, berdasarkan jumlah obyek retribusi, potensi hanya sebesar Rp1.105.141.200,-namun penetapan target sebesar Rp2.500.000.000,- dengan asumsi tarif baru dapat dilaksanakan. - Beberapa kondisi toko/kios sudah tidak aktif seperti pasar karang sukun, pasar dasan agung, pasar rembiga, pasar cakranegara, pasar mandalika dan pasar pegesangan. - Kualitas dan Kuantitas SDM petugas penagihan masih kurang. - Tool/Sarpras dalam melakukan penagihan masih kurang memadai. - Sampai saat ini masih banyak kondisi pertokoan yang memerlukan revitalisasi contoh pertokoan di pasar cakranegara, mandalika, sayang-sayang dan pasar kebon roek kondisinya sangat memperhatikan - Sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan pola pemungutan konvensional karena belum menerapkan retribusi non tunai sehingga potensi terjadinya kebocoran cukup besar.
DISNAKER	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	<ul style="list-style-type: none"> - Target PAD tidak bisa terealisasi karena ada penurunan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA), baik TKA baru maupun TKA perpanjangan kontrak yang wilayah kerjanya di Kota Mataram

Dalam menindaklanjuti permasalahan dan solusi pendapatan, Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk mengidentifikasi setiap permasalahan dan solusi untuk mengatasinya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga tidak memberatkan masyarakat. Berikut beberapa masalah dan solusi yang dapat diidentifikasi dan dipetakan antara lain:

Tabel 3.4. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

PERMASALAHAN	SOLUSI
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat kepatuhan/kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Pengawasan dan Koordinasi dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah. ➢ Meningkatkan Pengawasan yang diikuti dengan pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah.
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan sumber daya baik sumber daya aparatur bidang pendapatan maupun sumber daya peralatan terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. ➢ Membuat Inovasi Bidang Pendapatan dalam rangka Optimalisasi PAD ➢ Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Melakukan Pelatihan/Bintek serta Capacity Building dalam Pengelolaan PAD
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Update data hasil pendataan pajak daerah sebagai dasar perhitungan potensi kurang efektif.. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan Penguatan sistim pelaporan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang didukung dengan analisa data potensi secara maksimal. ➢ Meningkatkan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah.

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengajuan draft rancangan produk-produk hukum pajak daerah tidak tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyusun Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai/ sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru (UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD)
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterlambatan penyampaian laporan data PAD dari masing-masing OPD . 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD. ➢ Melakukan Evaluasi secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola sumber PAD lainnya dalam pengelolaan PAD.

3.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.653.900.067.407,07 atau 93,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.765.190.255.854,00, terdiri dari realisasi pada Belanja Operasi sebesar 94,47%, Belanja Modal sebesar 91,49%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,71% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 100,00%. Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70
BELANJA OPERASI	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47
Belanja Pegawai	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34
Belanja Barang dan Jasa	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27
Belanja Bantuan Sosial	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10
BELANJA MODAL	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49
Belanja Tanah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91
Belanja Peralatan dan Mesin	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62
Belanja Gedung dan Bangunan	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95
Belanja Aset Lainnya	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68
BELANJA TAK TERDUGA	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, secara umum realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 12,96%, terutama pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

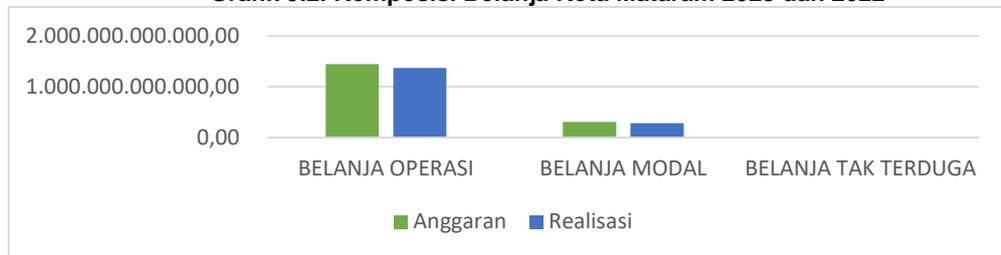
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
BELANJA DAERAH	1.653.900.067.407,07	1.464.164.668.856,05	12,96
BELANJA OPERASI	1.369.444.965.929,07	1.287.767.626.136,05	6,34
Belanja Pegawai	582.272.814.082,00	565.614.183.592,00	2,95
Belanja Barang dan Jasa	677.683.569.029,07	642.421.610.056,05	5,49
Belanja Bunga	0,00	279.763.272,00	(100,00)
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Belanja Hibah	85.182.145.969,00	62.881.075.691,00	35,47
Belanja Bantuan Sosial	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00	46,68
BELANJA MODAL	281.979.453.862,00	174.005.861.795,00	62,06
Belanja Tanah	20.305.698.726,00	11.374.815.258,00	78,51
Belanja Peralatan dan Mesin	115.171.860.211,00	48.269.561.084,00	138,60
Belanja Gedung dan Bangunan	68.940.565.477,00	45.384.593.358,00	51,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.240.765.500,00	65.770.745.466,00	8,32
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.271.723.948,00	3.206.146.629,00	95,62
Belanja Aset Lainnya	48.840.000,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	34.297.616,00	879.033.300,00	(96,10)
Belanja Tak Terduga	34.297.616,00	879.033.300,00	(96,10)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00	61,45
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00	61,45

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 3.2. Komposisi Belanja Kota Mataram 2023 dan 2022



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

3.3 Surplus Defisit

Pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplus anggaran senilai Rp14.382.821.907,03, terdiri dari surplus Badan Layanan Umum daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp9.267.732.649,78, pengelolaan dana JKN defisit sebesar Rp2.825.969.710,67, , serta defisit pengelolaan Dana BOS Satdikdas Negeri senilai Rp597.730.039,02, sementara APBD Kota Mataram diluar dana BLUD, JKN, dan Bos surplus senilai Rp1.691.389.587,56.

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

3.4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan senilai Rp103.600.936.763,00 yang merupakan penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi senilai Rp103.584.506.002,31 atau 99,98%. Terdapat realisasi Penerimaan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp9.360.755,00. Sementara Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal senilai Rp2.250.000.000,00 terealisasi

senilai Rp2.250.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu penyertaan modal pada PT. AMGM Giri Menang Mataram, sehingga total Pembiayaan Netto adalah senilai Rp 101.343.866.757,31

Rincian alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Capaian
Penerimaan Pembiayaan	103.593.866.757,31	74.732.512.361,46	38,62
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	103.584.506.002,31	69.732.060.316,46	48,55
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00	1.970,76
Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Koperasi	9.360.755,00	452.045,00	(100,00)
Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000,00	7.250.000.000,00	(68,97)
Penyertaan Modal pada BUMD	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
PEMBIAYAAN NETTO	101.343.866.757,31	67.482.512.361,46	50,18

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3.5 SiLPA

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp115.726.688.664,34. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp17.190.437.990,71, Dana JKN senilai Rp2.524.550.355,67 yang dikelola langsung oleh Puskesmas, serta Dana BOS Satdikdas Negeri yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai Rp254.257.847,28, Sementara SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp95.757.442.470,68

SILPA Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp115.726.688.664,34 apabila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp73.367.437.129,94 maka diperoleh rasio 63,40%, hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Mataram untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.

3.6 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan peningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram sampai dengan 31 Desember 2023. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, jumlah aset seluruhnya senilai Rp3.848.747.084.099,47 atau terjadi peningkatan senilai Rp117.602.689.015,78 dari tahun sebelumnya atau bertambah 3,66% dari tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Aset	3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69
Aset Lancar	278.778.802.782,53	229.195.110.852,93
Investasi Jangka Panjang	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
Aset Tetap	3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08
Properti Investasi	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
Aset Lainnya	310.774.104.216,72	324.517.644.127,36

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada grafik berikut:

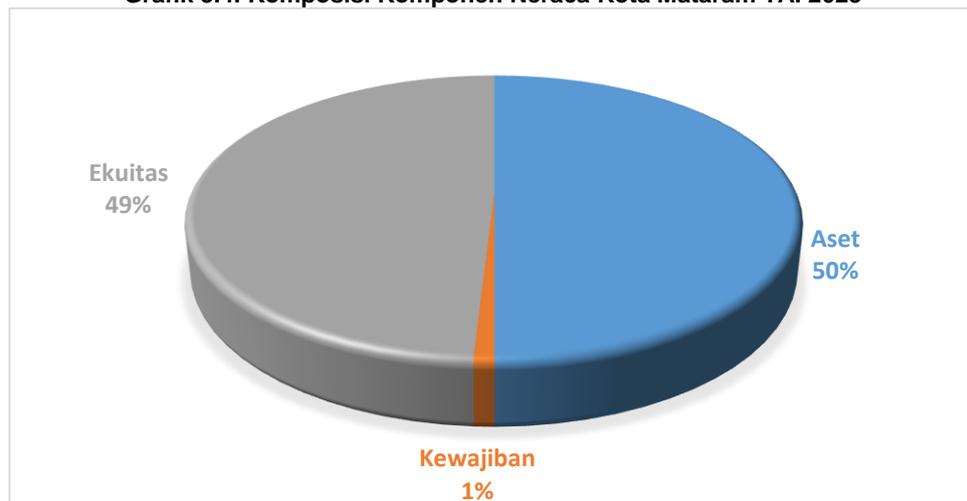
Grafik 3.3. Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram 2023 dan 2022



Sumber: BKD Kota Mataram

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa kekayaan daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaan dana sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp3.775.379.646.969,53, jauh lebih besar dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp73.367.437.129,94. Artinya Likuiditasnya sudah sangat baik. Komposisi neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.4. Komposisi Komponen Neraca Kota Mataram TA. 2023



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram yang antara lain memuat:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Mataram. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

Tabel 4.1. Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2023

KODE	OPD	KODE	OPD
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	2.23.2.24.0.00.28.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	3.25.0.00.0.00.29.0000	Dinas Perikanan
1.02.0.00.0.00.03.0000	RSUD Kota Mataram	3.26.0.00.0.00.30.0000	Dinas Pariwisata
1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.27.0.00.0.00.31.0000	Dinas Pertanian
1.04.2.10.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.30.0.00.0.00.32.0000	Dinas Perdagangan
1.05.0.00.0.00.06.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.0.00.0.00.33.0000	Sekretariat Daerah
1.05.0.00.0.00.07.0000	Dinas Pemadam Kebakaran	4.02.0.00.0.00.34.0000	Sekretariat DPRD
1.05.0.00.0.00.09.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.01.0.00.0.00.36.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0.00.0.00.10.0000	Dinas Sosial	5.02.0.00.0.00.37.0000	Badan Keuangan Daerah
2.07.3.32.0.00.11.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.03.0.00.0.00.38.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.08.0.00.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.05.0.00.0.00.39.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan
2.09.0.00.0.00.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6.01.0.00.0.00.35.0000	Inspektorat Daerah
2.11.0.00.0.00.14.0000	Dinas Lingkungan Hidup	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cakranegara
2.12.0.00.0.00.15.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sandubaya
2.14.0.00.0.00.22.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Mataram
2.15.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perhubungan	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Selaparang
2.16.2.20.2.21.24.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Ampenan
2.17.3.31.0.00.25.0000	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Sekarbela

KODE	OPD	KODE	OPD
2.18.0.00.0.00.26.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.01.0.00.0.00.20.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.19.0.00.0.00.27.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		

4.2. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Asumsi kemandirian entitas
Berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi kesinambungan entitas
Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)
Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b) Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah atau kas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e) Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang Pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar (SiLPA).
- f) Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah atau kas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang terjadi pada periode akuntansi berjalan dicatat sebagai pengurang Belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- d) Belanja diklasifikasikan menurut Kelompoknya antara lain: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2023

dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya;
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, merupakan SiLPA Tahun sebelumnya yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menambah dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih;
5. Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan transaksi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dan transaksi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih.

c. Neraca

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset Lancar antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, Persediaan dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

a) Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum

diterima. Piutang Pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

e) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang Retribusi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

g) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

h) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

i) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang:

1) Piutang Pajak

Untuk Piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- (a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- (b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
- (c) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;

- (d) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%; dan
- (e) Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- (f) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- (g) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%; dan
- (h) Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

j) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo Persediaan adalah jumlah Persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode pencatatan Persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode perpetual.

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun persediaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya - Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat

dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan perhitungan *NRV* berdasarkan umur investasi, yaitu:

- 1) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar 10%;
 - 2) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar 25%;
 - 3) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar 50%;
 - 4) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 75%; dan
 - 5) Diatas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%.
3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai Aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka Tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga Aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya

lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terkait batas nilai minimum kapitalisasi aset untuk kepentingan pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Batas nilai minimum kapitalisasi aset untuk kepentingan pemeliharaan

No.	Uraian	Jumlah Harga dalam Lusin / Set / Satuan (Rp)
I	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1	Alat-alat Berat	5.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000,00
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	-Alat-alat Kantor	300.000,00
	-Alat-alat Rumah Tangga	300.000,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
9	Alat Keamanan	300.000,00
II	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
1	Bangunan Gedung	7.500.000,00
2	Bangunan Monumen	5.000.000,00
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
1	Jalan dan Jembatan	7.500.000,00
2	Bangunan Air/Irigasi	7.500.000,00
3	Instalasi	300.000
4	Jaringan	300.000

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

- a) **Tagihan Penjualan Angsuran**
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo Tagihan Penjualan Angsuran.
 - b) **Aset Lain-lain**
Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.
 - c) **Aset Tidak Berwujud**
Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:
 - 1) *Software* komputer;
 - 2) Lisensi dan *franchise*;
 - 3) Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya;
 - 4) Hak jasa dan operasi;
 - 5) Aset tak berwujud dalam pengembangan.
5. **Kewajiban Jangka Pendek**
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman.
- a) **Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)**
Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota Mataram dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
 - b) **Utang Bunga (*Accrued Interest*)**
Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.
 - c) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongang untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - d) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- e) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas.
- 6. Kewajiban Jangka Panjang
Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:
 - a) Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan substansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.
- 7. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Operasional

- 1. Pendapatan-LO
Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan-LO antara lain:
 - a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b) Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - c) Pendapatan-LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas terdiri dari:
 - 1) PAD dengan mekanisme *self assessment* (semua jenis pajak dan retribusi); dan
 - 2) Dana Perimbangan.
 - d) Pendapatan-LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas:
 - 1) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (Pajak PBB, Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah); dan
 - 2) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui setelah penerimaan kas adalah Pajak Reklame.

- e) Pencatatan Pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - f) Pengukuran Pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
 - g) Pengukuran Pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
 - h) Pengembalian/koreksi atas penerimaan Pendapatan-LO yang terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LO.
 - i) Pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode akuntansi dibukukan sebagai pengurang Pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - j) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain: Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.
 - k) Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.
2. Beban-LO
- Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Beban-LO yaitu:
- a) Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.
 - b) Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
 - c) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Berdasarkan jenisnya Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

- f) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (*contra post*) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- g) Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
- h) Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
 - 1) Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (beban yang didahului dengan tagihan).
 - 2) Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo).
- i) Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (non Kas). Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.
- j) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan transfer masuk. Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer keluar.
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluarnya antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang dan pembentukan dana cadangan.

4. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos, antara lain:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit-LO;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
4. Ekuitas Akhir.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun menggunakan basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram; Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram; dan Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 tanggal tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komponen – komponen Akun LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Mataram yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Mataram pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

4. Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.668.282.889.314,10 dan Tahun 2022 senilai Rp1.500.283.093.258,05, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05
Pendapatan Transfer	1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00
Jumlah	1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27	1.500.283.093.258,05



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

4.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp493.302.232.061,10 dan Tahun 2022 senilai Rp446.332.721.389,05, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00
Pendapatan Retribusi Daerah	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	209.709.617.714,00	261.652.713.986,87	124,77	232.970.943.203,12
Jumlah	447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05

4.1.01. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp186.734.992.240,00 dan Tahun 2022 senilai Rp174.244.254.094,00, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	26.000.000.000,00	30.681.859.458,00	118,01	24.410.353.087,00
Pajak Restoran	39.000.000.000,00	40.468.500.744,00	103,77	31.922.870.556,00
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.125.704.087,00	111,38	4.631.710.978,00
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	2.302.889.727,00	46,06	6.085.570.558,00
Pajak Penerangan Jalan	43.000.000.000,00	45.049.777.369,00	104,77	42.921.727.121,00
Pajak Parkir	2.500.000.000,00	2.569.870.912,00	102,79	3.231.067.842,00
Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.395.983.826,00	119,80	1.395.384.967,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.000.000.000,00	28.131.145.263,00	100,47	29.239.610.930,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.500.000.000,00	29.008.960.854,00	109,47	30.405.658.055,00
Jumlah	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Untuk Pajak Reklame,rendahnya presentase pencapai realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan dikarenakan perubahan aturan yang mengikuti masa pajak reklame pada tahun berikutnya;
 - b. Tercapainya persentase pajak daerah sesuai target anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan pada periode 2023 seperti:
 - 1.Penambahan Kanal (saluran) pembayaran pajak daerah
 - 2.Peningkatan pengawasan pajak daerah dalam bentuk Uji Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan pengawasan berbasis masyarakat (BKD Giveaway #AwasTitipan Pajak Anda)
 - 3.Peningkatan pemeliharaan dan monitoring alat pengawas pajak daerah yaitu tapping box dan smart tax
- 2.Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah sebagai berikut.
 - a. Perda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - b. Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - c. Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ;
 - d. Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
 - e. Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - f. Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - g. Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - h. Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - i. Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - j. Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - k. Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - l. Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - m. Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - n. Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
 - o. Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir;
 - p. Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;

- q. Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
- r. Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
- s. Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- t. Perda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- u. Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- v. Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- w. Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 125 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- x. Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet; dan
- y. Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

4.1.01.06.01.1. Pendapatan Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 senilai Rp30.681.859.458,00 dari anggaran senilai Rp26.000.000.000,00 atau 105,20%, nilai realisasi Tahun 2022 senilai Rp24.410.353.087,00. Tercapainya persentase pajak hotel sebesar 105,20% sesuai target anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan pada periode 2023 seperti:

1. Penambahan Kanal (saluran) pembayaran pajak daerah
2. Peningkatan pengawasan pajak daerah dalam bentuk Uji Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan pengawasan berbasis masyarakat (BKD Giveaway # Awastitipan Pajak Anda)
3. Peningkatan pemeliharaan dan monitoring alat pengawas pajak daerah yaitu tapping box dan *smart tax*

4.1.01.07 Pendapatan Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp40.468.500.744,00 dan Rp 31.922.870.556,00 atau 103,77%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Restoran	39.000.000.000,00	40.468.500.744,00	103,77	31.922.870.556,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	37.500.000.000,00	37.988.718.784,00	101,30	29.689.599.957,00
Pajak Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.479.781.960,00	165,32	2.233.270.599,00

4.1.01.07.01 Pendapatan Pajak Restoran dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Restoran dan sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp37.988.718.784,00 atau 101,30% lebih senilai Rp488.718.784,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp29.689.599.957,00

4.1.01.07.07 Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Restoran dan sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.479.781.960,00 atau 165,32%, dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00 lebih senilai Rp979.781.960,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.233.270.599,00

4.1.01.08 Pendapatan Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp6.125.704.087,00 dan Rp4.631.710.978,00 atau 111,38%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.125.704.087,00	111,38	4.631.710.978,00
Pajak Tontonan Film	2.000.000.000,00	2.224.303.632,00	111,22	2.130.784.283,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari Busana	500.000.000,00	419.678.775,00	83,94	437.085.070,00
Pajak Pameran	130.000.000,00	177.558.637,00	136,58	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	300.000.000,00	375.530.000,00	125,18	266.289.721,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	180.000.000,00	205.238.085,00	114,02	148.261.500,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.200.000.000,00	2.572.908.233,00	116,95	1.502.251.804,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000,00	150.486.725,00	100,32	147.038.600,00
Pajak Pertandingan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.01.08.01 Pendapatan Pajak Tontonan Film

Realisasi Pajak Tontonan Film sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.224.303.632,00 dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 atau 111,22% lebih senilai Rp224.303.632,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.130.784.283,00.

4.1.01.08.02 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

Realisasi Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp419.678.775,00 atau 83,94%, dari anggaran senilai Rp500.000.000,00 kurang senilai Rp80.321.225,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 dan Rp437.085.070,00.

4.1.01.08.04 Pendapatan Pajak Pameran

Realisasi Pajak Pameran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp177.558.637,00 dari anggaran senilai Rp130.000.000,00 atau 136,58% lebih senilai Rp47.558.637,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 nihil.

4.1.01.08.05 Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp375.530.000,00 atau 125,18%, dari anggaran senilai Rp300.000.000,00, lebih senilai Rp75.530.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp266.289.721,00.

4.1.01.08.07 Pendapatan Pajak Permainan Biliar dan Bowling

Realisasi Pajak Permainan Biliar dan Bowling sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp205.238.085,00 atau 114,02%, dari anggaran senilai Rp180.000.000,00, lebih senilai Rp25.238.085,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp148.261.500,00.

4.1.01.08.08 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Realisasi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.572.908.233,00 atau 116,95% dari anggaran 2.200.000.000,00, lebih senilai Rp372.908.233,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.502.251.804,00.

4.1.01.08.09 Pendapatan Pajak Pijet, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)

Realisasi Pajak Pijet, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp150.486.725,00 atau 100,32% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00 lebih senilai Rp486.725,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp147.038.600,00.

4.1.01.08.10 Pendapatan Pajak Pertandingan Olah Raga

Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga sampai dengan 31 Desember 2023 nihil dari anggaran Rp40.000.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 nihil.

4.1.01.09 Pendapatan Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp2.302.889.727,00 dan Rp6.085.570.558,00 atau 46,06% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	2.302.889.727,00	46,06	6.085.570.558,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	4.800.000.000,00	2.200.590.129,00	45,85	5.995.454.388,00
Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	31.316.025,00	31,32	41.496.790,00
Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	70.983.573,00	70,98	48.619.380,00

4.1.01.09.01 Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.200.590.129,00 atau 45,85%, dari anggaran senilai Rp4.800.000.000,00 kurang senilai Rp2.599.409.871,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp5.995.454.388,00

4.1.01.09.02 Pendapatan Pajak Reklame Kain

Realisasi Pajak Reklame Kain sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp31.316.025,00 atau 31,32% dari anggaran senilai Rp100.000.000,00, kurang senilai Rp68.683.975,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp41.496.790,00

4.1.01.09.05 Pendapatan Pajak Reklame Berjalan

Realisasi Pajak Reklame Berjalan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp70.983.573,00 atau 70,98%, dari anggaran senilai Rp100.000.000,00 kurang senilai Rp29.016.427,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp48.619.380,00

4.1.01.10.02 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp45.049.777.369,00 atau 104,77% dari anggaran senilai Rp43.000.000.000,00, lebih senilai Rp2.049.777.369,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp42.921.727.121,00

4.1.01.11.01 Pendapatan Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.569.870.912,00 atau 102,79% dari anggaran 2.500.000.000,00 lebih senilai Rp69.870.912,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp3.231.067.842,00

4.1.01.12.01 Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.395.983.826,00 atau 119,80% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 lebih senilai Rp395.983.826,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp1.395.384.967,00

4.1.01.13.01 Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp300.000,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 lebih senilai Rp300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp300.000,00

4.1.01.15.01 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp28.131.145.263,00 atau 100,47% dari anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 lebih senilai Rp131.145.263,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp29.239.610.930,00

4.1.01.16.01 Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp29.008.960.854,00 atau 109,47% dari anggaran senilai Rp26.500.000.000,00 lebih senilai Rp2.508.960.834,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp30.405.658.055,00

4.1.02 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022, Realisasi Tahun 2023 senilai Rp30.719.987.941,23 dan Tahun 2022 senilai Rp26.844.304.569,93 persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000,00	3.181.562.000,00	53,03	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84	4.997.080.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000.000,00	9.317.445.987,00	84,70	8.200.045.351,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	5.908.642.000,00	78,78	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	614.210.000,00	30,71	657.810.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	44.360.000,00	29,57	43.945.500,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000.000,00	66.979.500,00	121,78	72.724.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000,00	1.156.000.000,00	111,15	994.503.660,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	923.840.150,00	186.755.275,00	20,22	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.570.700.000,00	1.198.464.253,23	46,62	941.617.974,93
• Retribusi Rumah Potong Hewan	220.000.000,00	442.219.885,00	201,01	343.482.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.717.231.234,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	69.600.000,00	139,20	51.900.000,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.850.000.000,00	3.289.345.381,00	67,82	0,00
Jumlah	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Retribusi Pelayanan Puskesmas rendah disebabkan dengan adanya UHC semua warga Kota Mataram mendapatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya secara gratis, tarif retribusi masih mengikuti tarif lama (Perda Nomor 14 Tahun 2011) yang sudah tidak relevan, realisasi yang di pengaruhi oleh kunjungan pasien luar Kota Mataram yang tidak dapat di prediksi.
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rendah disebabkan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PDAM, pungutan pelanggan untuk hotel telah dihentikan sehingga harus dipungut sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, adanya perbedaan penggolongan tarif antara PDAM dengan amanat Perda Nomor 14/2011 J.O Nomor 12/2016 Tentang Retribusi Jasa Umum (saat ini sedang dilakukan penyesuaian tarif termasuk penggolongan), Realisasi Retribusi Kebersihan tergantung pada pembayaran rekening kebersihan air PDAM karena tidak semua pelanggan PDAM yang berjumlah 72.599 pelanggan yang aktif dan Realisasi pungutan secara langsung oleh juru pungut yang ditugaskan oleh lingkungan hidup mendapat kendala dikarenakan masyarakat merasa double membayar sampah, dalam artian iuran sampah lingkungan dan retribusi sampah dinas.
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum rendah disebabkan parkir yang sudah ditetapkan dalam ketentuan pajak parkir sehingga potensi ketentuan retribusi parkir menjadi berkurang dan masih banyak juru parkir tidak patuh dan taat membayar retribusi parkir
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar rendah disebabkan pengelolaan pasar tidak berbanding lurus dengan peningkatan potensi retribusi
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor rendah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan melakukan wajib uji kendaraan secara berkala, tingginya target yang diberikan sementara jumlah kendaraan wajib uji yang datang tahun 2023 sebanyak 9.004 kendaraan dan kurangnya intensitas pemeriksaan operasi tak jalan terhadap kendaraan wajib uji di jalan
 - 6) Retribusi Penyedotan Kakus rendah disebabkan karena pelayanan penyedotan lumpur tinja hanya menggunakan armada truk yang tidak bisa melakukan penyedotan di jalan lingkungan/gang kecil sehingga banyak calon pelanggan yang beralih ke penyedotan swasta yang menggunakan roda tiga/*pick up*.
 - 7) Retribusi Pelayanan Tera Ulang tinggi disebabkan aktifnya Dinas Perdagangan tera ulang.
 - 8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi disebabkan ada 2 provider tahun 2022 pembayarannya dilakukan di awal tahun 2023

- c. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan besaran retribusi yang terlalu kecil, retribusi yang berlaku saat ini sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan biaya operasional penyedotan saat ini, perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak Tahun 2021 namun sejak saat ini belum disahkan dan kondisi alat berat yang sudah tua.
 - 2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan rendah disebabkan realisasi bersumber dari penyewaan tanah penyatu.
 - 3) Retribusi Pemakaian Laboratorium rendah disebabkan tarif yang belum disesuaikan dengan usulan terbaru, Tahun 2023 masih menggunakan tarif lama (Perda Nomor 14 Tahun 2011), ada beberapa pemeriksaan di laboratorium dilakukan tetapi tidak tercantum tarifnya di Perda contohnya pemeriksaan swab dan amonia dan target yang terlalu tinggi
 - 4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor rendah disebabkan perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak Tahun 2021 namun sejak saat ini belum disahkan serta kondisi alat berat yang sudah tua dan jumlah penyewa yang sedikit.
 - 5) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan rendah disebabkan sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan pola pemungutan kompesional karena belum menerapkan retribusi non tunai sehingga potensi terjadinya kebocoran cukup besar, kualitas dan kuantitas SDM petugas penagihan masih kurang memadai, dan banyak kondisi toko/kios yang sudah tidak aktif.
 - 6) Retribusi Rumah Potong Hewan tinggi disebabkan ; karena permintaan daging di pasar meningkat sehingga jumlah ternak yang dipotong meningkat dan dari kir ulang daging beku mengalami peningkatan, selain itu meningkatnya daya beli masyarakat yang cukup tinggi membuat ternak yang di bawa ke pasar meningkat.
- d. Retribusi Perijinan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tinggi disebabkan ; adanya pelaku usaha baru penjualan minuman beralkohol.
 - 2) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing rendah; adanya penurunan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) baik TKA baru maupun TKA perpanjangan kontrak, yang wilayah kerjanya di Kota Mataram.
 - 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rendah disebabkan belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap bangunan yang berdiri tanpa PBG sehingga berpengaruh terhadap minat pemilik bangunan untuk mengajukan PBG dan sebagian besar permohonan persetujuan bangunan gedung pada tahun 2023 di dominasi oleh permohonan PBG bangunan kompleksitas sederhana sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target PBG tidak signifikan.
1. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut.
 - a. Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah di rubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum
 - b. Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan ;
 - c. Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp25.373.011.487,00 dan Rp23.586.106.811,00 atau 67,22%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000,00	3.181.562.000,00	53,03	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84	4.997.080.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000.000,00	9.317.445.987,00	84,70	8.200.045.351,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	5.908.642.000,00	78,78	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	614.210.000,00	30,71	657.810.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	44.360.000,00	29,57	43.945.500,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000.000,00	66.979.500,00	121,78	72.724.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000,00	1.156.000.000,00	111,15	994.503.660,00
Jumlah	37.745.000.000,00	25.373.011.487,00	67,22	23.586.106.811,00

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.181.562.000,00 atau 53,03% dari anggaran senilai Rp6.000.000.000,00 kurang senilai Rp2.818.438.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp30.405.658.055,00

4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.083.812.000,00 atau 50,84% dari anggaran senilai Rp10.000.000.000,00 kurang senilai Rp4.916.188.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp4.997.080.000,00

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp9.317.445.987,00 atau 84,70% dari anggaran senilai Rp11.000.000.000,00 kurang senilai Rp1.682.554.013,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp8.200.045.351,00

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.908.642.000,00 atau 78,78% dari anggaran senilai Rp7.500.000.000,00 kurang senilai Rp1.591.358.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp5.680.699.000,00

4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp614.210.000,00 atau 30,71% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 kurang senilai Rp1.385.790.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp657.810.000,00

4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp44.360.000,00 atau 29,57% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00 kurang senilai Rp105.640.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp43.945.500,00

4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp66.979.500,00 atau 121,78% dari anggaran senilai Rp55.000.000,00 lebih senilai Rp11.979.500,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp72.724.500,00

4.1.02.01.11 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.156.000.000,00 atau 111,15% dari anggaran senilai Rp1.040.000.000,00 lebih senilai Rp116.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp994.503.660,00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Retribusi Jasa Usaha sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp1.827.439.413,23 dan Rp1.489.066.524,93 atau 49,20%, dengan rincian sebagai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	923.840.150,00	186.755.275,00	20,22	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.570.700.000,00	1.198.464.253,23	46,62	941.617.974,93
• Retribusi Rumah Potong Hewan	220.000.000,00	442.219.885,00	201,01	343.482.600,00
Jumlah	3.714.540.150,00	1.827.439.413,23	49,20	1.489.066.524,93

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp186.755.275,00 atau 20,22% dari anggaran senilai Rp923.840.150,00 kurang senilai Rp116.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp994.503.660,00

4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.198.464.253,23 atau 46,62% dari anggaran senilai Rp2.570.700.000,00 kurang senilai Rp1.372.235.746,77 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp941.617.974,93

4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp442.219.885,00 atau 201,01% dari anggaran senilai Rp220.000.000,00 lebih senilai Rp222.219.885,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp343.482.600,00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp3.519.537.041,00 dan Rp1.769.131.234,00 atau 69,01%, dengan rincian sebagai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.717.231.234,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	69.600.000,00	139,20	51.900.000,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.850.000.000,00	3.289.345.381,00	67,82	,00
Jumlah	5.100.000.000,00	3.519.537.041,00	69,01	1.769.131.234,00

4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp69.600.000,00 atau 139,20% dari anggaran senilai Rp50.000.000,00 lebih senilai Rp19.600.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp51.900.000,00

4.1.02.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp160.591.660,00 atau 80,30% dari anggaran senilai Rp200.000.000,00 kurang senilai Rp39.408.340,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.289.345.381,00 atau 67,82% dari anggaran senilai Rp4.850.000.000,00 kurang senilai Rp1.560.654.619,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.02. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp14.194.537.893,00 dan Tahun 2022 senilai Rp12.273.219.522,00, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.152.795.155,00	5.233.207.101,00	101,56	3.964.245.004,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	41.066.722,00	205,33	25.426.352,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8.920.264.070,00	8.920.264.070,00	100,00	8.283.548.166,00
Jumlah	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari dividen yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana Pemerintah Kota Mataram melakukan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada empat Perusahaan Daerah yaitu: PT.Air Minum Giri Menang Mataram,PD.BPR NTB, PT Jamkrida NTB Bersaing, dan PT Bank NTB Syariah realisasinya tergantung dari besar laba perusahaan.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	14.093.059.225,00,	14.194.537.893,0	100,72	12.273.219.522,0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.152.795.155,00	5.233.207.101,00	101,56	3.964.245.004,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	41.066.722,00	205,33	25.426.352,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	8.920.264.070,00	8.920.264.070,00	100,00	8.283.548.166,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				

1. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Air Minum Giri Menang diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Moh.Jazuli, SH.M.Kn Nomor.08/Not.MJ/WRM/LB/X/2023. tentang RUPS PT.Air Minum Giri Menang (PERSERODA) Tahun 2023;
2. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT BPR NTB (Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS /Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022;
3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Jamkrida NTB Bersaing(Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS / Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan Terbatas PT Jamkrida NTB Bersaing; dan
4. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Bank NTB Syariah (Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank NTB Syariah Tanggal 15 Maret 2023.

4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.233.207.101,00 atau 101,56% dari anggaran senilai Rp5.152.795.155,00 lebih senilai Rp80.411.946,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp3.964.245.004,00

4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp41.066.722,00 atau 205,33% dari anggaran senilai Rp20.000.000,00 lebih senilai Rp21.066.722,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp25.426.352,00

4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp8.920.264.070,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp8.920.264.070,00 sesuai dengan yang dianggarkan sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp8.283.548.166,00

4.1.03. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp261.652.713.986,87 dan Tahun 2022 senilai Rp232.970.943.203,12, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.160.137.714,00	49.410.975,00	4,26	364.343.750,00
Jasa Giro	3.500.000.000,00	3.020.880.769,81	95,47	2.418.099.359,02
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	3.062.500.602,34	204,17	2.692.979.452,06
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.583.961.164,90	103,36	1.359.584.287,73
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	23.917.396,00	0,00	28.266.747,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	43.591.246,45	0,00	12.457.575,26
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.100.000.000,00	1.714.298.499,80	155,85	1.112.483.771,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.104.300,00	105,22	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	47.480.000,00	127.220.624,00	267,95	226.765.500,80
Pendapatan BLUD	180.000.000.000,00	231.002.133.297,07	128,33	209.717.327.649,25
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.900.000.000,00	18.448.371.739,00	92,71	15.038.635.111,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	1.537.223.372,50	0,00	0,00
Jumlah	209.709.617.714,00	261.652.713.986,87	124,77	232.970.943.203,12

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena adanya peningkatan dari beberapa penerimaan antara lain: Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, pendapatan bunga Deposito, Penerimaan Tuntutan Ganti Kerygian Keuangan Daerah, penerimaan dari komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak daerah, dan denda retribusi daerah, serta pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak (Jaminan Bongkar)

4.1.04.01.02 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp37.100.000,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.03. Hasil Pemamfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemamfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp49.410.975,00 atau 4,26 % dari anggaran senilai Rp1.160.137.714,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp364.343.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pemamfaatan MBD yang Tidak Dipisahkan				
• Hasil Sewa BMD	0,00	49.410.975,00	0,00	0,00
• Hasil Kerja Sama Pemamfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	64.343.750,00
• Hasil dari Bangun Guna Serah	1.111.137.714,00	0,00	0,00	300.000.000,00
• Hasil dari Bangun Serah Guna	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.160.137.714,00	49.410.975,00	4,26	364.343.750,00

4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD

Realisasi Hasil Sewa BMD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp49.410.975,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemamfaatan BMD

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp64.343.750,00.

4.1.04.03.03 Hasil dari Bangun Guna Serah

Realisasi Hasil Bangun Guna Serah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp1.111.137.714,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp300.000.000,00

4.1.04.03.04 Hasil dari Bangun Serah Guna

Realisasi Hasil Bangun Serah Guna sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp49.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.05.01 Jasa Giro Kas Daerah

Realisasi Jasa Giro Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.020.880.769,81 atau 86,31 % dari anggaran senilai Rp3.500.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp2.418.099.359,02.

4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.062.500.602,34 atau 204,17 % dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp2.692.979.452,06

4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp2.583.961.164,90 dan Tahun 2022 senilai Rp1.359.584.287,73, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.583.961.164,90	103,36	1.359.584.287,73
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	690.950.547,60	0,00	441.545.426,66
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.893.010.617,21	75,72	918.038.861,07

4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp690.950.547,69 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp441.545.426,66.

4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.893.010.617,21 atau 75,72 % dari anggaran senilai Rp2.500.000.00,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp918.038.861,07.

4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp23.917.396,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp28.266.747,00

4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp43.591.246,45 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp12.457.575,26

4.1.04.12. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.714.298.499,80,00 atau 155,85 % dari anggaran senilai Rp1.100.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.112.483.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.100.000.000,00	1.714.298.499,80	155,85	1.112.483.771,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.600.000,00	8.616.819,00	130,56	9.341.559,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	140.000.000,00	157.672.226,00	112,62	35.686.186,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.315.000,00	4.412.088,00	102,25	198.897,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.573.543,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.400.000,00	6.293.919,00	116,55	9.975.833,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	13.300.000,00	13.773.714,00	103,56	31.687.421,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	909.925.000,00	1.502.881.778,80	165,17	898.020.332,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00

4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp8.616.819,00 atau 130,56 % dari anggaran senilai Rp6.600.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp9.341.559,00

4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp157.672.226,00 atau 112,62 % dari anggaran senilai Rp140.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp35.686.186,00

4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp4.412.088,00 atau 102,25 % dari anggaran senilai Rp4.315.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp198.897,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak	4.315.000,00	4.412.088,00	102,25	198.897,00
Hiburan				
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran	1.000.000,00	1.049.164,00	104,92	0,00
Kesenian/Musik/Tari/Busana				
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	41.000,00	11.158,00	27,21	26.617,00
Ketangkasan				
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	3.200.000,00	3.271.566,00	102,24	41.600,00
Ketangkasan				
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	74.000,00	80.200,00	108,38	130.680,00

4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp18.487.955,00 atau 101,03 % dari anggaran senilai Rp18.300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp127.573.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.573.543,00
Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron				
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.543.783,00
Reklame Kain				
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	29.760,00

4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp6.293.919,00 atau 116,55 % dari anggaran senilai Rp5.400.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp9.975.833,00.

4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp13.773.714,00 atau 103,56 % dari anggaran senilai Rp13.300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp31.687.421,00.

4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.502.881.778,80,00 atau 165,17 % dari anggaran senilai Rp909.925.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp898.020.332,00.

4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.160.000,00 atau 100,00 % dari anggaran senilai Rp2.160.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Realisasi Pendapatan Denda Denda Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.104.300,00 atau 105,22 % dari anggaran senilai Rp2.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp127.220.624,00 atau 267,95 % dari anggaran senilai Rp47.480.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp226.765.500,80 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan dari Pengembalian	47.480.000,00	127.220.624,00	267,95	226.765.500,80
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	118.801.104,00	0,00	226.765.500,80
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	599.520,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.000.000,00	7.820.000,00	16,64	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	480.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp118.801.104,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp226.765.500,80

4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp599.520,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran TPP

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TPP sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp7.820.000,00 atau 16,64 % dari anggaran senilai Rp47.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Barang Jasa

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp231.002.133.297,07 atau 128,33 % dari anggaran senilai Rp180.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp209.717.327.649,25

4.1.04.18.01 Pendapatan JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp18.448.371.739,00 atau 92,71 % dari anggaran senilai Rp19.900.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp15.038.635.111,00

4.1.04.23.01 Pendapatan Hasil Perjanjian/ Kontrak

Realisasi Pendapatan Hasil Perjanjian/Kontrak sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.537.223.372,50 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00 merupakan Penerimaan (PFK) Jabong Tahun Lalu.

4.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.085.034.990.120,00	1.055.252.997.894,00	97,26	940.653.144.466,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00
Jumlah	1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00

4.2.1.01. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rincian Saldo Transfer Pusat -Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00
Dana Alokasi Umum	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	157.473.584.000,00	151.206.070.231,00	96,02	138.043.848.489,00
Jumlah	1.034.905.906.120,00	1.006.151.356.975,00	97,22	886.481.780.466,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Terhadap realisasi dana transfer telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 1. Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN 2023
 2. PMK tentang bagi hasil kurang bayar dan lebih bayar tahun 2023. Terhadap tinggi rendahnya penerimaan disebabkan karena Dana DAK Fisik Transfer ke Daerah disesuaikan dengan data kontrak sehingga terdapat kecenderungannya realisasi Dana DAK lebih rendah dari pagu anggaran
- 2) Terhadap bagi hasil dari pemerintah pusat realisasi lebih kecil dari pagu hal ini disebabkan transfer pemerintah pusat menyesuaikan dengan penerimaan pemerintah pusat.

4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp143.574.223.905,00 atau 87,99%, dari target yang ditetapkan senilai Rp163.169.503.120,00. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.167.859.839,00	2.652.198.220,00	122,34	5.835.346.675,00
DBH PPh Pasal 21	32.973.564.097,00	29.421.429.334,00	89,23	24.882.584.068,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.384.928.638,00	5.981.999.919,00	176,72	9.073.824.165,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	75.427.945.131,00	77.354.293.547,00	102,55	53.073.495.851,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	48.139.869.484,00	26.628.033.453,00	55,31	50.474.651.018,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	58.371.265,00	50.571.221,00	86,64	86.044.587,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.016.964.666,00	1.485.698.211,00	146,09	1.958.311.000,00
Jumlah	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 senilai Rp143.574.223.905, **telah** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum Tahun 2023 terealisasi senilai Rp621.774.459.000,00 atau 100,88%, dari target yang ditetapkan senilai Rp616.367.887.000,00,realisasi lebih tinggi senilai Rp5.405.572.000 yang merupakan dana DAU Tambahan THR ASN. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU Tidak Ditentukan penggunaannya	587.373.327.000,00	592.779.899.000,00	100,92	565.895.019.524,00
DAU Penggajian Formasi PPPK	18.994.560.000,00	18.994.560.000,00	100,00	0,00
DAU Pendanaan Kelurahan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 senilai Rp621.774.459.000,00 **telah** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V Tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19 Tahun

2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp89.596.603.839,00 atau 91,52%, dari target yang ditetapkan senilai Rp97.894.932.000,00. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	1.037.969.000,00	986.485.000,00	95,04	680.814.550,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	5.341.688.000,00	5.327.940.000,00	99,74	6.322.834.299,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	7.220.646.000,00	6.299.055.000,00	87,24	5.098.543.660,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	881.516.000,00	805.474.000,00	91,37	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler -Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	13.754.957.619,00	125,05	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	9.561.739.000,00	8.886.548.990,00	92,94	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	784.918.000,00	746.686.000,00	95,13	1.531.018.624,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	1.239.606.000,00	945.442.200,00	76,27,0 0	1.353.541.770,00
DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.414.934.000,00	4.291.462.000,00	97,20	0,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.395.000.000,00	1.095.000.000,00	78,49	0,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	1.380.000.000,00	1.677.921.926,00	121,59	0,00
DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan	10.739.804.000,00	2.684.951.000,00	25,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	6.962.818.000,00	6.962.800.000,00	100,00	5.074.482.000,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	1.108.434.000,00	1.106.650.000,00	99,84	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	34.825.860.000,00	34.025.230.104,00	97,70	2.571.722.099,00
Jumlah	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 senilai Rp89.596.603.839,00 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp150.178.627.150,00 atau 95,37%, dari target yang ditetapkan senilai Rp157.473.584.000,00. Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	61.038.960.000,00	60.613.916.900,00	99,30	60.812.605.545,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	64.307.513.000,00	64.307.511.000,00	100,00	61.169.125.800,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	02.679.750.000,00	1.121.413.115,00	41,85	01.192.950.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	5.368.830.000,00	5.067.617.600,00	94,39	3.751.608.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.227.590.000,00	1.239.560.000,00	100,98	955.700.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	8.779.511.000,00	7.128.667.776,00	81,20	4.179.884.842,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	471.614.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	410.170.000,00	380.373.800,00	92,74	266.040.350,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	1.227.371.000,00	1.194.519.050,00	97,32	940.105.800,00
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	313.000.000,00	214.874.712,00	68,65	205.574.067,00
DAK Non Fisik - BOKB – KB	5.195.900.000,00	3.510.509.403,00	67,56	3.835.855.122,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	412.531.875,00	94,01	451.800.000,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	579.575.000,00	579.575.000,00	100,00	282.598.963,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	157.473.584.000,00	150.178.627.150,00	95,37	138.043.848.489,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.150.178.627.150,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.1.02. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Insentif Daerah (DID)	44.177.540.000,00	44.177.540.000,00	100,00	54.171.364.000,00
Insentif Fiskal	5.951.544.000,00	5.951.544.000,00	100,00	0,00
Jumlah	50.129.084.000,00	50.129.084.000,00	100,00	54.171.364.000,00

Dana Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.50.129.084.000,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.1.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.44.177.540.000,00, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Lampiran V. Rincian Alokasi Insentif Fiskal menurut Provins/Kabupaten/Kota TA 2023, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.171.364.000,00

4.2.1.02.01 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.5.951.544.000,00, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Lampiran V. Rincian Alokasi Insentif Fiskal menurut Provins/Kabupaten/Kota TA 2023, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00

4.2.02. Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00
Bantuan Keuangan	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00
Jumlah	127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00

Penjelasan:

Dana Transfer Pemerintah Daerah yang bersumber Dana Bagi Hasil Provinsi disesuaikan dengan SK Gubernur pada Tahun 2023.

4.2.02.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp114.721.414.159,00 atau 91,10%, dari target yang ditetapkan senilai Rp125.935.866.682,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp110.989.044.199,00

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.883.417.491,00	34.820.864.001,00	99,82	35.836.593.901,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.479.065.418,00	21.146.907.905,00	79,86	25.801.040.355,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.414.522.793,00	32.335.432.893,00	99,76	22.271.925.332,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	42.001.100,00	58.151.495,00	138,45	43.574.220,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.116.859.880,00	26.360.057.865,00	82,08	27.035.910.391,00
Jumlah	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya di karenakan adanya pembayaran kekurangan Bagi hasil Pajak Tahun 2022

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp114.721.414.159,00 atau 91,10%, dari target yang ditetapkan senilai Rp125.935.866.682,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp110.989.044.199,00.

4.2.02.02 Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Pusat	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	,00
Jumlah	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00

Penjelasan:

Dana Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900-730 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Khusus Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan Hibah	3.750.000.000	3.750.000.000	100,00	2.250.000.000,00
• Pendapatan Dana Darurat				
• Pendapatan atas Dana lainnya	0,00	0,00		58.183.204,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
Jumlah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

- a. Sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran V Rincian Hibah Kepada Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2023, dan
- b. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Mataram untuk Hibah Sanitasi (air limbah setempat) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2023 Nomor PHD-50/MK.7/DTK.03/ALS/2023 Tanggal 08 Maret 2023

4.3.02.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 terealisasi senilai Rp3.750.000.000,00 atau 100,00%, dari target yang ditetapkan senilai Rp3.750.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.250.000.000,00.

4.3.02.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah

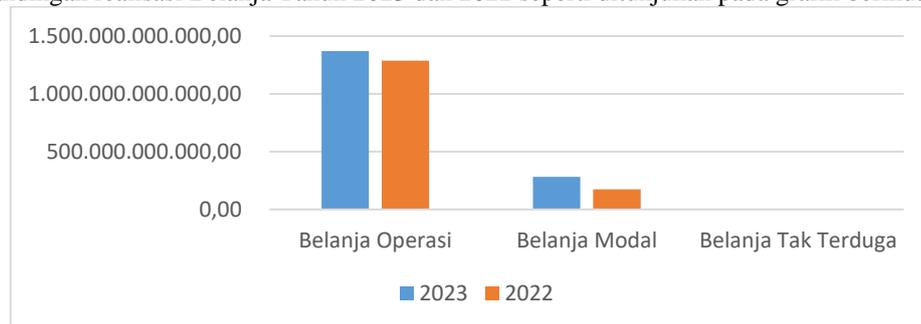
Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%, dari target yang ditetapkan senilai Rp0,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp58.183.204,00

5. Belanja Daerah

Berdasarkan Ketentuan Umum Belanja Daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.653.900.067.407,07 atau mencapai 93,70% dari anggaran senilai Rp1.765.190.255.854,00. Realisasi Belanja tahun 2023 meningkat sebesar 12,96% atau senilai Rp189.735.398.551,02 dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.464.164.668.856,05 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05
Belanja Modal	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
Belanja Transfer	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
Jumlah	1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70	1.464.164.668.856,05

Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Dari realisasi Belanja senilai Rp1.653.900.067.407,07 sudah termasuk realisasi Belanja di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung senilai Rp223.079.427.956,14, Dana JKN senilai Rp18.749.791.094,00 dan Dana BOS Satdikdas Negeri senilai Rp51.996.101.139,12.

5.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.369.444.965.929,07 atau 94,47% dari anggaran senilai Rp1.449.679.971.341,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34	565.614.183.592,00
Belanja Barang dan Jasa	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86	642.421.610.056,05
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00
Belanja Bantuan Sosial	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00
Jumlah	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05

5.1.01 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp582.272.814.082,00 atau 87,34% dari anggaran senilai Rp666.653.876.940,00. Rincian belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	390.151.191.167,00	345.562.332.398,00	88,57	337.443.371.412,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.079.704.885,00	112.251.117.079,00	81,29	107.582.035.467,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.003.526.451,00	90.314.610.743,00	92,15	81.203.705.580,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.235.836.520,00	22.704.507.365,00	97,71	22.686.885.420,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.038.401.073,00	1.015.808.236,00	97,82	1.055.005.836,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	100,00	905.760.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	15.232.736.844,00	9.511.958.261,00	62,44	14.737.419.877,00
Jumlah	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34	565.614.183.592,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penambahan pegawai dari penerimaan CPNS.
 - b. Mutasi pegawai dari luar Kota Mataram.
 - c. Adanya pegawai yang pensiun dan yang meninggal dunia
 - d. Mutasi pegawai yang keluar dari Kota Mataram
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp345.562.332.398,00 atau 88,57% dari anggaran senilai Rp390.151.191.167,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp337.443.371.412,00. Rincian belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	288.777.670.852,00	261.058.250.555,00	90,40	254.609.086.330,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.811.423.293,00	22.764.472.499,00	79,01	22.100.084.154,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.679.461.949,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.170.387.727,00	13.632.958.800,00	89,87	13.070.218.580,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.960.239.130,00	5.276.460.301,00	75,81	5.002.415.665,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	17.706.490.765,00	14.577.347.609,00	82,33	14.085.371.202,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.304.483.988,00	735.789.149,00	56,40	800.586.046,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.553.969,00	3.780.217,00	32,72	3.566.641,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.441.466.393,00	16.920.573.718,00	87,03	17.016.368.921,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	693.931.186,00	532.828.571,00	76,78	519.052.981,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.081.793.559,00	1.598.485.706,00	76,78	1.557.158.943,00
Jumlah	390.151.191.167,00	345.562.332.398,00	88,57	337.443.371.412,00

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN senilai Rp261.058.250.555,00 atau 90,40% dari anggaran senilai Rp288.777.670.852,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp254.609.086.330,00. Rincian Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	250.484.489.534,00	232.825.228.278,00	92,95	242.597.856.196,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	38.293.181.318,00	28.233.022.277,00	73,73	12.011.230.134,00
Jumlah	288.777.670.852,00	261.058.250.555,00	90,40	254.609.086.330,00

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN senilai Rp22.764.472.499,00 atau 79,01% dari anggaran senilai Rp28.811.423.293,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp22.100.084.154,00. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.115.458.031,00	20.383.598.710,00	88,18	21.109.561.416,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.695.965.262,00	2.380.873.789,00	41,80	990.522.738,00
Jumlah	28.811.423.293,00	22.764.472.499,00	79,01	22.100.084.154,00

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN senilai Rp8.461.385.273,00 atau 92,05% dari anggaran senilai Rp9.191.750.305,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp8.679.461.949,00. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.676.541.949,00
Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Jumlah	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.679.461.949,00

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Belanja Tunjangan Fungsional ASN merupakan Belanja Tunjangan Fungsional bagi PNS senilai Rp13.632.958.800,00 atau 89,87% dari anggaran senilai Rp15.170.387.727,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp13.070.218.580,00.

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN senilai Rp5.276.460.301,00 atau 75,81% dari anggaran senilai Rp6.960.239.130,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.002.415.665,00. Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.784.438.444,00	3.515.600.301,00	73,48	4.255.475.665,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.175.800.686,00	1.760.860.000,00	80,93	746.940.000,00
Jumlah	6.960.239.130,00	5.276.460.301,00	75,81	5.002.415.665,00

Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN senilai Rp14.577.347.609,00 atau 82,33% dari anggaran senilai Rp17.706.490.765,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp14.085.371.202,00. Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras PNS	14.505.455.924,00	12.768.947.789,00	88,03	13.321.122.942,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.201.034.841,00	1.808.399.820,00	56,49	764.248.260,00
Jumlah	17.706.490.765,00	14.577.347.609,00	82,33	14.085.371.202,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan Beras PPh/Tunjangan Khusus ASN

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN senilai Rp735.789.149,00 atau 56,40% dari anggaran senilai Rp1.304.483.988,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp800.586.046,00. Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.250.635.288,00	735.766.682,00	58,83	800.586.046,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	53.848.700,00	22.467,00	0,04	0,00
Jumlah	1.304.483.988,00	735.789.149,00	56,40	800.586.046,00

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN senilai Rp3.780.217,00 atau 32,72% dari anggaran senilai Rp11.553.969,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.390.428,00. Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.445.856,00	3.357.681,00	39,76	3.390.428,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.108.113,00	422.536,00	13,59	176.213,00
Jumlah	11.553.969,00	3.780.217,00	32,72	3.566.641,00

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN senilai Rp16.920.573.718,00 atau 87,03% dari anggaran senilai Rp19.441.466.393,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp17.016.368.921,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.059.295.554,00	15.540.903.149,00	86,05	16.543.229.468,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.382.170.839,00	1.379.670.569,00	99,82	473.139.453,00
Jumlah	19.441.466.393,00	16.920.573.718,00	87,03	17.016.368.921,00

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN senilai Rp532.828.571,00 atau 76,78% dari anggaran senilai Rp693.931.186,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp519.052.981,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	565.210.617,00	476.896.722,00	84,38	496.255.557,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.720.569,00	55.931.849,00	43,45	22.797.424,00
Jumlah	693.931.186,00	532.828.571,00	76,78	519.052.981,00

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN senilai Rp1.598.485.706,00 atau 76,78% dari anggaran senilai Rp2.081.793.559,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.557.158.943,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.741.465.092,00	1.430.690.162,00	82,15	1.488.766.673,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	340.328.467,00	167.795.544,00	49,30	68.392.270,00
Jumlah	2.081.793.559,00	1.598.485.706,00	76,78	1.557.158.943,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN senilai Rp112.251.117.079,00 atau 81,29% dari anggaran senilai Rp138.079.704.885,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp107.582.035.467,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	51.891.809.912,00	42.505.227.809,00	81,91	42.172.251.936,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	406.410.059,00	269.643.100,00	66,35	143.783.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.732.908.263,00	2.036.100.692,00	74,50	1.984.770.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	83.048.576.651,00	67.440.145.478,00	81,21	63.281.230.531,00
Jumlah	138.079.704.885,00	112.251.117.079,00	81,29	107.582.035.467,00

5.1.01.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN senilai Rp42.505.227.809,00 atau 81,91% dari anggaran senilai Rp51.891.809.912,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp42.172.251.936,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.453.325.912,00	39.616.297.950,00	89,12	42.172.251.936,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.438.484.000,00	2.888.929.859,00	38,84	0,00
Jumlah	51.891.809.912,00	42.505.227.809,00	81,91	42.172.251.936,00

5.1.01.02.03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kondisi Kerja ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS senilai Rp269.643.100,00 atau 66,35% dari anggaran senilai Rp406.410.059,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp143.783.000,00.

5.1.01.02.04 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS senilai Rp2.036.100.692,00 atau 74,50% dari anggaran senilai Rp2.732.908.263,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.984.770.000,00.

5.1.01.02.05 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN senilai Rp67.440.145.478,00 atau 81,21% dari anggaran senilai Rp83.048.576.651,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp63.281.230.531,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	65.826.672.474,00	60.621.846.753,00	92,09	63.281.230.531,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	17.221.904.177,00	6.818.298.725,00	39,59	0,00
Jumlah	83.048.576.651,00	67.440.145.478,00	81,21	63.281.230.531,00

5.1.01.03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai Rp90.314.610.743,00 atau 92,15% dari anggaran senilai Rp98.003.526.451,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp81.203.705.580,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.653.586.700,00	7.539.486.700,00	98,51	7.368.299.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.764.885.000,00	960.100.000,00	54,40	821.150.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	71.307.023.358,00	69.310.035.060,00	97,20	65.165.535.280,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.679.750.000,00	1.547.337.750,00	57,74	896.369.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.869.191.393,00	3.507.767.733,00	51,07	0,00
Belanja Honorarium	7.546.090.000,00	7.270.383.500,00	96,35	6.813.552.300,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	183.000.000,00	179.500.000,00	98,09	138.800.000,00
Jumlah	98.003.526.451,00	90.314.610.743,00	92,15	81.203.705.580,00

5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah ASN
 Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah senilai Rp7.539.486.700,00 atau 98,51% dari anggaran senilai Rp7.653.586.700,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.368.299.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.172.400.000,00	1.172.400.000,00	100,00	1.082.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.698.318.750,00	1.698.318.750,00	100,00	1.398.600.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	246.122.000,00	246.122.000,00	100,00	176.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	281.250.000,00	167.150.000,00	59,43	204.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.817.250.000,00	1.817.250.000,00	100,00	1.834.750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	105.450.000,00	105.450.000,00	100,00	133.125.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	88.435.950,00	88.435.950,00	100,00	57.999.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.085.490.000,00	1.085.490.000,00	100,00	1.224.225.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.158.870.000,00	1.158.870.000,00	100,00	1.257.350.000,00
Jumlah	7.653.586.700,00	7.539.486.700,00	98,51	7.368.299.000,00

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah senilai Rp960.100.000,00 atau 54,40% dari anggaran senilai Rp1.764.885.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp821.150.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	328.500.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	45.000.000,00	45,00	45.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	514.600.000,00	404.600.000,00	78,62	281.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	388.500.000,00	276.000.000,00	71,04	238.500.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	20.000.000,00	40,00	20.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	36.400.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	126.035.000,00	62.500.000,00	49,59	25.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	0,00
Jumlah	1.764.885.000,00	960.100.000,00	54,40	821.150.000,00

5.1.01.03.03 Belanja TPG PNSD

Realisasi Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD senilai Rp69.310.035.060,00 atau 97,20% dari anggaran senilai Rp71.307.023.358,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp65.165.535.280,00.

5.1.01.03.05 Belanja Tamsil Guru PNSD

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD senilai Rp1.547.337.750,00 atau 57,74% dari anggaran senilai Rp2.679.750.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp896.369.000,00.

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN senilai Rp3.507.767.733,00 atau 51,07% dari anggaran senilai Rp6.869.191.393,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

Realisasi Belanja Honorarium senilai Rp7.270.383.500,00 atau 96,35% dari anggaran senilai Rp7.546.090.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.813.552.300,00. Rincian Belanja Honorarium Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.247.380.000,00	6.082.963.500,00	97,37	5.601.090.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	582.460.000,00	493.170.000,00	84,67	386.712.300,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	716.250.000,00	694.250.000,00	96,93	825.750.000,00
Jumlah	7.546.090.000,00	7.270.383.500,00	96,35	6.813.552.300,00

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD senilai Rp179.500.000,00 atau 98,09% dari anggaran senilai Rp183.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp138.800.000,00. Rincian Belanja Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	48.000.000,00	45.000.000,00	93,75	45.000.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	135.000.000,00	134.500.000,00	99,63	93.800.000,00
Jumlah	183.000.000,00	179.500.000,00	98,09	138.800.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD senilai Rp22.704.507.365,00 atau 97,71% dari anggaran senilai Rp23.235.836.520,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp22.686.885.420,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	100,00	890.715.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	113.017.800,00	90,47	111.600.300,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000,00	122.679.480,00	85,19	122.534.640,00
Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00	76.482.000,00	85,71	76.324.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	100,00	1.291.536.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.069.000,00	125.788.950,00	99,78	124.510.050,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00	41.305.425,00	37,84	53.394.075,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	100,00	7.041.300.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	100,00	1.764.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	416.058.186,00	17.353.322,00	4,17	17.324.237,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.114.165.984,00	6.095.769.888,00	99,70	6.082.920.868,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000,00	5.106.000.000,00	100,00	5.106.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
Jumlah	23.235.836.520,00	22.704.507.365,00	97,71	22.686.885.420,00

5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp892.290.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp892.290.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp890.715.000,00.

5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD senilai Rp113.017.800,00 atau 90,47% dari anggaran senilai Rp124.920.600,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp111.600.300,00.

5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD senilai Rp122.679.480,00 atau 85,19% dari anggaran senilai Rp144.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp122.534.640,00.

5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp76.482.000,00 atau 85,71% dari anggaran senilai Rp89.229.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp76.324.500,00.

5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD senilai Rp1.293.820.500,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.293.820.500,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.291.536.750,00.

5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD senilai Rp125.788.950,00 atau 99,78% dari anggaran senilai Rp126.069.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp124.510.050,00.

5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD senilai Rp41.305.425,00 atau 37,84% dari anggaran senilai Rp109.163.250,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp53.394.075,00.

5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp7.056.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp7.056.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.041.300.000,00.

5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD senilai Rp1.764.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.764.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.764.000.000,00.

5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp17.353.322,00 atau 4,17% dari anggaran senilai Rp416.058.186,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp17.324.237,00.

5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp6.095.769.888,00 atau 99,70% dari anggaran senilai Rp6.114.165.984,00. Sedangkan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.000.000,00	78.827.616,00	82,11	78.478.596,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.141.496,00	1.835.568,00	85,71	1.835.568,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.424.488,00	5.506.704,00	85,71	5.506.704,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.009.600.000,00	6.009.600.000,00	100,00	5.997.100.000,00
Jumlah	6.114.165.984,00	6.095.769.888,00	99,70	6.082.920.868,00

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp5.106.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.106.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.106.000.000,00.

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp5.106.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.106.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.106.000.000,00.

5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD untuk tahun 2023 tidak dianggarkan atau Rp.0,00 Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.725.000,00.

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH senilai Rp1.015.808.236,00 atau 97,82% dari anggaran senilai Rp1.038.401.073,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.055.005.836,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00	7.531.680,00	92,86	6.952.320,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.467.626,00	854.556,00	58,23	827.556,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.280,00	1.000,00	78,13	960,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	333.363,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	416.704,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	857.547.000,00	836.897.000,00	97,59	886.701.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.038.401.073,00	1.015.808.236,00	97,82	1.055.005.836,00

5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH senilai Rp54.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp54.600.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.600.000,00.

5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH senilai Rp7.644.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp7.644.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.644.000,00.

5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH senilai Rp98.280.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp98.280.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp98.280.000,00.

5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH senilai Rp7.531.680,00 atau 92,86% dari anggaran senilai Rp8.111.100,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.952.320,00

5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH senilai Rp854.556,00 atau 58,23% dari anggaran senilai Rp1.467.626,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp827.556,00.

5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH senilai Rp1.000,00 atau 78,13% dari anggaran senilai Rp1.280,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp960,00.

5.1.01.05.10 Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah senilai Rp836.897.000,00 atau 97,59% dari anggaran senilai Rp857.547.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp886.701.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	117.750.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	185.757.450,00	185.757.450,00	100,00	151.400.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	22.278.000,00	22.278.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	23.750.000,00	3.100.000,00	13,05	36.000.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	276.500.000,00	276.500.000,00	100,00	215.250.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	16.875.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.131.550,00	8.131.550,00	100,00	7.001.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	138.950.000,00	138.950.000,00	100,00	175.775.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	106.930.000,00	106.930.000,00	100,00	142.650.000,00
Jumlah	857.547.000,00	836.897.000,00	97,59	886.701.000,00

5.1.01.05.11 Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah merupakan Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing senilai Rp10.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH senilai Rp912.480.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp912.480.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp905.760.000,00. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	305.760.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah	912.480.000,00	912.480.000,00	100,00	905.760.000,00

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD senilai Rp9.511.958.261,00 atau 62,44% dari anggaran senilai Rp15.232.736.844,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp14.737.419.877,00.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 senilai Rp677.683.569.029,07 atau 101,86% dari anggaran senilai Rp665.304.338.554,00 sudah termasuk realisasi Belanja Barang/Jasa BLUD senilai Rp200.400.041.853,14 dari anggaran sebesar Rp146.942.054.739,00 atau 136,38% yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah, serta Belanja Barang dan Jasa JKN senilai Rp17.216.959.756,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp42.604.999.381,93. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	131.137.552.755,00	120.636.882.877,00	91,99	118.443.292.480,00
Belanja Jasa	271.325.601.585,00	254.421.305.976,00	93,77	243.829.612.718,00
Belanja Pemeliharaan	20.785.643.203,00	19.428.914.871,00	93,47	15.806.598.217,00
Belana Perjalanan Dinas	42.902.447.695,00	36.574.933.905,00	85,25	33.912.019.243,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.435.751.513,00	3.616.490.165,00	81,53	4.504.606.400,00
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)				
Belanja Barang dan Jasa BOS	47.775.287.064,00	42.604.999.381,93	89,18	41.988.173.720,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP				
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.942.054.739,00	200.400.041.853,14	136,38	183.937.307.278,05
Jumlah	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86	642.421.610.056,05

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 senilai Rp677.683.569.029,07 atau 101,86% dari anggaran senilai Rp665.304.338.554,00 sudah termasuk realisasi Belanja Barang/Jasa BLUD senilai Rp200.400.041.853,14 dari anggaran sebesar Rp146.942.054.739,00 atau

136,38% yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah, serta Belanja Barang dan Jasa JKN senilai Rp17.216.959.756,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp42.604.999.381,93. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.

- Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.02.01 Belanja Barang

Belanja Barang Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp120.636.882.877,00 atau 91,99% dari anggaran senilai Rp131.137.552.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	130.811.155.824,00	120.311.397.752,00	91,97	118.191.423.595,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	326.396.931,00	325.485.125,00	99,72	251.868.885,00
Jumlah	131.137.552.755,00	120.636.882.877,00	91,99	118.443.292.480,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp120.311.397.752,00 atau 91,97% dari anggaran senilai Rp130.811.155.824,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp118.191.423.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.150.182.177,00	1.080.265.235,00	93,92	971.402.544,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	958.043.875,00	637.640.512,00	66,56	2.524.710.937,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.388.634.005,00	13.748.107.941,00	95,55	13.620.599.778,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	741.630.000,00	690.230.000,00	93,07	15.959.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	770.301.500,00	712.363.000,00	92,48	578.745.500,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	56.850.000,00	46.260.250,00	81,37	45.078.750,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	54.941.000,00	32.162.000,00	58,54	25.666.775,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.187.297.785,00	6.427.321.694,00	89,43	5.521.067.437,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.820.197.000,00	1.750.256.172,00	96,16	1.361.719.434,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	141.000.000,00	121.829.615,00	86,40	249.285.033,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.273.400,00	2.703.500,00	32,68	5.789.635,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	14.581.071,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.120.000,00	9.088.000,00	99,65	12.650.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.864.500,00	11.864.500,00	100,00	11.565.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	723.153.800,00	699.604.462,00	96,74	1.015.690.632,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.090.748.292,00	3.588.004.966,00	87,71	3.431.441.613,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.440.154.576,00	2.236.569.833,00	91,66	1.915.540.579,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.558.831.338,00	7.570.923.647,00	88,46	6.946.030.415,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	244.091.300,00	228.578.600,00	93,64	220.571.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	281.650.000,00	252.140.750,00	89,52	205.560.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.122.414.866,00	1.944.103.802,00	91,60	1.862.959.531,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.063.023.108,00	1.891.127.032,00	91,67	2.030.299.544,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.230.913.384,00	1.144.570.278,00	92,99	497.438.080,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	321.024.000,00	299.511.730,00	93,30	276.316.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.410.000,00	31.410.000,00	100,00	13.420.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	637.009.400,00	549.971.000,00	86,34	592.157.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.329.149.733,00	4.140.043.871,00	77,69	2.162.632.445,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	8.776.389.712,00	8.270.746.004,00	94,24	17.845.880.133,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	217.154.832,00	158.685.440,00	73,07	112.382.936,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.247.499.771,00	33.547.781.015,00	97,96	30.129.204.043,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	74.542.640,00	64.828.618,00	86,97	1.063.298.370,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.535.772.040,00	1.985.109.500,00	78,28	872.425.450,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	148.375.265,00	148.371.040,00	100,00	130.237.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	767.804.000,00	50.000.000,00	6,51	99.960.000,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00
Belanja Persediaan Penelitian Lainnya				
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.362.946.750,00	20.330.251.558,00	90,91	15.543.779.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.786.650.000,00	1.767.270.547,00	98,92	1.756.764.730,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	3.840.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.167.550.000,00	1.117.500.000,00	95,71	970.471.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	783.135.000,00	659.431.000,00	84,20	384.175.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	120.000.000,00	119.969.000,00	99,97	111.976.800,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45.100.000,00	45.100.000,00	100,00	157.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	274.330.000,00	92.000.000,00	33,54	320.459.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	291.005.000,00	290.938.640,00	99,98	674.597.475,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	68.000.000,00	67.920.000,00	99,88	63.936.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.640.000,00	16.620.000,00	99,88	35.040.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	84.875.500,00
Belanja Pakaian Siaga	141.199.775,00	140.265.000,00	99,34	15.614.000,00
Belanja Pakaian Teknik	19.775.000,00	18.025.000,00	91,15	70.619.325,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	75.729.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	247.600.000,00	247.404.000,00	99,92	63.025.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	515.889.500,00	505.824.000,00	98,05	525.401.500,00
Belanja Pakaian Olahraga	661.447.500,00	650.265.000,00	98,31	768.411.750,00
Belanja Pakaian Paskibraka	60.120.000,00	60.120.000,00	100,00	62.460.000,00
Jumlah	130.811.155.824,00	120.311.397.752,00	91,97	118.191.423.595,00

5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp325.485.125,00 atau 99,72% dari anggaran senilai Rp326.396.931,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp251.868.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	95.155.000,00	95.155.000,00	100,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	209.447.829,00	208.934.800,00	99,76	227.096.200,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	18.139.102,00	17.824.325,00	98,26	24.022.685,00
Belanja Pipa-Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.655.000,00	3.571.000,00	97,70	0,00
Jumlah	326.396.931,00	325.485.125,00	99,72	251.868.885,00

5.1.02.02 Belanja Jasa

Belanja Jasa Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp254.421.305.976,00 atau 93,77% dari anggaran senilai Rp271.325.601.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	214.504.806.905,00	205.290.484.884,00	95,70	200.054.313.987,00
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	38.398.160.633,00	34.209.142.286,00	89,09	22.871.625.917,00
Belanja Sewa Tanah	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.070.516.909,00	2.769.814.498,00	90,21	1.542.697.474,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.385.268.000,00	3.147.077.000,00	92,96	3.378.090.300,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.765.133,00	20.765.133,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	229.750.000,00	203.250.000,00	88,47	431.620.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.375.639.705,00	2.647.404.576,00	60,50	4.750.077.615,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.418.065.000,00	3.001.172.299,00	87,80	3.628.304.782,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	3.222.763.543,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	125.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.030.013.000,00	2.465.679.000,00	81,38	3.633.119.100,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	423.866.300,00	421.116.300,00	99,35	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	435.400.000,00	215.400.000,00	49,47	180.000.000,00
Jumlah	271.325.601.585,00	254.421.305.976,00	93,77	243.829.612.718,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp205.290.484.884,00 atau 95,70% dari anggaran senilai Rp214.504.806.905,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp200.054.313.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	61.200.000,00	61.050.000,00	99,75	99.584.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.619.760.000,00	4.624.566.053,00	82,29	4.235.361.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.619.950.000,00	28.301.705.252,00	92,43	32.189.698.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	440.800.000,00	396.000.000,00	89,84	412.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.459.200.000,00	1.441.790.000,00	98,81	185.300.000,00
Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00	9.150.000,00	63,54	8.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	257.880.000,00	257.880.000,00	100,00	345.060.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	826.950.000,00	811.350.000,00	98,11	244.125.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	828.400.000,00	729.200.000,00	88,03	702.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.335.720.000,00	7.320.000.000,00	99,79	9.903.960.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.759.004.335,00	27.478.471.702,00	98,99	14.016.832.602,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	68.625.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.117.641.254,00	8.533.133.854,00	93,59	7.682.886.550,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.053.227.500,00	3.004.807.500,00	98,41	4.211.381.250,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.058.400.000,00	1.058.400.000,00	100,00	1.058.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.340.400.000,00	2.340.400.000,00	100,00	2.207.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.735.871.500,00	1.718.374.500,00	98,99	8.765.787.500,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	396.000.000,00	395.250.000,00	99,81	396.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	8.276.677.600,00	7.383.159.531,00	89,20	8.008.305.006,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	113.400.000,00	113.400.000,00	100,00	129.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	278.446.000,00	258.558.000,00	92,86	53.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	92.130.000,00	84.630.000,00	91,86	120.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.164.700.000,00	9.087.075.000,00	99,15	8.435.557.500,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.017.350.000,00	2.004.620.000,00	99,37	1.447.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.675.250.000,00	17.652.727.500,00	99,87	17.976.210.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.520.934.000,00	2.259.179.000,00	89,62	2.041.614.308,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.689.146.000,00	18.633.516.988,00	99,70	17.955.258.678,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.670.800.000,00	4.636.300.000,00	99,26	3.273.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	81.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.383.200.000,00	2.376.150.000,00	99,70	1.591.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	268.238.250,00	133.650.000,00	49,83	145.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	501.000.000,00	501.000.000,00	100,00	272.900.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.550.000,00	145.500.000,00	88,96	72.125.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	94.800.000,00	93.300.000,00	98,42	41.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	50.200.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	24.524.050,00	23.954.050,00	97,68	2.985.500,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	495.000.000,00	303.918.000,00	61,40	306.234.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000,00	29.859.000,00	99,53	105.700.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.864.679.670,00	1.849.630.650,00	99,19	1.078.010.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	160.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	46.014.950,00	38.958.000,00	84,66	51.990.900,00
Belanja Jasa Kalibrasi	77.768.280,00	72.039.674,00	92,63	52.574.724,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	751.237.800,00	377.868.103,00	50,30	2.280.112.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	383.070.000,00	331.870.000,00	86,63	305.320.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.473.189.175,00	2.299.919.775,00	92,99	1.915.400.707,00
Belanja Tagihan Telepon	190.982.000,00	158.839.886,00	83,17	176.527.269,00
Belanja Tagihan Air	1.009.562.250,00	670.640.776,00	66,43	585.422.294,00
Belanja Tagihan Listrik	30.286.259.214,00	29.788.146.855,00	98,36	3.240.595.936,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.830.600,00	757.958.700,00	84,14	698.721.620,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.400.344.500,00	4.016.313.637,00	91,27	3.246.198.475,00
Belanja Paket/Pengiriman	36.265.000,00	17.608.400,00	48,55	156.422.850,00
Belanja Penambahan Daya	32.500.000,00	13.504.500,00	41,55	22.804.545,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	807.620.577,00	493.864.948,00	61,15	399.539.757,00
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.000.000.000,00	4.999.990.000,00	100,00	31.075.285.846,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	24.242.400,00	7.102.200,00	29,30	1.020.000,00
Belanja Lembur	5.425.690.000,00	4.858.689.500,00	89,55	4.194.475.000,00
Belanja Medical Check Up	96.400.000,00	21.313.350,00	22,11	73.340.670,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	1.469.210.000,00
Jumlah	214.504.806.905,00	205.290.484.884,00	95,70	200.054.313.987,00

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp34.209.142.286,00 atau 89,09% dari anggaran senilai Rp38.398.160.633,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp22.871.625.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.531.000.000,00	26.827.045.000,00	97,44	19.925.080.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.058.272.000,00	2.972.090.900,00	97,18	2.129.958.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.893.015.829,00	467.618.268,00	16,16	4.497.994,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	526.874.200,00	400.272.245,00	75,97	358.201.942,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	869.056.761,00	511.236.093,00	58,83	453.887.381,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.519.941.843,00	3.030.879.780,00	86,11	0,00
Jumlah	38.398.160.633,00	34.209.142.286,00	89,09	22.871.625.917,00

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.769.814.498,00 atau 90,21% dari anggaran senilai Rp3.070.516.909,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.542.697.474,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	212.830.000,00	154.180.000,00	72,44	103.330.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00
Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.040.676.000,00	1.919.214.298,00	94,05	729.646.500,00
Belanja Sewa Mebel	30.170.000,00	30.170.000,00	100,00	59.045.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	194.717.000,00
Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	186.750.000,00	186.750.000,00	100,00	213.550.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.588.974,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	237.240.909,00	199.750.200,00	84,20	22.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan Bantu	189.000.000,00	186.000.000,00	98,41	0,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00	31.250.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	0,00
Jumlah	3.070.516.909,00	2.769.814.498,00	90,21	1.542.697.474,00

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.147.077.000,00 atau 92,96% dari anggaran senilai Rp3.385.268.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.378.090.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	274.600.000,00	274.600.000,00	100,00	341.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	832.852.000,00	774.617.000,00	93,01	1.398.060.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	76.248.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.600.000,00	10.300.000,00	97,17	12.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	94.000.000,00	84.500.000,00	89,89	141.460.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.625.000,00	39.550.000,00	95,02	62.750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	24.000.000,00	17.540.000,00	73,08	0,00
Belanja Sewa Taman	168.350.000,00	166.720.000,00	99,03	16.000.000,00
Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Belanja Sewa Hotel	1.939.241.000,00	1.779.250.000,00	91,75	1.251.071.400,00
Jumlah	3.385.268.000,00	3.147.077.000,00	92,96	3.378.090.300,00

5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp20.765.133,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp20.765.133,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	18.465.133,00	18.465.133,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	12.000.000,00
Jumlah	20.765.133,00	20.765.133,00	100,00	12.000.000,00

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp203.250.000,00 atau 88,47% dari anggaran senilai Rp229.750.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp431.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Audio Visual	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	252.000.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	199.000.000,00	197.500.000,00	99,25	1.500.000,00
Belanja Sewa Tanaman	0,00	0,00	0,00	153.120.000,00
Jumlah	229.750.000,00	203.250.000,00	88,47	431.620.000,00

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.647.404.576,00 atau 60,50% dari anggaran senilai Rp4.375.639.705,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.750.077.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	200.000.000,00	99.580.000,00	49,79	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	173.500.000,00	172.280.000,00	99,30	538.615.963,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	420.703.372,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	649.830.000,00	634.337.000,00	97,62	196.795.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	0,00	0,00	0,00	59.624.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan				
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	135.000.000,00	133.671.750,00	99,02	424.867.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	70.000.000,00	66.919.000,00	95,60	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	37.610.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	81.160.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	101.500.000,00	100.711.800,00	99,22	1.029.239.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	500.200.000,00	99.250.000,00	19,84	367.194.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	514.734.000,00	0,00	0,00	119.907.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	78.500.000,00	77.425.000,00	98,63	11.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	281.400.000,00	90.937.000,00	32,32	225.922.767,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	99.255.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	389.588.000,00	2.250.000,00	0,58	2.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	19.823.705,00	15.817.126,00	79,79	13.536.113,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	736.000.000,00	636.076.000,00	86,42	1.061.650.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	48.984.300,00	97,97	49.772.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	475.564.000,00	469.165.600,00	98,65	10.325.000,00
Jumlah	4.375.639.705,00	2.647.404.576,00	60,50	4.750.077.615,00

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.001.172.299,00 atau 87,80% dari anggaran senilai Rp3.418.065.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.628.304.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.000.000,00	73.780.000,00	98,37	426.313.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	87.000.000,00	6.499.300,00	7,47	170.583.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	509.565.000,00	306.312.500,00	60,11	423.961.956,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.010.000.000,00	1.003.701.000,00	99,38	897.817.826,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.537.500.000,00	1.412.606.999,00	91,88	1.387.529.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	99.000.000,00	98.700.500,00	99,70	247.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	100.000.000,00	99.572.000,00	99,57	0,00
Jumlah	3.418.065.000,00	3.001.172.299,00	87,80	3.628.304.782,00

5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp30.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp125.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Jumlah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	125.000.000,00

5.1.02.02.12 Belanja Kursus /Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.465.679.000,00 atau 81,38% dari anggaran senilai Rp3.030.013.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.633.119.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		520.878.000,00		
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	724.653.000,00		71,88	693.354.100,00
Belanja Sosialisasi	899.560.000,00	757.761.000,00	84,24	1.298.090.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.405.800.000,00	1.187.040.000,00	84,44	1.132.400.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	509.275.000,00
Jumlah	3.030.013.000,00	2.465.679.000,00	81,38	3.633.119.100,00

5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp421.116.300,00 atau 99,35% dari anggaran senilai Rp423.866.300,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.923.800,00	65.923.800,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.000.000,00	2.250.000,00	45,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	56.250.000,00	56.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.432.500,00	3.432.500,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	175.560.000,00	175.560.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea	59.200.000,00	59.200.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah	423.866.300,00	421.116.300,00	99,35	0,00

5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp215.400.000,00 atau 49,47% dari anggaran senilai Rp435.400.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp180.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000,00	180.000.000,00	45,00	180.000.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	0,00
Jumlah	435.400.000,00	215.400.000,00	49,47	180.000.000,00

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp19.428.914.871,00 atau 93,47% dari anggaran senilai Rp20.785.643.203,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.806.598.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.130.629.068,00	10.964.624.843,00	90,39	9.408.043.789,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.884.314.135,00	6.723.381.028,00	97,66	4.310.249.193,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	312.800.000,00	285.488.000,00	91,27	326.349.735,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	482.900.000,00	482.400.000,00	99,90	0,00
Jumlah	20.785.643.203,00	19.428.914.871,00	93,47	15.806.598.217,00

5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja pemeliharaan Tanah tahun 2023 direalisasikan senilai Rp973.021.000,00 atau 99,80% dari anggaran senilai Rp.975.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.1.761.955.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00

5.1.02.03:02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp10.964.624.843,00 atau 90,39% dari anggaran senilai Rp12.130.629.068,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.408.043.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	10.000.000,00	2.770.000,00	27,70	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	69.000.000,00	58.377.000,00	84,60	77.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	2.000.000,00	1.539.500,00	76,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	138.430.000,00	104.378.700,00	75,40	99.881.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	5.098.500,00	84,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.309.975.200,00	2.150.366.770,00	93,09	1.888.806.180,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.366.152.000,00	2.193.318.759,00	92,70	2.031.911.298,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	306.275.550,00	303.475.550,00	99,09	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.373.083.000,00	1.163.761.110,00	84,76	905.347.222,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.196.850.000,00	1.154.153.721,00	96,43	1.374.312.815,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	29.955.000,00	99,85	137.132.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	624.760.000,00	552.907.126,00	88,50	581.939.539,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung	84.000.000,00	78.794.500,00	93,80	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bermotor-Alat Angkutan Apung				
Bermotor untuk Penumpang				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Bermesin-Perkakas	6.000.000,00	5.812.600,00	96,88	0,00
Bengkel Kayu				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Bermesin-Alat Bengkel	86.250.000,00	86.162.000,00	99,90	0,00
Bermesin Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Tak Bermesin-Perkakas	0,00	0,00	0,00	12.674.400,00
Bengkel Listrik				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Tak Bermesin-Peralatan	0,00	0,00	0,00	2.534.000,00
Tukang Kayu				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-				
Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	149.871.436,00
Belanja Pemeliharaan Alat				
Pertanian-Alat Pengolahan-Alat				
Pengolahan Tanah dan Tanaman	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat				
Pertanian-Alat Pengolahan-Alat				
Pemeliharaan Tanaman/	10.200.000,00	6.765.000,00	66,32	3.375.000,00
Ikan/Ternak				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Alat Reproduksi (Penggandaan)				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Alat Kantor Lainnya	339.700.000,00	280.126.000,00	82,46	90.347.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Mebel	72.850.000,00	19.300.000,00	26,49	42.955.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Pembersih	26.950.000,00	20.646.000,00	76,61	24.785.748,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Pendingin	325.365.500,00	271.438.750,00	83,43	200.662.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Rumah Tangga				
Lainnya (Home Use)	197.440.000,00	122.045.650,00	61,81	160.645.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	1.875.000,00	75,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.750.000,00	4.000.000,00	51,61	2.050.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	35.550.000,00	9.605.358,00	27,02	7.026.475,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	26.573.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	521.457.500,00	429.244.707,00	82,32	297.138.800,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	102.120.000,00	81.455.330,00	79,76	1.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	186.310.000,00	166.779.916,00	89,52	175.013.890,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.000.000,00	59.900.000,00	99,83	182.540.900,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.575.000,00	13.798.648,00	94,67	72.784.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	8.000.000,00	7.924.000,00	99,05	0,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	644.000.000,00	632.477.000,00	98,21	742.709.620,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	800.585.318,00	784.189.648,00	97,95	51.825.866,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	100.000.000,00	99.733.000,00	99,73	0,00
Jumlah	12.130.629.068,00	10.964.624.843,00	90,39	9.408.043.789,00

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp6.723.381.028,00 atau 97,66% dari anggaran senilai Rp6.884.314.135,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.310.249.193,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.230.867.482,00	4.106.236.028,00	97,05	2.898.395.793,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	2.544.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	592.872.000,00	592.872.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	190.000.000,00	189.000.000,00	99,47	388.445.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	995.845.653,00	993.839.000,00	99,80	52.650.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	105.180.000,00	103.809.000,00	98,70	0,00
Bangunan Fasilitas Umum				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	918.749.000,00
Gedung Tempat Kerja-Taman				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	494.549.000,00	462.725.000,00	93,57	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun				
Belanja Pemeliharaan Tugu				
Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda				
Batas-Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	49.465.000,00
Lainnya				
Jumlah	6.884.314.135,00	6.723.381.028,00	97,66	4.310.249.193,00

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp285.488.000,00 atau 91,27% dari anggaran senilai Rp312.800.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp326.349.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Air Irigasi Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Pengaman				
Sungai/Pantai dan Penanggulangan	0,00	0,00	0,00	104.436.000,00
Bencana Alam-Bangunan				
Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Pengembangan				
Sumber Air dan Air Tanah-	68.500.000,00	68.389.000,00	99,84	68.310.000,00
Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air				

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000,00	6.092.000,00	60,92	9.848.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	99.000.000,00	76.119.000,00	76,89	32.764.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000,00	39.588.000,00	98,97	37.620.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00	63.371.735,00
Jumlah	312.800.000,00	285.488.000,00	91,27	326.349.735,00

5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp482.400.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp482.900.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.574.933.905,00 atau 85,25% dari anggaran senilai Rp42.902.447.695,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp33.912.019.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.716.972.695,00	36.507.402.917,00	85,46	33.912.019.243,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	185.475.000,00	67.530.988,00	36,41	0,00
Jumlah	42.902.447.695,00	36.574.933.905,00	85,25	33.912.019.243,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.507.402.917,00 atau 85,46% dari anggaran senilai Rp42.716.972.695,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp33.912.019.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.585.246.695,00	26.689.040.221,00	87,26	25.576.217.540,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	74.828.000,00	19.600.000,00	26,19	11.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.968.588.000,00	9.135.414.186,00	83,29	7.007.497.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	770.518.000,00	499.475.000,00	64,82	1.125.005.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	317.792.000,00	163.873.510,00	51,57	192.249.703,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	42.716.972.695,00	36.507.402.917,00	85,46	33.912.019.243,00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp67.530.988,00 atau 36,41% dari anggaran senilai Rp185.475.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.616.490.165,00 atau 81,53% dari anggaran senilai Rp4.435.751.513,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.504.606.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.402.907.000,00	2.179.471.000,00	90,70	1.548.841.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.032.844.513,00	1.437.019.165,00	70,69	2.955.765.400,00
Jumlah	4.435.751.513,00	3.616.490.165,00	81,53	4.504.606.400,00

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.179.471.000,00 atau 90,70% dari anggaran senilai Rp2.402.907.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.548.841.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.018.507.000,00	1.808.671.000,00	89,60	1.061.741.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	369.400.000,00	369.400.000,00	100,00	364.100.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.000.000,00	1.400.000,00	9,33	3.000.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Jumlah	2.402.907.000,00	2.179.471.000,00	90,70	1.548.841.000,00

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.437.019.165,00 atau 70,69% dari anggaran senilai Rp2.032.844.513,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.955.765.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.823.284.513,00	1.284.709.165,00	70,46	2.921.565.400,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	209.560.000,00	152.310.000,00	72,68	34.200.000,00
Jumlah	2.032.844.513,00	1.437.019.165,00	70,69	2.955.765.400,00

5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp42.604.999.381,93 atau 89,18% dari anggaran senilai Rp47.775.287.064,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp41.988.173.720,00

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp200.400.041.853,14 atau 136,38% dari anggaran senilai Rp146.942.054.739,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp183.937.307.278,05.

5.1.03 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00

5.1.05 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan, Belanja Hibah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp85.182.145.969,00 dan atau 93,27% dari anggaran senilai Rp91.330.525.847,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp62.881.075.691,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	94.050.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00	100,00	3.175.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.576.420.000,00	23.631.177.600,00	88,92	15.370.008.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00
• Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	243.000.000,00	208.500.000,00	85,80	0,00
Belanja Hibah Dana BOS				
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.967.540.000,00	11.353.655.649,00	103,52	10.178.684.782,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720,00	1.006.145.720,00	100,00	1.006.145.720,00
Jumlah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Direalisasikan hibah kepada KPU dan Bawaslu guna Kegiatan Pemilu Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan surat Mendagri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Pada tahun 2023 hibah kepada Pemerintah pusat diberikan kepada Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu berupa hibah uang yang dipergunakan pemilukada tahun 2024 yang pendanaannya di mulai tahun 2023 yang pemberian hibahnya didasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 1152/XII/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Dana Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota mataram dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
 - b. Pada tahun 2022 Hibah Kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada KPU sebesar Rp. 100.000.000,00 dan
3. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pemberian hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2023 tidak menganggarkan hibah kepada pemerintah daerah lainnya.

4. Pemberian Hibah kepada BUMN merupakan pemberian hibah pada tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Mataram tidak menganggarkan hibah kepada BUMN.
5. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah dan swasta Kota Mataram selama TA 2023 yang didasarkan pada pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
6. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 280/IV/2022 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Periode Tahun 2019-2024 untuk tahun 2022 dan Keputusan Walikota Mataram Nomor 139/II/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Periode Tahun 2019-2024 untuk tahun 2023 yang memperoleh suara di DPRD Kota Mataram TA. 2022 dan TA. 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Golongan Karya (Golkar)	165.260.540,00	165.260.540,00	100,00	165.260.540,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	75.736.280,00	75.736.280,00	100,00	75.736.280,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	58.497.900,00	58.497.900,00	100,00	58.497.900,00
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	33.936.500,00	33.936.500,00	100,00	33.936.500,00
Partai Amanah Nasional (PAN)	73.743.220,00	73.743.220,00	100,00	73.743.220,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	147.186.800,00	147.186.800,00	100,00	147.186.800,00
Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P)	107.706.960,00	107.706.960,00	100,00	107.706.960,00
Partai Berkarya	51.206.660,00	51.206.660,00	100,00	51.206.660,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	72.898.780,00	72.898.780,00	100,00	72.898.780,00
Partai Demokrat	85.370.160,00	85.370.160,00	100,00	85.370.160,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	31.171.640,00	31.171.640,00	100,00	31.171.640,00
Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)	103.430.280,00	103.430.280,00	100,00	103.430.280,00
Jumlah	1.006.145.720,00	1.006.145.720,00	100,00	1.006.145.720,00

1. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah selama TA 2023 yang didasarkan pada pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 20 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan PAUD selama TA 2023 yang didasarkan pada pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

- 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- c. Satuan pendidikan kesetaraan selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- g)

5.1.05.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.694.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	94.050.000,00
Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.694.050.000,00

5.1.05.05 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp62.822.344.600,00 atau 90,58% dari anggaran senilai Rp69.356.840.127,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp49.002.195.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00	100,00	3.175.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.576.420.000,00	23.631.177.600,00	88,92	15.370.008.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	243.000.000,00	208.500.000,00	85,80	0,00
Jumlah	69.356.840.127,00	62.822.344.600,00	90,58	49.002.195.189,00

5.1.05.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.805.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp2.805.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.175.000.000,00.

5.1.05.05.02 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp23.631.177.600,00 atau 88,92% dari anggaran senilai Rp26.576.420.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.370.008.000,00.

5.1.05.05.03 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.177.667.000,00 atau 91,05% dari anggaran senilai Rp39.732.420.127,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp30.457.187.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.753.001.127,00	35.250.200.000,00	90,96	30.182.787.189,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	979.419.000,00	927.467.000,00	94,70	274.400.000,00
Jumlah	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00

5.1.05.05.05 Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp208.500.000,00 atau 85,80% dari anggaran senilai Rp243.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.05.06 Belanja Hibah Dana Bos

Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp11.353.655.649,00 atau 103,52% dari anggaran senilai Rp10.967.540.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.178.684.782,00.

5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.006.145.720,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.006.145.720,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.006.145.720,00.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 direalisasikan senilai

Rp24.306.436.849,00 atau 92,10% dari anggaran senilai Rp26.391.230.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp16.570.993.525,00 dengan rincian sebagai berikut: sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.259.060.000,00	10.401.780.000,00	92,39	4.594.220.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	573.000.000,00	573.000.000,00	100,00	4.165.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.500.620.000,00	11.296.680.000,00	90,37	5.368.620.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.058.550.000,00	2.034.976.849,00	98,85	2.312.653.525,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	130.500.000,00
Jumlah	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya adalah di tahun 2023 dianggarkan sesuai usulan yang masuk sehingga anggaran 2023 lebih besar dari Tahun 2022 jadi realisasi 2023 lebih tinggi dari 2022 dan juga diSK-kan sesuai dengan yang dianggarkan.
2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp10.401.780.000,00 atau 92,39% dari anggaran senilai Rp11.259.060.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.594.220.000,00.

5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp573.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp573.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.165.000.000,00.

5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp13.331.656.849,00 atau 91,57% dari anggaran senilai Rp14.559.170.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.681.273.525,00

5.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Realisasi Belanja Modal untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp281.979.453.862,00 atau 91,49% dari anggaran senilai Rp308.214.060.513,00. Dari realisasi Belanja Modal tersebut sudah termasuk Belanja Modal dari BLUD yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp12.515.925.842,00, dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri lingkup Kota Mataram senilai Rp9.572.625.836,00 dan dari Dana JKN pada Puskesmas lingkup Kota Mataram senilai Rp1.532.831.338,00 yang dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95	3.206.146.629,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
Jumlah	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.2.01 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Belanja Modal Tanah Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp20.305.698.726,00 atau 95,91% dari anggaran senilai Rp21.171.820.492,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.374.815.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	13.259.210.584,00	12.882.060.160,00	97,16	4.740.508.700,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	7.912.609.908,00	7.423.638.566,00	93,82	6.634.306.558,00
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kesalahan penganggaran dan
 - b. Dikarenakan dokumen sertifikat tanah tidak lengkap

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil

Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp12.882.060.160,00 atau 97,16% dari anggaran senilai Rp13.259.210.584,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.740.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.909.210.584,00	12.882.060.160,00	99,79	4.740.068.700,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	350.000.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Jumlah	13.259.210.584,00	12.882.060.160,00	97,16	4.740.508.700,00

Terhadap Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp12.882.060.160,00 terdapat Modal Pembayaran Hutang Tanah Sebesar Rp11.000.000.000,00.

5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan

Belanja Modal Lapangan Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.423.638.566,00 atau 93,82% dari anggaran senilai Rp7.912.609.908,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.634.306.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.627.459.908,00	2.526.690.086,00	96,16	4.149.992.058,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	201.030.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Makam	5.209.750.000,00	4.828.889.000,00	92,69	1.318.868.500,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Taman	22.000.000,00	14.659.480,00	66,63	964.416.000,00
Jumlah	7.912.609.908,00	7.423.638.566,00	93,82	6.634.306.558,00

5.2.02 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp115.171.860.211,00 atau 93,62% dari anggaran senilai Rp123.014.933.652,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp48.269.561.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	7.384.127.728,00	7.122.075.750,00	96,45	2.826.339.678,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.943.833.499,00	7.764.002.862,00	97,74	6.452.578.319,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	349.323.000,00	267.407.685,00	76,55	1.189.839.272,00
Belanja Modal Alat Pertanian	298.577.250,00	148.527.000,00	49,74	215.545.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.553.758.465,00	11.548.628.257,00	99,96	11.516.761.954,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.169.621.980,00	1.027.058.364,00	87,81	1.086.796.884,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	77.288.323.814,00	74.181.479.858,00	95,98	8.296.105.504,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	6.322.266.616,00	4.531.750.330,00	71,68	5.482.845.313,00
Belanja Modal Komputer	8.588.861.500,00	6.456.701.354,00	75,18	8.981.651.626,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.050.000,00	0,00	0,00	326.103.150,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	50.000.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	320.129.000,00	319.348.000,00	99,76	12.900.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	74.530.000,00	72.704.000,00	97,55	5.730.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	4.055.750,00	0,00	20.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.565.530.800,00	1.559.321.000,00	99,60	1.762.214.384,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.000.000,00	18.950.001,00	379,00	43.650.000,00
Jumlah	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.122.075.750,00 atau 96,45% dari anggaran senilai Rp7.384.127.728,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.826.339.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar Darat	6.386.500.000,00	6.375.499.625,00	99,83	2.244.709.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	997.627.728,00	746.576.125,00	74,84	581.630.678,00
Jumlah	7.384.127.728,00	7.122.075.750,00	96,45	2.826.339.678,00

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp6.375.499.625,00 atau 99,83% dari anggaran senilai Rp6.386.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.244.709.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Excavator	4.628.000.000,00	4.627.999.625,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	292.443.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.750.000.000,00	1.739.000.000,00	99,37	1.952.266.000,00
Jumlah	6.386.500.000,00	6.375.499.625,00	99,83	2.244.709.000,00

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp746.576.125,00 atau 74,84% dari anggaran senilai Rp997.627.728,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp581.630.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00
Belanja Modal Pompa	472.127.728,00	257.063.625,00	54,45	94.485.678,00
Belanja Modal Mesin Bor	10.000.000,00	9.941.500,00	99,42	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	400.000.000,00	379.900.000,00	94,98	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	115.500.000,00	99.671.000,00	86,30	483.775.000,00
Jumlah	997.627.728,00	746.576.125,00	74,84	581.630.678,00

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.764.002.862,00 atau 97,74% dari anggaran senilai Rp7.943.833.499,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.452.578.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.916.883.499,00	7.764.002.862,00	98,07	6.452.578.319,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.943.833.499,00	7.764.002.862,00	97,74	6.452.578.319,00

5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.764.002.862,00 atau 98,07% dari anggaran senilai Rp7.916.883.499,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.452.578.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.761.000.000,00	2.702.916.003,00	97,90	1.520.656.452,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	617.980.000,00	583.800.000,00	94,47	477.725.350,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	174.900.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	686.270.000,00	639.806.859,00	93,23	987.392.517,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.248.199.499,00	1.244.580.000,00	99,71	286.005.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.900.000.000,00	1.889.500.000,00	99,45	317.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	703.434.000,00	703.400.000,00	100,00	2.688.899.000,00
Jumlah	7.916.883.499,00	7.764.002.862,00	98,07	6.452.578.319,00

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp267.407.685,00 atau 76,55% dari anggaran senilai Rp349.323.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.189.839.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	174.950.000,00	169.300.000,00	96,77	50.387.425,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	25.773.000,00	7.368.000,00	28,59	42.006.250,00
Belanja Modal Alat Ukur	148.600.000,00	90.739.685,00	61,06	1.097.445.597,00
Jumlah	349.323.000,00	267.407.685,00	76,55	1.189.839.272,00

5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp169.300.000,00 atau 96,77% dari anggaran senilai Rp174.950.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.387.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.200.000,00	600.000,00	50,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	166.750.000,00	165.700.000,00	99,37	46.887.425,00
Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	174.950.000,00	169.300.000,00	96,77	50.387.425,00

5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.368.000,00 atau 28,59% dari anggaran senilai Rp25.773.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.006.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	40.031.250,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	25.623.000,00	7.368.000,00	28,76	0,00
Jumlah	25.773.000,00	7.368.000,00	28,59	42.006.250,00

5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp90.739.685,00 atau 61,06% dari anggaran senilai Rp148.600.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.097.445.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	9.957.500,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.500.000,00	1.969.325,00	56,27	28.270.597,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.059.217.500,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	143.000.000,00	86.670.360,00	60,61	0,00
Jumlah	148.600.000,00	90.739.685,00	61,06	1.097.445.597,00

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp148.527.000,00 atau 49,74% dari anggaran senilai Rp298.577.250,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp215.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	150.000.000,00	0,00	0,00	169.750.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	148.577.250,00	148.527.000,00	99,97	45.795.000,00
Jumlah	298.577.250,00	148.527.000,00	49,74	215.545.000,00

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp11.548.628.257,00 atau 99,96% dari anggaran senilai Rp11.553.758.465,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.516.761.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	2.330.300.093,00	2.974.732.373,00	127,65	4.050.325.537,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.752.184.935,00	7.571.167.718,00	97,66	6.826.696.180,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.471.273.437,00	1.002.728.166,00	68,15	639.740.237,00
Jumlah	11.553.758.465,00	11.548.628.257,00	99,96	11.516.761.954,00

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.974.732.373,00 atau 127,65% dari anggaran senilai Rp2.330.300.093,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.050.325.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	10.000.000,00	0,00	16.400.000,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin	30.000.000,00	26.470.000,00	88,23	0,00
Jumlah				
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	8.950.000,00	0,00	60.990.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	415.597.589,00	360.517.488,00	86,75	470.234.797,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.884.702.504,00	2.568.794.885,00	136,30	3.502.700.740,00
Jumlah	2.330.300.093,00	2.974.732.373,00	127,65	4.050.325.537,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp2.568.794.885,00 atau mengalami pelampauan hingga 136,30% dari anggaran sebesar Rp1.884.702.504,00 dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp7.571.167.718,00 atau 97,66% dari anggaran senilai Rp7.752.184.935,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.826.696.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mebel	4.514.218.471,00	4.893.766.537,00	108,41	4.182.471.344,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	4.395.000,00	0,00	14.077.946,00
Belanja Modal Alat Pembersih	32.200.000,00	86.644.800,00	269,08	138.382.053,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.379.990.023,00	1.129.347.471,00	81,84	1.115.770.715,00
Belanja Modal Alat Dapur	14.781.875,00	16.673.559,00	112,80	80.308.900,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.753.994.566,00	1.390.550.351,00	79,28	1.188.251.222,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	57.000.000,00	49.790.000,00	87,35	107.434.000,00
Jumlah	7.752.184.935,00	7.571.167.718,00	97,66	6.826.696.180,00

Belanja Modal Mebel Alat Pembersih, dan Alat Dapur mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.002.728.166,00 atau 68,15% dari anggaran senilai Rp1.471.273.437,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp639.740.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	388.988.305,00	270.633.150,00	69,57	264.599.180,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	220.227.000,00	200.750.000,00	91,16	120.642.800,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	299.638.000,00	240.317.860,00	80,20	62.302.500,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	166.984.800,00	139.154.800,00	83,33	4.500.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	124.688.000,00	124.673.000,00	99,99	63.024.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	270.747.332,00	27.199.356,00	10,05	124.671.757,00
Jumlah	1.471.273.437,00	1.002.728.166,00	68,15	639.740.237,00

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.027.058.364,00 atau 87,81% dari anggaran senilai Rp1.169.621.980,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.086.796.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	1.027.541.980,00	926.518.364,00	90,17	889.573.067,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	193.663.817,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	119.000.000,00	78.960.000,00	66,35	3.560.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	580.000,00	580.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.169.621.980,00	1.027.058.364,00	87,81	1.086.796.884,00

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp926.518.364,00 atau 90,17% dari anggaran senilai Rp1.027.541.980,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp889.573.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	606.207.500,00	386.164.970,00	63,70	254.595.921,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	339.409.480,00	298.324.653,00	87,90	420.224.997,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,00	36.451.945,00	182,26	27.437.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	144.016.797,00	0,00	87.427.350,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	61.925.000,00	61.559.999,00	99,41	99.887.799,00
Jumlah	1.027.541.980,00	926.518.364,00	90,17	889.573.067,00

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp21.000.000,00 atau 93,33% dari anggaran senilai Rp22.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp193.663.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	173.663.817,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	193.663.817,00

5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar

Belanja Modal Peralatan Pemancar pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp78.960.000,00 atau 66,35% dari anggaran senilai Rp119.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Switcher Antena	110.000.000,00	69.960.000,00	63,60	3.560.000,00
Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	119.000.000,00	78.960.000,00	66,35	3.560.000,00

5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi

Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp580.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp580.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp74.181.479.858,00 atau 95,98% dari anggaran senilai Rp77.288.323.814,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.296.105.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran	72.926.217.814,00	70.048.995.480,00	96,05	8.296.105.504,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.362.106.000,00	4.132.484.378,00	94,74	0,00
Jumlah	77.288.323.814,00	74.181.479.858,00	95,98	8.296.105.504,00

5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp70.048.995.480,00 atau 96,05% dari anggaran senilai Rp72.926.217.814,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.296.105.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.646.212.377,00	3.687.877.106,00	79,37	3.989.544.168,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.950.000,00	0,00	0,00	12.666.600,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	10.982.958.240,00	10.405.704.634,00	94,74	450.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kesehatan				
Kebidanan dan Penyakit	4.000.000.000,00	3.970.500.000,00	99,26	0,00
Kandungan				
Belanja Modal Alat				
Kedokteran THT	2.470.414.754,00	2.417.040.000,00	97,84	1.350.000,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Mata	5.082.661.000,00	5.081.791.930,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Anak	1.000.000.000,00	996.000.000,00	99,60	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Poliklinik	237.670.000,00	67.230.000,00	28,29	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan				
Rehabilitasi Medis	922.506.720,00	921.500.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Jantung	26.948.527.844,00	26.947.877.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Radiodiagnostic	2.455.600.000,00	2.455.600.000,00	100,00	2.600.000.000,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Radioterapi	2.896.773.000,00	2.896.773.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	1.646.500.000,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Gawat Darurat	207.450.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran ICU	1.214.550.000,00	1.144.970.000,00	94,27	0,00
Belanja Modal Alat				
Kedokteran Lainnya	9.855.943.879,00	9.056.131.810,00	91,88	16.994.736,00
Jumlah	72.926.217.814,00	70.048.995.480,00	96,05	8.296.105.504,00

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.132.484.378,00 atau 94,74% dari anggaran senilai Rp4.362.106.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.531.750.330,00 atau 71,68% dari anggaran senilai Rp6.322.266.616,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.482.845.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Unit Alat				
Laboratorium	2.356.879.600,00	482.200.872,00	20,46	255.910.372,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek				
Sekolah	1.646.322.592,00	1.740.549.458,00	105,72	5.226.934.941,00
Belanja Modal Alat Laboratorium				
Fisika Nuklir/Elektronika	2.309.064.424,00	2.299.000.000,00	99,56	0,00
Belanja Modal Peralatan				
Laboratorium Hydrodinamica	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.322.266.616,00	4.531.750.330,00	71,68	5.482.845.313,00

5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp482.200.872,00 atau 20,46% dari anggaran senilai Rp2.356.879.600,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp255.910.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.005.000.000,00	242.778.500,00	12,11	5.424.570,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	242.786.970,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	351.879.600,00	239.422.372,00	68,04	2.498.832,00
Jumlah	2.356.879.600,00	482.200.872,00	20,46	255.910.372,00

5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.740.549.458,00 atau 105,72% dari anggaran senilai Rp1.646.322.592,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.226.934.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	3.200.000,00	0,00	4.356.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	2.395.000,00	0,00	6.858.460,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	0,00	4.118.353,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	1.120.060,00	0,00	7.603.550,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	3.600.000,00	0,00	685.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	0,00	48.177.000,00	0,00	51.152.526,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	263.538,00	249.900,00	94,83	124.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.646.059.054,00	1.677.689.145,00	101,92	5.023.129.405,00
Jumlah	1.646.322.592,00	1.740.549.458,00	105,72	5.226.934.941,00

5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.299.000.000,00 atau 99,56% dari anggaran senilai Rp2.309.064.424,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.08.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Hydrodinamica

Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp10.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp6.456.701.354,00 atau 75,18% dari anggaran senilai Rp8.588.861.500,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.981.651.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	6.945.200.500,00	4.689.168.672,00	67,52	6.352.836.325,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.643.661.000,00	1.767.532.682,00	107,54	2.628.815.301,00
Jumlah	8.588.861.500,00	6.456.701.354,00	75,18	8.981.651.626,00

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.689.168.672,00 atau 67,52% dari anggaran senilai Rp6.945.200.500,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.352.836.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Jaringan	65.000.000,00	343.723.750,00	528,81	355.787.465,00
Belanja Modal Personal Computer	5.537.908.500,00	3.484.304.402,00	62,92	4.521.156.560,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.342.292.000,00	861.140.520,00	64,15	1.475.892.300,00
Jumlah	6.945.200.500,00	4.689.168.672,00	67,52	6.352.836.325,00

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.767.532.682,00 atau 107,54% dari anggaran senilai Rp1.643.661.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.628.815.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.660.000,00	6.000.000,00	90,09	3.730.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	5.475.000,00	10.752.000,00	196,38	20.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	646.230.400,00	375.286.999,00	58,07	792.643.897,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	165.402.100,00	151.836.820,00	91,80	352.739.057,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	819.893.500,00	1.223.656.863,00	149,25	1.459.602.347,00
Jumlah	1.643.661.000,00	1.767.532.682,00	107,54	2.628.815.301,00

Belanja Modal Peralatan Mini Computer dan Peralatan Komputer Lainnya mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Sumur	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	50.000.000,00

5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi pada Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Alat Bantu Produksi yang terealisasi senilai Rp319.348.000,00 atau 99,76% dari anggaran senilai Rp320.129.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.900.000,00.

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp72.704.000,00 atau 97,55% dari anggaran senilai Rp74.530.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pelindung	39.830.000,00	39.004.000,00	97,93	0,00
Belanja Modal Alat SAR	34.700.000,00	33.700.000,00	97,12	5.730.000,00
Jumlah	74.530.000,00	72.704.000,00	97,55	5.730.000,00

5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga

Belanja Modal Alat Peraga pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan terealisasi senilai Rp4.055.750,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp20.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	4.055.750,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah	0,00	4.055.750,00	0,00	20.500.000,00

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat terealisasi senilai Rp1.559.321.000,00 atau 99,60% dari anggaran senilai Rp1.565.530.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.762.214.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Rambu Bersuar	1.493.500.000,00	1.490.100.000,00	99,77	1.430.026.384,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	72.030.800,00	69.221.000,00	96,10	24.092.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	308.096.000,00
Jumlah	1.565.530.800,00	1.559.321.000,00	99,60	1.762.214.384,00

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp18.950.001,00 atau 379,00% dari anggaran senilai Rp5.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	5.120.001,00	0,00	11.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	8.830.000,00	0,00	3.800.000,00
Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.000.000,00	18.950.001,00	379,00	43.650.000,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp68.940.565.477,00 atau 78,02% dari anggaran senilai Rp88.359.316.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp45.384.593.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	84.724.296.456,00	65.543.615.477,00	77,36	43.299.499.358,00
Belanja Modal Monumen	4.000.000,00	3.800.000,00	95,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.631.020.000,00	3.393.150.000,00	93,45	2.085.094.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp65.543.615.477,00 atau 77,36% dari anggaran senilai Rp84.724.296.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.299.499.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.351.820.456,00	64.308.247.829,00	77,15	42.641.153.358,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	658.346.000,00
Jumlah	84.724.296.456,00	65.543.615.477,00	77,36	43.299.499.358,00

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp64.308.247.829,00 atau 77,15% dari anggaran senilai Rp83.351.820.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.641.153.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.341.736.000,00	7.508.824.619,00	80,38	12.542.679.441,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	80.550.000,00	5.498.000,00	6,83	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.587.500.000,00	647.500.000,00	40,79	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	932.581.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.906.239.096,00	5.083.380.864,00	51,31	5.124.486.391,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	409.000.000,00	400.584.000,00	97,94	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	464.000.000,00	462.750.150,00	99,73	278.653.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.582.151.200,00	11.373.122.600,00	90,39	6.905.178.380,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	315.534.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.019.250.000,00	3.704.644.000,00	92,17	3.973.097.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.550.000,00	80.386.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	770.000.000,00	688.069.000,00	89,36	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.500.000.000,00	10.393.414.666,00	98,98	454.341.000,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.703.950.000,00	2.647.035.000,00	97,90	2.309.336.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	208.250.000,00	2.250.000,00	1,08	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.878.879.000,00	5.819.653.150,00	65,54	191.889.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	12.557.396.160,00	7.191.586.950,00	57,27	4.287.040.938,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	1.128.800.000,00	328.054.000,00	29,06	0,00
Belanja Modal Taman	7.712.319.000,00	7.630.174.830,00	98,93	4.806.083.750,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	421.250.000,00	341.320.000,00	81,03	520.253.158,00
Jumlah	83.351.820.456,00	64.308.247.829,00	77,15	42.641.153.358,00

5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.235.367.648,00 atau 90,01% dari anggaran senilai Rp1.372.476.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp658.346.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	598.471.000,00
Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	59.875.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	0,00
Jumlah	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	658.346.000,00

5.2.03.02 Belanja Modal Monumen

Belanja Modal Monumen pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti terealisasi senilai Rp3.800.000,00 atau 95,00% dari anggaran senilai Rp4.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2023 berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas terealisasi senilai Rp3.393.150.000,00 atau 93,45% dari anggaran senilai Rp3.631.020.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.085.094.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.847.500.000,00	1.670.438.000,00	90,42	98.580.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	162.500.000,00	161.599.000,00	99,45	0,00
Belanja Modal Pagar	1.471.020.000,00	1.412.113.000,00	96,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	1.986.514.000,00
Jumlah	3.631.020.000,00	3.393.150.000,00	93,45	2.085.094.000,00

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp71.240.765.500,00 atau 97,38% dari anggaran senilai Rp73.158.004.913,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp65.770.745.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.566.987.800,00	47.069.470.700,00	96,92	50.653.932.995,00
Belanja Modal Bangunan Air	15.005.497.113,00	14.963.683.900,00	99,72	7.234.405.600,00
Belanja Modal Instalasi	318.860.000,00	156.746.000,00	49,16	954.758.217,00
Belanja Modal Jaringan	9.266.660.000,00	9.050.864.900,00	97,67	6.927.648.654,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp47.069.470.700,00 atau 96,92% dari anggaran senilai Rp48.566.987.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.653.932.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan	47.623.014.800,00	46.225.994.250,00	97,07	50.314.000.995,00
Belanja Modal Jembatan	943.973.000,00	843.476.450,00	89,35	339.932.000,00
Jumlah	48.566.987.800,00	47.069.470.700,00	96,92	50.653.932.995,00

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp46.225.994.250,00 atau 97,07% dari anggaran senilai Rp47.623.014.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.314.000.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan Kota	10.571.394.800,00	10.221.116.250,00	96,69	18.829.157.245,00
Belanja Modal Jalan Desa	35.442.470.000,00	35.357.599.000,00	99,76	30.942.776.750,00
Belanja Modal Jalan Khusus	960.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	649.150.000,00	647.279.000,00	99,71	542.067.000,00
Jumlah	47.623.014.800,00	46.225.994.250,00	97,07	50.314.000.995,00

5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Jembatan direalisasikan senilai Rp843.476.450,00 atau 89,35% dari anggaran senilai Rp943.973.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp339.932.000,00.

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp14.963.683.900,00 atau 99,72% dari anggaran senilai Rp15.005.497.113,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.234.405.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.397.095.920,00	1.389.655.000,00	99,47	591.132.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.443.861.193,00	13.416.871.000,00	99,80	6.639.203.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	9.510.900,00	0,00	4.070.600,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	164.540.000,00	147.647.000,00	89,73	0,00
Jumlah	15.005.497.113,00	14.963.683.900,00	99,72	7.234.405.600,00

5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun 2023 berupa Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi direalisasikan senilai Rp1.389.655.000,00 atau 99,47% dari anggaran senilai Rp1.397.095.920,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp591.132.000,00

5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp13.416.871.000,00 atau 99,80% dari anggaran senilai Rp13.443.861.193,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.639.203.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	2.869.063.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	8.020.885.980,00	8.004.207.000,00	99,79	3.770.140.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.422.975.213,00	5.412.664.000,00	99,81	0,00
Jumlah	13.443.861.193,00	13.416.871.000,00	99,80	6.639.203.000,00

5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku direalisasikan senilai Rp9.510.900,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.070.600,00.

5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp147.647.000,00 atau 89,73% dari anggaran senilai Rp164.540.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	15.540.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	149.000.000,00	147.647.000,00	99,09	0,00
Jumlah	164.540.000,00	147.647.000,00	89,73	0,00

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp156.746.000,00 atau 49,16% dari anggaran senilai Rp318.860.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp954.758.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	57.500.000,00	46.746.000,00	81,30	45.967.217,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	111.360.000,00	110.000.000,00	98,78	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	237.626.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	671.165.000,00
Jumlah	318.860.000,00	156.746.000,00	49,16	954.758.217,00

5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan Tahun 2023 berupa Belanja Modal Jaringan Listrik direalisasikan senilai Rp9.050.864.900,00 atau 97,67% dari anggaran senilai Rp9.266.660.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.927.648.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan Transmisi	9.004.660.000,00	8.974.248.000,00	99,66	6.716.857.000,00
Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	158.544.154,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	262.000.000,00	76.616.900,00	29,24	52.247.500,00
Jumlah	9.266.660.000,00	9.050.864.900,00	97,67	6.927.648.654,00

5.2.05 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp6.271.723.948,00 atau 254,95% dari anggaran senilai Rp2.459.985.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.206.146.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	951.150.000,00	4.733.805.971,00	497,69	2.874.790.953,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.160.000,00	105.663.477,00	403,91	95.643.676,00
Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Biota Perairan	3.175.000,00	3.175.000,00	100,00	43.900.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.252.500.000,00	1.239.073.000,00	98,93	149.812.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	227.000.000,00	190.006.500,00	83,70	42.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95	3.206.146.629,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami pelampauan hingga 254,95% dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp4.733.805.971,00 atau 497,69% dari anggaran senilai Rp951.150.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.874.790.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	858.000.000,00	4.525.765.571,00	527,48	2.730.924.139,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	93.150.000,00	208.040.400,00	223,34	136.698.749,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	7.168.065,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	951.150.000,00	4.733.805.971,00	497,69	2.874.790.953,00

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun 2023 berupa Belanja Modal Buku Umum direalisasikan senilai Rp4.525.765.571,00 atau 527,48% dari anggaran senilai Rp858.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.730.924.139,00.

5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp208.040.400,00 atau 223,34% dari anggaran senilai Rp93.150.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp136.698.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Audio Visual	93.150.000,00	205.190.400,00	220,28	120.423.749,00
Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	0,00	2.850.000,00	0,00	16.275.000,00
Jumlah	93.150.000,00	208.040.400,00	223,34	136.698.749,00

5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp105.663.477,00 atau 403,91% dari anggaran senilai Rp26.160.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp95.643.676,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.800.000,00	85.132.600,00	538,81	63.597.676,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	10.360.000,00	20.530.877,00	198,17	32.046.000,00
Jumlah	26.160.000,00	105.663.477,00	403,91	95.643.676,00

5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp85.132.600,00 atau 538,81% dari anggaran senilai Rp15.800.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp63.597.676,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Musik	15.800.000,00	77.135.000,00	488,20	63.597.676,00
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	7.997.600,00	0,00	0,00
Jumlah	15.800.000,00	85.132.600,00	538,81	63.597.676,00

5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan

Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp20.530.877,00 atau 198,17% dari anggaran senilai Rp10.360.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp32.046.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	1.500.000,00	5.700.000,00	380,00	32.046.000,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	8.860.000,00	14.830.877,00	167,39	0,00
Jumlah	10.360.000,00	20.530.877,00	198,17	32.046.000,00

5.2.05.04 Belanja Modal Biota Perairan

Belanja Modal Biota Perairan Tahun 2023 berupa Belanja Modal Ikan Budidaya direalisasikan senilai Rp3.175.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp3.175.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.900.000,00.

5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi Tahun 2023 berupa direalisasikan senilai Rp1.239.073.000,00 atau 98,93% dari anggaran senilai Rp1.252.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp149.812.000,00.

5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp190.006.500,00 atau 83,70% dari anggaran senilai Rp227.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Software	177.000.000,00	140.006.500,00	79,10	42.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	227.000.000,00	190.006.500,00	83,70	42.000.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software direalisasikan senilai Rp48.840.000,00 atau 97,68% dari anggaran senilai Rp50.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Goodwill</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan <i>Franchise</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00

5.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2023 senilai Rp34.297.616,00 dari anggaran senilai Rp4.854.874.000,00 atau 0,71% dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Tahun 2013, 2017-2022 a.n. I Nyoman Gde Sumantri Rp 808.510,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB Tahun 2022 a.n. Lalu Jaga Adubangga Rp 17.000.000,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Tahun 2020, 2021, 2022 a.n. Maurad Sofyan Arifin Rp 11.649.106,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tanah Pengganti kepada Pemerintah Kota Mataram pada Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Terusan Jalan Bung Hatta di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Tahun 2022 a.n. Adi Mujono Rp 4.840.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya yaitu rendahnya realisasi belanja tak terduga TA 2023 dibandingkan TA 2022 karena tidak adanya realisasi BTT dana Covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Belanja Tak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya berupa pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran tanah pengganti kepada Pemerintah Kota Mataram

5.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah–LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan Realisasi Transfer Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.441.350.000,00 atau 100% dari nilai anggaran sebesar Rp2.441.350.000,00. Nilai tersebut merupakan dukungan dana Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Pengelolaan dan Pengembangan TPA Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Pertama dan Kedua Tahun 2023 sebesar Rp1.402.000.040,00 serta Triwulan Ketiga dan Keempat sebesar Rp1.039.349.960,00.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
Jumlah	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan–LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.412.147.625,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
• Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Disebabkan oleh volume sampah di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan di tahun 2022 dan;
- Penganggarannya dilihat dari perkiraan volume sampah yang tiap tahun meningkat

6 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung Dalam Tahun 2023, Pembiayaan Netto terealisasi senilai Rp101.343.866.757,31 dari yang ditargetkan senilai Rp101.350.936.763,00 atau 99,69%. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	103.600.936.763,00	103.593.866.757,31	99,99	74.732.512.361,46
Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	7.250.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	101.350.936.763,00	101.343.866.757,31	99,99	67.482.512.361,46

Terdapat Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada KPKNL Mataram senilai Rp9.360.755,00. Penyertaan Modal pada BUMD senilai Rp2.250.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pada PDAM Giri Menang.

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	103.600.936.763,00	103.584.506.002,31	99,98	69.732.060.316,46
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	9.360.755,00	0,00	452.045,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	103.600.936.763,00	103.593.866.757,31	99,99	74.732.512.361,46

6.1. 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022		Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	7.333.680.919,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	90.909.504.363,00	90.893.073.602,84	99,98	54.169.440.683,37
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	12.691.432.399,00	12.691.432.399,47	100,00	8.228.938.714,09
Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	103.600.936.763,00	103.584.506.002,31	99,98	69.732.060.316,46

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	9.360.755,00	0,00	452.045,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	9.360.755,00	0,00	452.045,00

Penjelasan:

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan Terdapat realisasi Penerimaan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp9.360.755,00.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	7.250.000.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Sementara Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal senilai Rp2.250.000.000,00 terealisasi senilai Rp2.250.000.000,00 atau 100,00%

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN):				
• Nama BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
• Nama BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
• Nama BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• PDAM GIRI MENANG	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00
• Nama BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
• Nama BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kota Mataram pada TA 2023 telah melakukan penyertaan modal pada:

1. PT. Air Minum Giri Menang sebesar Rp.2.250.000.000,00 atau sebanyak 2.250.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp1.000.Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp. 115.351.363.153,00.
2. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kota Mataram di tahun 2023 tidak ada pinjaman sementara tahun 2022 merupakan pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram.yang langsung lunas pada tahun 2022.

6.2.04 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27	1.500.283.093.258,05
Pendapatan Asli Daerah	447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05
Pendapatan Transfer	1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah	1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70	1.464.164.668.856,05

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Daerah	1.762.748.905.854,00	1.651.458.717.407,07	93,69	1.462.652.521.231,05
Belanja Operasi	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05
Belanja Modal	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
Transfer Daerah	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
Surplus /Defisit	101.350.936.763,00	101.039.613.677,69	99,69	67.482.512.361,46
Pembiayaan Netto	101.350.936.763,00	101.343.866.757,31	99,99	67.482.512.361,46
Penerimaan Pembiayaan	103.600.936.763,00	103.593.866.757,31	99,99	74.732.512.361,46
Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	7.250.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	115.726.688.664,34	0,00	103.600.936.763,46

Penjelasan:

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Mataram pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp115.726.688.664,34 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	95.763.026.555,68
Kas di Bendahara Penerimaan	22.224.976,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	242.476,00
Kas di BLUD	17.190.437.990,71
Kas Dana BOS	226.206.310,28
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.524.550.355,67
Setara Kas /Kas Lainnya	0,00
Jumlah	115.726.688.664,34

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kota Mataram (dalam satuan mata uang Rupiah) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel. 5.160 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	92.402.688.657,34	13.079.928.652,87
Kas di Bendahara Penerimaan	12.552.907,00	0,00

)Kas di Bendahara Pengeluaran	71.069.850,00	0,00
Kas di BLUD	9.267.732.649,93	4.851.653.650,73
Kas Dana BOS	597.730.039,02	549.614.090,69
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.825.969.710,67	2.891.403.372,67
Kas Setara Kas	0,00	50.000.000.000,00
Utang PFK	(1.576.807.050,50)	(1.576.807.050,50)
Jumlah	103.600.936.763,46	69.795.792.716,46

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kota Mataram Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yakni senilai Rp103.600.936.763,46.

6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel. 5.161 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	103.584.506.002,31	69.732.060.316,46

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Mataram pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Mataram selama TA 2023 dan 2022. Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp103.584.506.002,31.

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel. 5.162 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	115.726.688.664,34	103.600.936.763,46

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Mataram pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan di bawah ini.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 115.726.688.664,34 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian SiLPA Tahun 2023

Surplus / Defisit Anggaran	14.382.821.907,03
Pembiayaan Netto	101.343.866.757,31
SiLPA Tahun Berjalan	115.726.688.664,34

6.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.264 Rincian SiLPA Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Dana Bos dikarenakan terdapat pencatatan bunga bank rekening Dana BOS tahun sebelumnya yang seharusnya menjadi Pendapatan Daerah	16.430.761,00	63.732.400,00
Koreksi Kas BLUD dikarenakan kebijakan Bank yang tidak mengakomodir transaksi dengan angka dibelakang koma.	0,15	0,00
Jumlah	16.430.761,15	63.732.400,00

6.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kota Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

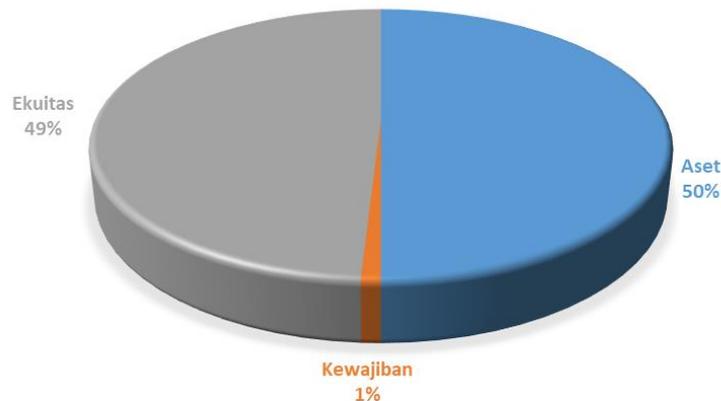
Tabel 5.365 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	95.910.385.836,68	92.402.688.657,34
Kas di Bendahara Penerimaan	22.224.976,00	12.552.907,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	242.476,00	71.069.850,00
Kas di BLUD	17.190.437.990,71	9.267.732.649,93
Kas Dana BOS	254.257.847,28	597.730.039,02
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.524.550.355,67	2.825.969.710,67
Utang PFK	(175.410.818,00)	(1.576.807.050,50)
Jumlah	115.726.688.664,34	103.600.936.763,46

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) .

PENJELASAN ATAS AKUN NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.



Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Mataram untuk per tanggal 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut.

1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp3.874.422.349.610,80 dan Rp3.731.144.395.083,69, naik sebesar 3,84% atau senilai Rp143.277.954.527,11 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69	3,84	143.277.954.527,11
Aset Lancar	278.778.802.782,53	229.195.110.852,93	21,63	49.583.691.929,60
Investasi Jangka Panjang	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32	2,97	5.339.291.291,78
Aset Tetap	3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08	3,42	102.042.710.716,36
Properti Investasi	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00	0,41	55.800.500,00
Aset Lainnya	310.774.104.216,72	324.517.644.127,36	(4,24)	(13.743.539.910,64)

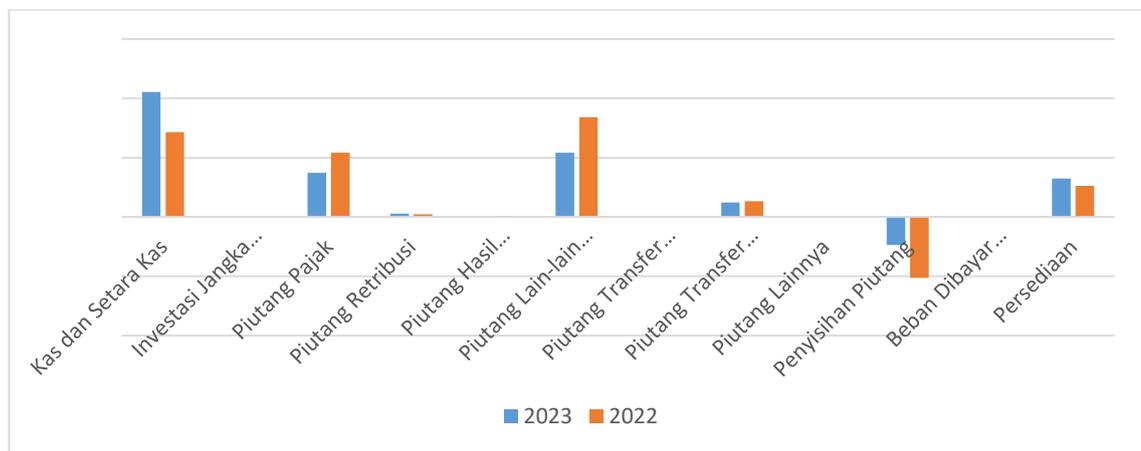
1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp278.778.802.782,53 dan Rp229.195.110.852,93, naik sebesar 21,63% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	278.778.802.782,53	229.195.110.852,93	21,63	49.583.691.929,60
Kas dan Setara Kas	115.902.099.482,34	105.177.743.813,96	10,20	10.724.355.668,38
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	42.205.053.714,31	37.260.451.862,44	13,27	4.944.601.851,87
Piutang Retribusi	2.324.564.517,00	2.546.607.641,00	(8,72)	(222.043.124,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.631.928.516,00	0,00	100,00	5.631.928.516,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.443.700.340,70	44.448.588.003,25	(54,01)	(24.004.887.662,55)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.912.124.505,00	12.353.894.469,00	12,61	1.558.230.036,00
Piutang Transfer Antar Daerah	13.482.886.163,00	12.061.853.615,00	11,78	1.421.032.548,00
Piutang Lainnya	54.547.029.889,00	0,00	100,00	54.547.029.889,00
Penyisihan Piutang	(17.281.708.403,01)	(21.143.415.156,48)	(18,26)	3.861.706.753,47
Beban Dibayar Dimuka	1.224.092.000,00	3.775.622.000,00	(67,58)	(2.551.530.000,00)
Persediaan	26.387.032.058,19	32.713.764.604,76	(19,34)	(6.326.732.546,57)

Komposisi Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022 tersebut seperti pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.1 Komposisi Aset Lancar 2023 dan 2022

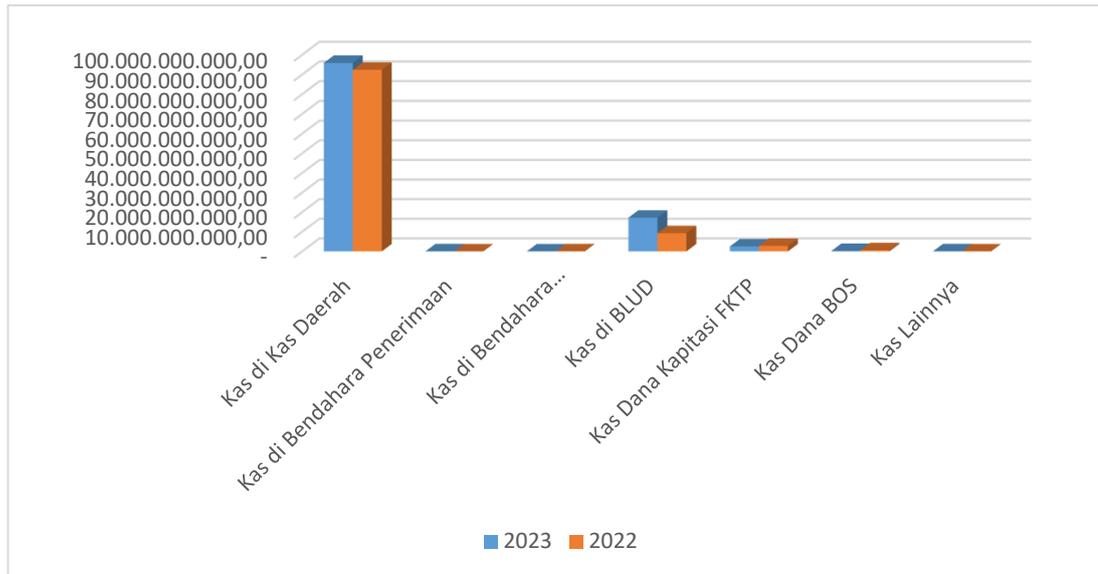
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

1.1.01 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp115.902.099.482,34 dan Rp105.177.743.813,96, naik senilai Rp10.724.355.668,38 atau 10,20% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kas	115.902.099.482,34	105.177.743.813,96	10,20	10.724.355.668,38
Kas di Kas Daerah	95.910.385.836,68	92.402.688.657,34	3,80	3.507.697.179,34
Kas di Bendahara Penerimaan	22.224.976,00	12.552.907,00	77,05	9.672.069,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	242.476,00	71.069.850,00	(99,66)	(70.827.374,00)
Kas di BLUD	17.190.437.990,71	9.267.732.649,93	85,49	7.922.705.340,78
Kas Dana Kapitasi FKTP	2.524.550.355,67	2.825.969.710,67	(10,67)	(301.419.355,00)
Kas Dana BOS	226.206.310,28	597.730.039,02	(62,16)	(371.523.728,74)
Kas Lainnya	28.051.537,00	0,00	0,00	28.051.537,00

Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.2 Komposisi Kas dan Setara Kas 2023 dan 2022

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 Hasil Rekonsiliasi antara Saldo Buku Besar Kas Daerah menurut Catatan Akuntansi dengan Saldo Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram Nomor 001.21.05063.00-4 pada PT Bank NTB Syariah Cabang Utama senilai Rp95.910.385.836,68. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, terdapat selisih pencatatan senilai Rp25.164.144,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram Nomor 001.21.05063.00-4 pada PT Bank NTB Syariah Cabang Utama	95.885.221.692,68	92.345.192.407,34
Buku Besar Kas Daerah menurut Catatan Akuntansi	95.910.385.836,68	92.402.688.657,34
Terdapat selisih, sebagai berikut.	25.164.144,00	57.496.250,00
Retur kliring SP2D nomor 23.07/04.0/000794/LS/4.01.0.00.0.00.33.0000/P.05/12/2023. Dana berada di rekening penampungan Bank NTB	25.000.000,00	0,00
Bank NTB salah melakukan pemindahbukuan dari RKUD	144.144,00	0,00
Bank NTB lebih transfer SP2D LS Nomor: 23.07/04.0/000029/LS/2.15.0.00.0.00.23.0000/P.02/4/2022	20.000,00	20.000,00
Bank NTB salah memindahbukuan SP2D Pemprov NTB Nomor: 23.00/04.0/001727/LS/2.11.3.28.0.00.02.0000/P.13/12/2022	0,00	57.476.250,00
Selisih Hasil Rekonsiliasi	25.164.144,00	57.496.250,00

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp22.224.976,00 dan Rp12.552.907,00. Saldo Kas di Bendahara penerimaan senilai Rp11.566.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perdagangan dan Penerimaan Lain-lain pada DPMPSTP. Penerimaan Dinas Perdagangan senilai Rp11.566.000,00 telah dipindahbukuan dari rekening bendahara penerima ke rekening kas daerah pada akhir tahun 2023. Namun dikarenakan proses tutup tahun oleh bank, dana tersebut baru diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 1 Januari

2024. Kas pada Rekening Bank DPMPTSP senilai Rp10.658.976,00 merupakan Penerimaan Lain-lain pada DPMPTSP tidak dapat dikonfirmasi pengirimnya.

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp242.476,00 dan Rp71.069.850,00. Saldo senilai Rp242.476,00 merupakan sisa dana TU kelurahan Karang Taliwang yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram pada tanggal 5 Januari 2024.

1.1.01.04 Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp17.190.437.990,71 dan Rp9.267.732.649,93 Saldo Rekening Bank Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Nama Bank	No. Rekening Bank	2023	2022
1	PT BANK NTB Syariah	001.21.06669.00.9	1.175.574.189,00	146.702.772,00
2	MANDIRI 1	161.000.310.37.15	426.967.177,60	269.244.639,59
3	MANDIRI 2	161.003.211.11.19	618.018.161,50	205.325.465,48
4	BSI	456.667.7771	10.243.701.672,12	0,00
5	BNI	96.658.4758	3.074.983.404,00	7.897.261.859,15
6	Bank CIMB NIAGA	86.000.770.0500	676.530.099,49	290.129.423,71
7	BRI	52-01-001014-30-2	974.663.287,00	459.068.490,00
JUMLAH KAS DI BLUD			17.190.437.990,71	9.267.732.649,93

Secara rinci, Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

1.1.01.05 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana Bos per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp226.206.310,28 dan Rp597.730.039,02 merupakan sisa Dana BOS Satdikdas Negeri di masing-masing sekolah negeri yang diterima langsung oleh masing-masing sekolah sesuai Juklak dan Juknis BOS dianggarkan pada APBD Tahun 2023. Tata cara pelaporannya Kepala Dinas Pendidikan mengirim SP2B (Surat Permohonan Pengesahan Belanja) kepada Kepala BKD selaku SKPKD dan BKD mengesahkan dengan mengeluarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) berdasarkan SP2B dari Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Awal Kas Dana BOS	597.730.039,02
2	Pemindahbukuan Bunga Bank ke Kas Daerah	(320.683.840,62)
3	Pendapatan Transfer BOS (4+5+6)	51.945.261.251,00
4	BOS Reguler Tahap I	24.911.091.251,00
5	BOS Reguler Tahap II	25.096.670.000,00
6	BOS Kinerja	1.937.500.000,00
7	Pendapatan Lain-lain BOS (8+9)	181.524.078,81

NO.	URAIAN	JUMLAH
8	Pengembalian Non TGR	19.727.600,81
9	Pengembalian TGR (ke Kas BOS)	161.796.478,00
10	Total Pendapatan BOS (3+7)	52.126.785.329,81
11	Total Belanja BOS Reguler (12+13)	50.250.399.133,93
12	Belanja Barang/Jasa BOS	41.402.801.797,93
13	Belanja Modal BOS	8.847.597.336,00
14	Total Belanja BOS Kinerja (15+16)	1.927.226.084,00
15	Belanja Barang/Jasa BOS	1.202.197.584,00
16	Belanja Modal BOS	725.028.500,00
17	Total Belanja BOS (11+14)	52.177.625.217,93
18	Surplus/Defisit BOS (10-17)	(50.839.888,12)
19	Saldo Akhir Kas Dana BOS (1 - 2 + 18)	226.206.310,28

secara rinci, Kas Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

1.1.01.06 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.524.550.355,67 dan Rp2.825.969.710,67 merupakan sisa dana kapitasi JKN di masing-masing puskesmas. Kas di Bendahara FKTP seluruhnya tersimpan pada Bank yaitu PT Bank NTB Syariah dengan rincian sesuai rekening koran sebagai berikut.

No	Puskesmas	No Rekening	2023	2022
1	PKM Ampenan	001 21.06.945000	162.229.784,47	164.646.646,47
2	PKM Tanjung Karang	001 21.06.946005	40.611.444,00	311.552.683,00
3	PKM Karang Pule	001 21.06.947009	319.024.166,20	578.770.231,20
4	PKM Mataram	001 21.07.243008	363.472.318,00	511.288.417,00
5	PKM Pagesangan	001 21.06.941005	190.737.706,00	173.357.083,00
6	PKM Cakranegara	001 21.07.244002	352.644.573,00	294.971.759,00
7	PKM Karang Taliwang	001 21.06.944007	136.771.077,00	254.799.480,00
8	PKM Selaparang	001 21.06.949007	328.551.206,00	152.793.298,00
9	PKM Dasan Agung	001 21.06.942009	140.802.583,00	58.405.367,00
10	PKM Pejeruk	001 21.06.948003	165.203.945,00	46.664.869,00
11	PKM Babakan	001 21.06.940000	324.501.553,00	278.719.877,00
JUMLAH			2.524.550.355,67	2.825.969.710,67

Pedoman pelaksanaan dana JKN diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pengelolaan dana JKN dalam APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Atas dasar SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mencatat realisasi pendapatan dan belanja Dana JKN masing-masing puskesmas per bulan. Selain itu, dalam Pasal 25 disebutkan bahwa dalam hal apabila terdapat saldo sisa penggunaan dana kapitasi

JKN, maka FKTP menerima Dana Kapitasi JKN bulan berkenan dikurangi dengan SiLPA atau saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN. Secara rinci, Kas Dana Kapitasi di FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

1.1.01.07 *Kas Lainnya*

Kas Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp28.051.537,00 dan Rp0,00 merupakan Utang Pajak yang bersumber dari belanja BOS dengan rincian sebagai berikut.

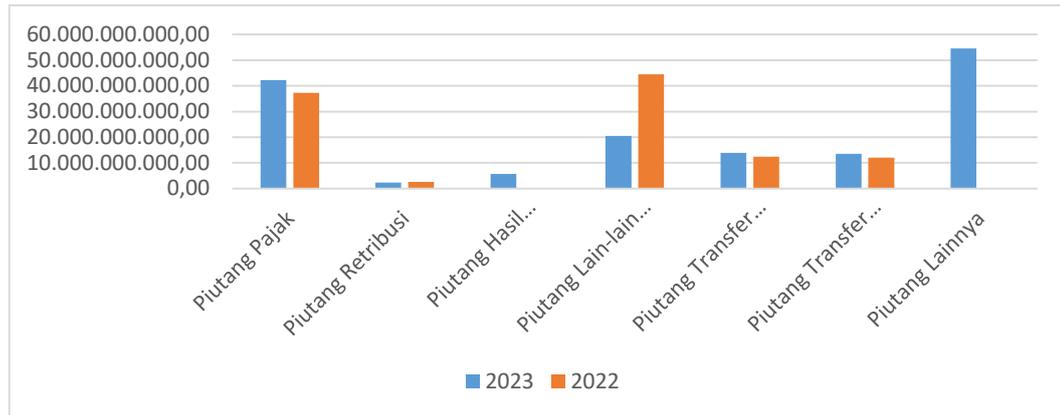
1. Utang PPh 21	Rp5.222.445,00
2. Utang PPh 23	Rp6.585.445,00
3. Utang PPN Pusat	Rp16.243.647,00
Jumlah	Rp28.051.537,00

1.1.00 *Piutang*

Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp153.007.544.781,56 dan Rp108.671.395.590,69 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang	152.547.131.781,56	108.671.395.590,69	40,80	43.875.736.190,87
Piutang Pajak	42.205.053.714,31	37.260.451.862,44	13,27	4.944.601.851,87
Piutang Retribusi	2.324.564.517,00	2.546.607.641,00	(8,72)	(222.043.124,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.631.928.516,00	0,00	100,00	5.631.928.516,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.443.544.477,25	44.448.588.003,25	(54,01)	(24.005.043.526,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.912.124.505,00	12.353.894.469,00	12,61	1.558.230.036,00
Piutang Transfer Antar Daerah	13.482.886.163,00	12.061.853.615,00	11,78	1.421.032.548,00
Piutang Lainnya	54.547.029.889,00	0,00	100,00	54.547.029.889,00

Ditinjau dari komposisi saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022, Piutang Lainnya bertambah paling signifikan. Komposisi Piutang ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 5.3 Komposisi Piutang 2023 dan 2022

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Terhadap penjelasan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

1.1.03 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp42.205.053.714,31 dan Rp37.260.451.862,44 yang disajikan di Neraca sudah disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) artinya sudah dikurangi dengan penghapusan Piutang kadaluarsa dan penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak	42.205.053.714,31	37.260.451.862,44	13,27	4.944.601.851,87
Piutang Pajak Hotel	3.087.159.868,09	3.316.652.173,09	(6,92)	(229.492.305,00)
Piutang Pajak Restoran	3.039.783.902,76	3.503.533.316,00	(13,24)	(463.749.413,24)
Piutang Pajak Hiburan	197.201.375,00	0,00	0,00	197.201.375,00
Piutang Pajak Reklame	265.739.654,00	780.385.437,00	(65,95)	(514.645.783,00)
Piutang Pajak Parkir	491.772.486,00	492.314.086,00	(0,11)	(541.600,00)
Piutang Pajak Air Tanah	956.551.248,46	973.516.221,35	(1,74)	(16.964.972,89)
Piutang Pajak PBB-P2	34.166.845.180,00	28.194.050.629,00	21,18	5.972.794.551,00

1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp3.087.159.868,09 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp500.926.973,59, maka piutang NRV menjadi senilai Rp2.586.232.894,50. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Hotel
Saldo Audited 31 Desember 2022	3.316.652.173,09
Penambahan ketetapan 2023	2.664.089.117,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(2.649.400.778,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(244.180.644,00)
Saldo 31 Desember 2023	3.087.159.868,09
Penyisihan piutang	(500.926.973,59)
Saldo NRV 31 Desember 2023	2.586.232.894,50

1.1.03.07 *Piutang Pajak Restoran*

Piutang Pajak Restaurant disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp3.039.783.902,76 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp1.012.074.831,32, maka piutang NRV menjadi senilai Rp2.027.709.071,44. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Restoran
Saldo Audited 31 Desember 2022	3.503.533.316,00
Koreksi pembayaran piutang 2022 yang belum tercatat	(40.000.000,00)
Koreksi salah catat pembayaran masa 2022 yang tercatat sebagai pengurangan piutang 2022	64.242.616,00
Saldo Setelah Koreksi	3.527.775.932,00
Penambahan ketetapan 2023	574.293.258,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(730.042.788,24)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(208.939.547,00)
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa	(123.302.952,00)
Saldo 31 Desember 2023	3.039.783.902,76
Penyisihan piutang	(1.012.074.831,32)
Saldo NRV 31 Desember 2023	2.027.709.071,44

1.1.03.08 *Piutang Pajak Hiburan*

Piutang Pajak Hiburan senilai Rp197.201.375,00 merupakan ketetapan tahun 2023 yang belum terbayarkan sampai dengan 31 desember 2023. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Hiburan
Saldo Audited 31 Desember 2022	0,00
Penambahan ketetapan 2023	224.220.365,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(27.018.990,00)
Saldo 31 Desember 2023	197.201.375,00
Penyisihan piutang	0,00
Saldo NRV 31 Desember 2023	197.201.375,00

1.1.03.09 *Piutang Pajak Reklame*

Piutang Pajak Reklame disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp265.739.654,00 setelah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp81.934.364,35, maka piutang NRV menjadi senilai Rp183.805.289,65. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Reklame
Saldo Audited 31 Desember 2022	780.385.437,00
Penambahan ketetapan 2023	1.878.596.010,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(454.641.217,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(1.845.560.320,00)
Penghapusan dan pembetulan SKPD	(82.892.418,00)
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa	(10.147.838,00)
Saldo 31 Desember 2023	265.739.654,00
Penyisihan piutang	(81.934.364,35)
Saldo NRV 31 Desember 2023	183.805.289,65

1.1.03.11 *Piutang Pajak Parkir*

Piutang Pajak Parkir disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp491.772.486,00 setelah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp462.074.233,50, maka piutang NRV menjadi senilai Rp29.698.252,50. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Parkir
Saldo Audited 31 Desember 2022	492.314.086,00
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa	(541.600,00)
Saldo 31 Desember 2023	491.772.486,00
Penyisihan piutang	(462.074.233,50)
Saldo NRV 31 Desember 2023	29.698.252,50

1.1.03.12 Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Bawah Tanah disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp956.551.248,46 dilakukan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp352.421.106,61, sehingga piutang NRV menjadi senilai Rp604.227.341,85. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Pajak Air Tanah
Saldo Audited 31 Desember 2022	973.516.221,35
Penambahan ketetapan 2023	2.401.779.286,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(236.544.056,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(2.158.099.970,00)
Koreksi Lebih Bayar	7.230.674,80
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa	(31.330.907,69)
Saldo 31 Desember 2023	956.551.248,46
Penyisihan piutang	(352.421.106,61)
Saldo NRV 31 Desember 2023	604.130.141,85

1.1.03.15 Piutang PBB-P2

Piutang Pajak PBB-P2 disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp34.166.845.180,00 setelah dilakukan penyisihan piutang senilai Rp9.837.908.427,45, maka piutang NRV menjadi senilai Rp24.328.936.752,55. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang PBB
Saldo Audited 31 Desember 2022	28.194.050.629,00
Penambahan ketetapan 2023	34.403.620.705,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(3.721.103.324,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	(23.368.533.551,00)
Program pengurangan	(209.017.767,00)
Penghapusan Piutang Kedaluwarsa	(1.132.171.512,00)
Saldo 31 Desember 2023	34.166.845.180,00
Penyisihan piutang	(9.837.908.427,45)
Saldo NRV 31 Desember 2023	24.328.936.752,55

1.1.04 *Piutang Retribusi*

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.324.564.517,00 dan Rp2.546.607.641,00. Piutang Retribusi Tahun 2022 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada NRV dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Retribusi	2.324.564.517,00	2.546.607.641,00	(8,72)	(222.043.124,00)
Piutang Retribusi Jasa Umum	425.693.060,00	500.613.922,00	(14,97)	(74.920.862,00)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.729.345.100,00	1.938.094.100,00	(10,77)	(208.749.000,00)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	169.526.357,00	107.899.619,00	57,11	61.626.738,00

1.1.04.01 *Piutang Retribusi Jasa Umum*

Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp425.693.060,00 dan Rp500.613.922,00, turun senilai Rp74.920.862,00 atau 14,97% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Retribusi Jasa Umum	425.693.060,00	500.613.922,00	(14,97)	(74.920.862,00)
Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	361.375.000,00	367.930.000,00	(1,78)	(6.555.000,00)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	64.318.060,00	60.489.922,00	6,33	3.828.138,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	72.194.000,00	(100,00)	(72.194.000,00)

1.1.04.01.02 *Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan*

Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp361.375.000,00 dan Rp367.930.000,00 turun senilai Rp6.555.000,00 atau 1,78%. Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan retribusi kebersihan bulan Desember yang dipungut oleh PDAM Kota Mataram dan sudah disetorkan seluruhnya ke Kas umum Daerah pada tanggal 8 Januari 2023.

1.1.04.01.04 *Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum*

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp64.318.060,00 dan Rp60.489.922,00, turun senilai Rp3.828.138,00 atau 6,33%. Piutang tersebut merupakan retribusi yang masih berada di rekening *virtual account* Bank NTB periode 29 Desember sampai dengan 31 Desember 2023.

1.1.04.01.13 *Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Piutang Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Mataram yang ditetapkan melalui SKRD, pada 31 Desember 2023 bersaldo Rp0,00 setelah dilakukan penghapusan piutang kedaluwarsa dengan penjelasan sebagai berikut.

Uraian	Piutang Retribusi Menara
Saldo Audited 31 Desember 2022	72.194.000,00
Penambahan ketetapan 2023	1.100.750.000,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(55.250.000,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan	(1.100.750.000,00)
Penghapusan Piutang	(16.944.000,00)
Saldo 31 Desember 2023	0,00
Penyisihan piutang	0,00
Saldo NRV 31 Desember 2023	0,00

1.1.04.02 *Piutang Retribusi Jasa Usaha*

Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan masing-masing senilai Rp1.729.345.100,00 dan Rp1.938.094.100,00, turun senilai Rp208.749.000,00 atau 10,77%. Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan melalui SKRD, serta pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan Kontrak Gedung MCC yang belum dilunasi senilai Rp14.647.500,00.

Piutang Pasar Grosir yang dikelola oleh Dinas Perdagangan sudah menggunakan NRV di Neraca yaitu dari Piutang senilai Rp1.714.697.600,00 disisihkan senilai Rp267.511.900,00 sesuai umur Piutang sehingga nilai NRV menjadi Rp1.447.185.700,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi PGP
Saldo Audited 31 Desember 2022	1.926.635.600,00
Penambahan ketetapan 2023	1.105.141.200,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(350.862.000,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan	(720.564.200,00)
Penghapusan Piutang	(245.653.000,00)
Saldo 31 Desember 2023	1.714.697.600,00
Penyisihan piutang	(267.511.900,00)
Saldo NRV 31 Desember 2023	1.447.185.700,00

1.1.04.03 *Piutang Retribusi Perizinan Tertentu*

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp169.526.357,00 dan Rp107.899.619,00, turun senilai Rp61.626.738,00 atau 57,11% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	169.526.357,00	107.899.619,00	57,11	61.626.738,00
Piutang Retribusi IMB	1.208.167,00	74.261.806,00	(98,37)	(73.053.639,00)
Piutang Retribusi PIMB	0,00	1.037.813,00	(100,00)	(1.037.813,00)
Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	0,00	30.950.000,00	(100,00)	(30.950.000,00)
Piutang Retribusi Izin Trayek	0,00	1.650.000,00	(100,00)	(1.650.000,00)
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	168.318.190,00	0,00	100,00	168.318.190,00

1.1.04.03.01 *Piutang Retribusi IMB*

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbagi menjadi dua, yaitu IMB dan PIMB. Piutang sudah disajikan secara NRV yaitu dari Piutang senilai Rp1.208.167,00 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp120.816,70 sehingga Piutang NRV menjadi senilai Rp1.087.350,30,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi IMB
Saldo Audited 31 Desember 2022	74.261.806,00
Koreksi Tambah atas Piutang Tahun Lalu karena Salah Catat	45.482.988,00
Saldo Setelah Koreksi	119.744.794,00
Penambahan ketetapan 2023	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(53.719.624,00)
Penghapusan Piutang	(64.817.003,00)
Saldo 31 Desember 2023	1.208.167,00
Penyisihan piutang	(120.816,70)
Saldo NRV 31 Desember 2023	1.087.350,30

Piutang Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp0,00 setelah dilakukan penghapusan piutang kedaluwarsa. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi PIMB
Saldo Audited 31 Desember 2022	1.037.813,00
Koreksi Tambah atas Piutang Tahun Lalu karena Salah Catat	6.616.343,00
Saldo Seharusnya	7.654.156,00
Penambahan ketetapan 2023	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	0,00
Penghapusan Piutang	(7.654.156,00)
Saldo 31 Desember 2023	0,00
Penyisihan piutang	0,00
Saldo NRV 31 Desember 2023	0,00

1.1.04.03.02 *Piutang Izin Gangguan (HO)*

Piutang Izin Gangguan (HO) pada Tahun 2023 senilai Rp0,00 setelah dilakukan penghapusan piutang kedaluwarsa. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi HO
Saldo 31 Desember 2022	30.950.000,00
Penambahan ketetapan 2023	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	0,00
Penghapusan Piutang	(30.950.000,00)
Saldo 31 Desember 2023	0,00
Penyisihan piutang	(0,00)
Saldo NRV 31 Desember 2023	0,00

1.1.04.03.05 *Piutang Retribusi Izin Trayek*

Piutang Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram pada Tahun 2019 senilai Rp0,00 setelah dilakukan penghapusan piutang kedaluwarsa. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi Izin Trayek
Saldo 31 Desember 2022	1.650.000,00
Penambahan ketetapan 2023	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	0,00
Penghapusan piutang	(1.650.000,00)
Saldo 31 Desember 2023	0,00
Penyisihan piutang	(0,00)
Saldo NRV 31 Desember 2023	0,00

1.1.04.03.07 *Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*

Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp168.318.190,00 dan belum dilakukan penyisihan piutang karena umur piutang masih di bawah 1 tahun. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang Retribusi PBG
Saldo Audited 31 Desember 2022	0,00
Penambahan ketetapan 2023	3.457.663.571,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan	(3.289.345.381,00)
Saldo 31 Desember 2023	168.318.190,00
Penyisihan piutang	(0,00)
Saldo NRV 31 Desember 2023	168.318.190,00

1.1.05 *Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Deviden Perusahaan BUMD Tahun Buku 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun 2024 dengan total senilai Rp5.631.928.516,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Sumber	Nominal
PT. Bank NTB Syariah	5.103.806.038,00
PT. Jamkrida NTB Bersaing	48.321.978,00
PT. BPR NTB	479.800.500,00
TOTAL	5.631.928.516,00

1.1.06 *Piutang Lain-lain PAD yang Sah*

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp20.443.700.340,70 dan Rp44.448.588.003,25 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.443.700.340,70	44.448.588.003,25	(54,01)	(24.004.887.662,55)
Piutang Jasa Giro	155.863,45	0,00	100,00	155.863,45
Piutang Pendapatan BLUD	20.442.620.113,25	44.447.663.639,25	(54,01)	(24.005.043.526,00)
Piutang Denda Pajak	924.364,00	924.364,00	0,00	0,00

1.1.06.05 *Piutang Jasa Giro*

Piutang Jasa Giro senilai Rp155.863,45 merupakan Jasa Giro Pada Rekening Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja yang belum dipindahbukukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

1.1.06.12 *Piutang Denda Pajak*

Piutang denda pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp924.364,00, dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	Piutang Denda Pajak Hotel
1	Saldo 31 Desember 2022	924.364,00
2	Penambahan ketetapan 2023	0,00
3	Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu	(0,00)
4	Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2023	0,00
5	Saldo 31 Desember 2023	924.364,00
6	Penyisihan piutang	0,00
7	Saldo NRV 31 Desember 2023	924.364,00

1.1.06.16 *Piutang Pendapatan BLUD*

Piutang Pendapatan BLUD pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp20.442.620.113,25 dan Rp44.447.663.639,25. Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah pada RSUD Selaku BLUD dengan rincian pada tabel berikut.

NO	URAIAN	2023	2022
1	Pasien BPJS	14.736.090,00	30.861.983.253,00
2	Pasien Umum	4.711.178.947,25	4.559.573.167,25
3	PT. Nusra Solusindo	4.000.000,00	4.000.000,00
4	PT. Mitra Langgeng Sejati	53.593.200,00	31.000.000,00
5	Rangga Taxi	25.000.000,00	25.000.000,00
6	RS. Siloam	15.950.000,00	588.500,00
7	RSI. Siti Hajar	245.965.200,00	0,00
8	RS. Prof. Mulyanto	20.545.204,00	0,00
9	RSUD. Patuh Patju	109.055.100,00	0,00
10	RS. Tresna	10.050.000,00	0,00
11	RSUP	44.980.000,00	0,00
12	RSUD Selong	54.200.000,00	0,00
12	Covid (Kemenkes)	11.906.943.614,00	2.134.202.300,00
13	RSUD Narmada	87.117.500,00	12.239.000,00
14	RSUD Lombok Utara	75.262.000,00	23.400.000,00
15	Dikes Lombok Barat	1.384.768.507	315.661.106,00
16	Dikes Kota	1.679.274.751	6.448.527.113,00
17	RSUD Asyifa	0,00	1.989.200,00
18	Sewa Apotik	0,00	12.500.000,00
19	Lain-lain	0,00	17.000.000,00
Jumlah		20.442.620.113,25	44.447.663.639,25

1.1.07 *Piutang Transfer Pemerintah Pusat*

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp13.912.124.505,00 dan Rp12.353.894.469,00 dan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.912.124.505,00	12.353.894.469,00	12,61	1.558.230.036,00
Piutang DBH PBB	459.245.764,00	459.245.764,00	0,00	0,00
Piutang DBH CHT	13.452.878.741,00	8.327.786.741,00	61,54	5.125.092.000,00
Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	0,00	3.566.861.964,00	(100,00)	(3.566.861.964,00)

Piutang atas Kurang bayar DBH SDA Mineral dan Batubara – *Royalty* disalurkan melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility* atau TDF pada Bulan Desember 2023, sehingga atas transaksi tersebut dilakukan reklasifikasi dari akun Piutang ke Aset Lainnya sesuai amanat dari Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7841/Keuda.

1.1.08 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan saldo Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTB sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat senilai Rp13.482.886.163,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Transfer Antar Daerah	13.482.886.163,00	12.061.853.615,00	11,78	1.421.032.548,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.016.628.599,00	5.831.938.638,00	3,17	184.689.961,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.526.247.030,00	3.580.457.580,00	26,42	945.789.450,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.936.465.083,00	2.644.954.733,00	11,02	291.510.350,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.545.451,00	4.502.664,00	(21,26)	(957.213,00)

1.1.09 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta piutang bagi hasil pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Lainnya	54.547.029.889,00	0,00	100,00	54.547.029.889,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	471.145.000,00	0,00	100,00	471.145.000,00
Piutang Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	54.075.884.889,00	0,00	100,00	54.075.884.889,00

1.1.10 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai (Rp17.281.708.403,01) dan (Rp21.143.415.156,48) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Penyisihan Piutang	(17.281.708.403,01)	(21.143.415.156,48)	(18,26)	3.861.706.753,47
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(12.247.339.936,82)	(9.222.197.018,67)	32,80	(3.025.142.918,15)
Penyisihan Piutang Retribusi	(760.941.116,70)	(809.302.228,00)	(5,98)	48.361.111,30
Penyisihan Piutang Lainnya	(4.273.427.349,49)	(11.111.915.909,81)	(61,54)	6.838.488.560,32

1.1.10.01.01 Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak senilai Rp42.163.999.391,31 setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 senilai Rp12.247.339.963,82 mempunyai nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) senilai Rp29.916.659.454,49. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Piutang	Penyisihan	Net Realizable Value
Penyisihan Piutang Pajak	42.205.053.714,31	(12.247.339.936,82)	29.957.713.777,49
Piutang Pajak Hotel	3.087.159.868,09	(500.926.973,59)	2.586.232.894,50
Piutang Pajak Restoran	3.039.783.902,76	(1.012.074.831,32)	2.027.709.071,44
Piutang Pajak Hiburan	197.201.375,00	0,00	197.201.375,00
Piutang Pajak Reklame	265.739.654,00	(81.934.364,35)	183.805.289,65
Piutang Pajak Parkir	491.772.486,00	(462.074.233,50)	29.698.252,50
Piutang Pajak Air Tanah	956.551.248,46	(352.421.106,61)	604.130.141,85
Piutang Pajak PBB-P2	34.166.845.180,00	(9.837.908.427,45)	24.328.936.752,55

1.1.10.01.02 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari Piutang Retribusi senilai Rp2.316.910.361,00 setelah dilakukan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih senilai Rp760.941.116,70 maka jumlah Piutang Retribusi NRV menjadi senilai Rp1.555.969.244,30, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Piutang	Penyisihan	Net Realizable Value
Penyisihan Piutang Retribusi	2.324.564.517,00	(760.941.116,70)	1.563.623.400,30
Pelayanan Kebersihan	361.375.000,00	0,00	361.375.000,00
Pelayanan Parkir	64.318.060,00	0,00	64.318.060,00
Pengendalian Menara Telk.	0,00	0,00	0,00
Ret. PGP	1.729.345.100,00	(760.820.300,00)	968.524.800,00
Piutang Retribusi IMB	1.208.167,00	(120.816,70)	1.087.350,30
Piutang Retribusi PIMB	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	168.318.190,00	0,00	168.318.190,00

1.1.10.01.04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp4.273.427.349,49 dan Rp11.111.915.909,81 seluruhnya merupakan penyisihan Piutang tak Tertagih pada RSUD. Nilai Piutang senilai Rp20.442.620.113,25 memiliki NRV senilai Rp16.169.192.763,76 setelah disisihkan.

1.1.11 *Beban Dibayar Dimuka*

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.224.092.000,00 dan Rp3.775.622.000,00 turun senilai Rp2.551.530.000,00. Rincian Beban di Bayar di Muka adalah sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Dibayar Dimuka	1.224.092.000,00	3.775.622.000,00	(67,58)	(2.551.530.000,00)
Sewa Gedung Kantor Arsip BKD	0,00	25.500.000,00	(100,00)	(25.500.000,00)
Swa Kantor Lurah Mayura	0,00	37.500.000,00	(100,00)	(37.500.000,00)
Sewa Kantor Lurah Cilinaya	0,00	37.500.000,00	(100,00)	(37.500.000,00)
Uang Muka Tanah RTH Bertais	739.416.000,00	739.416.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Tanah Makam Taman Indah-Pagesangan	484.676.000,00	484.676.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Tanah Jembatan Pipa	0,00	201.030.000,00	(100,00)	(201.030.000,00)
Uang Muka Tanah untuk Kantor Lurah Cilinaya	0,00	2.250.000.000,00	(100,00)	(2.250.000.000,00)

1.1.12 *Persediaan*

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp26.387.032.058,19 dan Rp32.713.764.604,76 naik senilai Rp6.326.732.546,57 atau 19,34% dengan saldo Persediaan terbesar berupa persediaan obat-obatan senilai Rp21.760.274.223,75, persediaan bahan senilai Rp2.239.113.890,94, serta persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp1.704.193.838,50. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Persediaan	26.387.032.058,19	32.713.764.604,76	(19,34)	(6.326.732.546,57)
Bahan	2.239.113.890,94	1.007.373.263,67	122,27	1.231.740.627,27
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.704.193.838,50	2.758.185.143,00	(38,21)	(1.053.991.304,50)
Obat-obatan	21.760.274.223,75	28.304.681.684,09	(23,12)	(6.544.407.460,34)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	683.450.105,00	642.524.514,00	6,37	40.925.591,00
Natura dan Pakan	0,00	1.000.000,00	(100,00)	(1.000.000,00)

1.1.12.01.01 *Bahan*

Saldo Bahan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.239.113.890,94 dan Rp1.007.373.263,67 naik senilai Rp1.231.740.627,27 atau 122,27% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bahan	2.239.113.890,94	1.007.373.263,67	122,27	1.231.740.627,27
Bahan Bangunan dan Konstruksi	598.700,00	0,00	0,00	598.700,00
Bahan Kimia	305.133.826,74	372.912.275,68	(18,18)	(67.778.448,94)
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	45.000,00	(100,00)	(45.000,00)
Bahan/Bibit Tanaman	75.573.000,00	0,00	0,00	75.573.000,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.387.350,00	30.763.150,00	(40,23)	(12.375.800,00)
Bahan Lainnya	1.839.421.014,20	603.652.837,99	204,72	1.235.768.176,21

- Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi senilai Rp598.700,00 merupakan persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Persediaan Bahan kimia senilai Rp305.133.826,74 merupakan persediaan di Dinas Kesehatan senilai Rp301.583.826,74,00, serta Persediaan Hand Sanitizer dan *Silica Gel* di Dinas Kearsipan senilai Rp3.550.000,00;
- Persediaan Bahan /Bibit Tanaman senilai Rp75.573.000,00 merupakan persediaan pada Dinas Pertanian;
- Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan senilai Rp18.387.350,00 merupakan persediaan bibit ikan pada Dinas Perikanan; dan
- Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp1.839.421.014,20 merupakan Persediaan Vaksin dan BMHP pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.031.880.793,00, serta Persediaan Bahan Makanan dan Instalasi Pemulasaran Jenazah pada RSUD Kota Mataram senilai Rp807.540.220,00.

1.1.12.01.03 *Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor*

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.704.193.838,50 dan Rp2.758.185.143,00 turun senilai Rp1.053.991.304,50 atau 38,21% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.704.193.838,50	2.758.185.143,00	(38,21)	(1.053.991.304,50)
Alat Tulis Kantor	1.175.270.936,50	1.903.869.259,00	(38,27)	(728.598.322,50)
Kertas dan Cover	8.406.400,00	9.360.277,00	(10,19)	(953.877,00)
Bahan Cetak	300.832.563,00	542.376.640,00	(44,53)	(241.544.077,00)
Benda Pos	22.000,00	2.050.000,00	(98,93)	(2.028.000,00)
Bahan Komputer	27.975.688,00	1.694.500,00	1.550,97	26.281.188,00
Perabot Kantor	51.455.574,00	117.753.021,00	(56,30)	(66.297.447,00)
Alat Listrik	24.270.670,00	36.976.902,00	(34,36)	(12.706.232,00)
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	1.485.000,00	(100,00)	(1.485.000,00)
Suvenir/Cendera Mata	57.415.000,00	54.902.000,00	4,58	2.513.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.545.007,00	87.717.544,00	(33,26)	(29.172.537,00)

- a. Persediaan Ala Tulis Kantor senilai Rp1.175.270.936,50 merupakan persediaan ATK di seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram;
- b. Persediaan Kertas dan Cover senilai Rp8.406.400,00, merupakan persediaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perdagangan, dan Kecamatan Ampenan;
- c. Persediaan Bahan Cetak senilai Rp300.832.563,00 merupakan persediaan di beberapa SKPD;
- d. Persediaan Benda Pos senilai Rp22.000,00 merupakan persediaan perangko, materai, maupun benda pos lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Persediaan Bahan Komputer senilai Rp27.975.688,00 merupakan persediaan di beberapa SKPD;
- f. Persediaan Perabot Kantor senilai Rp51.455.574,00 merupakan persediaan di beberapa SKPD;
- g. Persediaan Alat Listrik senilai Rp24.270.670,00 merupakan persediaan di beberapa SKPD;

- h. Persediaan souvenir/cinderamata senilai Rp57.415.000,00 berupa plakat terdapat di Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp21.415.000,00, Bappeda senilai Rp32.250.000,00, dan BKPSDM senilai 3.750.000,00; dan
- i. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai Rp58.545.007,00 merupakan Persediaan Alat Kebersihan pada Dinas Kesehatan senilai Rp50.831.320,00, Dinas Kearsipan senilai Rp1.780.000,00, Persediaan alat Rumah Tangga pada RSUD Kota Mataram senilai Rp4.360.000,00, serta Persediaan Lain-lain pada Dinas Perikanan senilai Rp1.573.687,00.

1.1.12.01.04 Obat-obatan

Persediaan Obat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp21.760.274.223,75 dan Rp28.304.681.684,09 turun senilai Rp6.544.407.460,34 atau 23,12%. Persediaan obat tersebut merupakan Persediaan di Dinas Pendidikan senilai Rp2.503.170,00, Dinas Kesehatan senilai Rp7.578.289.764,75, RSUD Kota Mataram senilai Rp13.889.778.861,00, serta di DPPKB senilai Rp289.702.428,00.

1.1.12.01.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Tahun 2023 senilai Rp683.450.105,00 terdiri dari Persediaan di Dinas Sosial, BPBD, Sekretariat Daerah dan DP2KB dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Sosial senilai Rp288.675.105,00 antara lain berupa kursi roda, alat bantu dengar, kasur untuk lansia, sandang, sembako dan peralatan usaha.
- b. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada BPBD senilai Rp20.000.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga antara lain berupa sarana prasarana penanganan bencana covid-19;
- c. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Sekretariat Daerah senilai Rp184.275.000,00 merupakan persediaan seragam calon jamaah haji Kota Mataram;
- d. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp150.000.000,00 merupakan Stok Persediaan Bahan Makanan Pokok berupa Beras pada Gudang Cadangan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) senilai Rp40.500.000,00 yang merupakan *Genre Kit*.

Terhadap Rincian Saldo Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6** Rekapitulasi Persediaan Tahun 2023.

1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp185.193.091.551,10 dan Rp179.853.800.259,32 naik senilai Rp5.339.291.291,78 atau 2,97% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Investasi Jangka Panjang	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32	2,97	5.339.291.291,78
Investasi Non Permanen	61.789.188,00	338.039.948,00	(81,72)	(276.250.760,00)
Lainnya				
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(61.789.188,00)	(338.039.948,00)	(81,72)	276.250.760,00
Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemda	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32	2,97	5.339.291.291,78

1.2.01.05.01 *Investasi Non Permanen*

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dengan 2022 senilai Rp61.789.188,00 dan Rp338.039.948,00 turun senilai Rp276.250.760,00 karena adanya *Crash Program* berupa pemberian keringanan utang. Atas sisa dana dilakukan perhitungan NRV 100% karena sudah lebih dari 5 Tahun, dan kategori macet tidak ada setoran. Penjelasan lebih lanjut kronologis dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

Untuk Investasi Non Permanen berupa Piutang Dana Bergulir penyelesaiannya diserahkan kepada KPKNL Mataram dengan Surat PJ Walikota Mataram nomor 900/778/BPKAD/XI/2015 tanggal 10 November 2015.

Sampai saat ini masih dalam proses di KPKNL Mataram dengan perkembangan proses di KPKNL selama Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Tanggal 21 Januari 2016 pihak KPKNL meminta perincian pokok Utang dan jasa/bunga dari tiap-tiap Koperasi yang menerima bantuan sesuai surat nomor S-23/WKN.14/KNL.03/2016.
- Tanggal 30 Maret 2016 pihak KPKNL meminta data nama debitur dan alamat debitur 19 Koperasi untuk proses selanjutnya sesuai surat nomor S-130/WKN.14/KNL.03/2016.
- Tanggal 15 April 2016 pihak KPKNL menginformasikan Nilai Dana Bergulir sesuai surat nomor S-161/WKN.14/KNL.03/2016 dengan melampirkan rekap dana bergulir dan nilai pelunasan sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 senilai Rp23.321.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Jumlah
10 Maret 2016	LKM Galang Sejahtera	1.296.000,00
10 Maret 2016	KSU Agung Perdana	990.099,00
10 Maret 2016	KSP Dana karya	656.000,00
10 Maret 2016	KSP Mitra Agung	1.980.198,00
21 Maret 2016	KSP Central Lombok	4.644.000,00
29 Maret 2016	Kopkar Varindo	13.755.000,00
JUMLAH		23.321.297,00

Tanggal 21 April 2016 Pemerintah Kota Mataram mengirimkan namapengurus dan alamat debiur Koperasi sesuai surat nomor 516/608/Diskoperindag/IV/2016 sesuai permintaan dari KPKNL surat nomor S-130/WKN.14/KNL.03/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Tanggal 21 April 2016 pihak KPKNL meminta pendampingan dari karyawan Pemerintah Kota Mataram yang mengetahui alamat debitur dalam rangka kegiatan penagihan langsung oleh pihak KPKNL tanggal 27 s.d 28 April 2016 sesuai surat nomor S-172/WKN.14/KNL.03/2016 bahwa ada pelunasan senilai Rp23.321.297,00.

Sampai dengan akhir Tahun per 31 Desember 2016 kondisi pengurusan Piutang dana bergulir berdasarkan laporan Pihak KPKNL sebagai berikut.

- Kondisi Koperasi dalam Penyampaian Surat Paksa (peny. SP) sebanyak 9 Koperasi;

2. Kondisi Koperasi yang akan menerima Surat Paksa (SP) sebanyak 15 Koperasi;
3. Kondisi Koperasi yang dalam Pengurusan Piutang Negara Sementara Belum dapat Ditagih (PSBDT) sebanyak 4 Koperasi; dan
4. Koperasi yang sudah melunasi kewajibannya dan telah menerima Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 8 Koperasi.

Pada Tahun 2016 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL senilai Rp59.906.644,00. Adapun rincian pelunasan dan angsuran dari Koperasi yang sudah mengangsur dan yang sudah melunasi sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
10 Maret 2016	LKM Galang Sejahtera	1.296.000,00	SPPNL
10 Maret 2016	KSP Dana karya	656.000,00	SPPNL
21 Maret 2016	KSP Central Lombok	4.644.000,00	SPPNL
29 Maret 2016	Kopkar Varindo	13.755.000,00	SPPNL
14 April 2016	LKM Sangkareang	17.723.000,00	SPPNL
	KSP Mitra Agung perkasa	13.104.000,00	SPPNL
	Kopontren Hidaytaul Muttaqin	2.193.000,00	SPPNL
	Kopwan Anjani	4.591.000,00	SPPNL
	KSU Agung perdana	990.099,00	masih mengangsur
	KSU Arrahmah	954.545,00	masih mengangsur
JUMLAH		59.906.644,00	

Pada awal Tahun 2017 dilaksanakan penyampaian surat paksa terhadap 15 Koperasi pada poin 2 dan pihak KPKNL meminta pendampingan dari karyawan Pemerintah Kota Mataram yang mengetahui alamat debitur tersebut sesuai surat dari KPKNL Mataram nomor S-69/WKN.14/KNL.03/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017. Terdapat selisih lebih setor KPKNL ke Kas Daerah senilai Rp63.637,00 (Rp59.970.281,00-Rp59.906.644,00) dan sudah dikembalikan melalui Belanja Tak Terduga pada bulan Juni 2017. Pada Tahun 2017 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL senilai Rp10.324.546,00. Adapun rincian angsuran dari Koperasi sebagai berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Koperasi Mitra Aken Sejati	909.091,00
2	KSU Arrahmah	454.545,00
3	KSU Agung Perdana	909.091,00
4	KSP Mitra Aken Sejati	3.506.364,00
5	KPRI Tritunggal	4.545.455,00
JUMLAH		10.324.546,00

Pada akhir Desember 2018 terbit Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan rincian sebagai berikut.

No. PSBDT	Nama	Hak PP	Biad PPN 10%
PSBDT-53/PUPNC.21.00/2018	KSU Griya Makmur	9.185.000,00	918.500,00
PSBDT-52/PUPNC.21.00/2018	KSU Nurul Yaqin	8.470.000,00	847.000,00
PSBDT-51/PUPNC.21.00/2018	KSU jaspro	22.940.000,00	2.294.000,00
PSBDT-50/PUPNC.21.00/2018	Koperasi Galang Bulan	18.600.000,00	1.860.000,00
PSBDT-49/PUPNC.21.00/2018	Kelompok Usaha Sekar Kencana	8.715.000,00	871.500,00

Pada Tahun 2018 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL senilai Rp1.363.636,00, dan pada tahun 2019 jumlah dana bergulir yang berhasil ditagih oleh

pihak KPKNL dari KSU Arrahman senilai Rp818.181,00 yang dibayar dengan cicilan senilai Rp272.727 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 31 Januari, 28 Juni dan 13 Desember 2019. Pada 22 Desember 2022 pihak KPKNL berhasil menagih KSU Arrahman senilai Rp452.045,00.

Kemudian pada Tahun 2023 diadakan *Crash Program* berupa keringanan utang sehingga saldo dana bergulir yang masih dikelola oleh KPKNL sebagai berikut.

Nama	Nilai Penyerahan	Tahap Pengurusan Terakhir	Saldo 31 Desember 2023
KSU Mitra Pembangunan Rakyat	Rp18.352.000,00	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa	Rp18.352.000,00
KPRI Tri Tunggal	Rp15.839.000,00	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa	Rp11.293.545,00
KSU Ar-Rahmah	Rp9.110.000,00	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa	Rp1.363.643,00
KSU Sejahtera Bersama	Rp9.148.000,00	Laporan Pemberitahuan Surat Paksa	Rp9.148.000,00
LKM Miftahul Jannah	Rp21.632.000,00	Pengumuman Panggilan	Rp21.632.000,00
TOTAL	Rp74.081.000,00		Rp61.789.188,00

1.2.01.05.02 Penyisihan Investasi Non Permanen

Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 100% dari nilai pokok yang belum dikembalikan yaitu senilai Rp61.789.188,00 dan (Rp338.039.948,00).

1.2.02 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp185.193.091.551,10 dan Rp179.853.800.259,32, naik sebesar 2,97% atau Rp5.339.291.291,78 sesuai dengan nilai tambahan penyertaan modal pada PT. Air Minum Giri Menang Mataram Tahun 2023. Investasi Jangka Panjang merupakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PDAM Giri Menang, BPR NTB Mataram, PT Bank NTB Syariah Mataram dan PT Jamkrida NTB. Penilaian investasi permanen di PDAM Giri Menang menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%, sedangkan pada PT Bank NTB Syariah, PD. BPR NTB Mataram dan PT Jamkrida NTB menggunakan metode biaya artinya sebesar penyertaan modal yang diserahkan karena kepemilikan pada perusahaan tersebut di bawah 20%. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemda adalah sebagai berikut.

No	Uraian	% Kepemilikan	Total ekuitas	2023	2022
1	PDAM Giri Menang Mataram	45,59	322.740.459.374,00	152.461.615.551,10	147.122.324.259,32
2	PT. BPR NTB Mataram	3,05	251.490.907.788,29	4.634.346.000,00	4.634.346.000,00
3	PT. Bank NTB Syariah	3,06	1.704.892.000.000,00	27.097.130.000,00	27.097.130.000,00
4	PT. Jamkrida NTB Bersaing	3,05	38.551.665.658,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah				185.193.091.551,10	179.853.802.259,32

- Persentase kepemilikan modal pada BPR NTB Mataram pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar 3,05% dengan nilai penyertaan modal Rp4.634.346.000,00. Terhadap Laporan Keuangan PD. BPR NTB Mataram *Audited* dapat dilihat pada **Lampiran 7** Laporan Keuangan PD. BPR NTB Mataram Tahun Anggaran 2023;
- Persentase kepemilikan modal pada PT Bank NTB Syariah pada Tahun 2022 sebesar 3,06% di bawah 20% sehingga nilai ekuitas kepemilikan dan penyertaan modal sama yaitu senilai Rp27.097.130.000,00. Pada Tahun ini tidak ada tambahan penyertaan modal. Terhadap Laporan Keuangan PT. Bank NTB Syariah dapat dilihat pada **Lampiran 8** Laporan Keuangan PT. Bank NTB Syariah Tahun Anggaran 2023;
- Persentase kepemilikan modal pada PT. Air Minum Giri Menang Mataram pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar 45,59% dengan ekuitas kepemilikan senilai Rp152.461.615.551,10. Terhadap Laporan Keuangan PT. Air Minum Giri Menang Mataram *Audited* dapat dilihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan PT. Air Minum Giri Menang Mataram Tahun Anggaran 2023; dan
- Persentase kepemilikan modal pada PT Jamkrida NTB Tahun 2022 sebesar 3,05% di bawah 20% sehingga nilai ekuitas kepemilikan dan penyertaan modal sama yaitu senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tahun ini tidak ada tambahan penyertaan modal. Terhadap Laporan Keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat dilihat pada **Lampiran 10** Laporan Keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing Mataram Tahun Anggaran 2023.

1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp3.085.990.869.737,45 dan Rp2.983.948.159.021,08 naik sebesar 3,42% senilai Rp102.042.710.716,36 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tetap	3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08	3,42	102.042.710.716,36
Tanah	1.332.906.253.110,00	1.314.205.363.090,00	1,42	18.700.890.020,00
Peralatan dan Mesin	940.058.935.876,37	825.320.527.441,69	13,90	114.738.408.434,68
Gedung dan Bangunan	1.221.838.466.235,75	1.155.983.738.425,43	5,70	65.854.727.810,32
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.477.427.032,08	1.134.657.254.831,51	6,24	70.820.172.200,57
Aset Tetap Lainnya	14.485.603.528,74	11.694.038.944,75	23,87	2.791.564.583,99
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.340.948.450,00	551.517.000,00	143,14	789.431.450,00
Akumulasi Penyusutan	(1.630.116.764.495,49)	(1.458.464.280.712,30)	11,77	(171.652.483.783,19)

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap	2.983.948.159.021,08	128.285.107.524,38	26.242.396.808,01	3.085.990.869.737,45
Tanah	1.314.205.363.090,00	31.136.628.725,00	12.435.738.705,00	1.332.906.253.110,00
Peralatan dan Mesin	825.320.527.441,69	118.622.968.022,00	3.884.559.587,32	940.058.935.876,37
Gedung dan Bangunan	1.155.983.738.425,43	70.066.060.062,00	4.211.332.251,68	1.221.838.466.235,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.134.657.254.831,51	71.255.791.100,57	435.618.900,00	1.205.477.427.032,08

Aset Tetap Lainnya	11.694.038.944,75	7.515.194.948,00	4.723.630.364,01	14.485.603.528,74
Konstruksi dalam Pengerjaan	551.517.000,00	1.340.948.450,00	551.517.000,00	1.340.948.450,00
Akumulasi Penyusutan	(1.458.464.280.712,30)	(171.652.483.783,19)	0,00	(1.630.116.764.495,49)

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023, Aset Tetap disajikan dengan menggunakan kode rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, sehingga terdapat perbedaan nilai rincian Aset level 4, 5, dan 6 dalam LKPD Tahun 2023 dan 2022.

1.3.01 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.332.906.253.110,00 dan Rp1.314.205.363.090,00 atau naik sebesar 1,42% senilai Rp18.700.890.020,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.332.906.253.110,00	1.314.205.363.090,00	1,42	18.700.890.020,00
Tanah Persil	890.135.837.594,00	882.604.471.139,00	0,85	7.531.366.455,00
Tanah Non Persil	109.012.531.782,00	104.352.321.782,00	4,47	4.660.210.000,00
Lapangan	333.757.883.734,00	327.248.570.169,00	1,99	6.509.313.565,00

Tanah senilai Rp13.685.481.323,00 disajikan dalam akun Properti Investasi. Dalam PSAP 17 dijelaskan bahwa properti tanah dan bangunan yang disewakan untuk menghasilkan rental dan untuk kenaikan nilai harus dikategorikan sebagai properti investasi karena tidak digunakan sendiri. Mutasi tanah Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
SALDO AWAL	1.314.205.363.090,00	
Mutasi tambah dari Belanja Modal LRA	20.305.698.726,00	
Mutasi tambah dari Uang Muka	2.451.030.000,00	
Mutasi tambah dari Beban Jasa Appraisal	46.249.999,00	
Mutasi tambah dari Hibah	6.208.800.000,00	
Mutasi tambah dari Utang (RTH Bertais)	2.124.300.000,00	
Koreksi Kurang Catat Utang TPST Sandubaya	550.000,00	
Mutasi kurang pembayaran tanah TPST Sandubaya		11.000.000.000,00
Mutasi kurang Hibah ke Polres Mataram		124.448.205
Mutasi kurang Hibah ke Pemprov		1.255.490.000,00
Reklas ke Properti Investasi		55.800.500,00
JUMLAH MUTASI	31.136.628.725,00	12.435.738.705,00
TOTAL ASET TANAH		1.332.906.253.110,00

Mutasi tambah dari uang muka senilai Rp2.451.030.000,00 masing-masing merupakan belanja modal uang muka pengadaan Tanah untuk Jembatan pada Dinas PUPR senilai Rp201.030.000,00 serta belanja modal uang muka pengadaan Tanah untuk Kantor Lurah Cilinya senilai Rp2.250.000,000 yang dikeluarkan dari nilai aset pada Tahun 2022. Nilai tersebut ditambahkan kembali ke nilai aset tetap Tanah pada Tahun 2023 karena sudah lunas.

Mutasi kurang belanja modal pembayaran Tanah TPST Sandubaya senilai Rp11.000.000.000,00 dikeluarkan dari nilai aset karena telah tercatat seluruhnya sebagai

nilai aset pada Tahun 2022 dikarenakan telah ada pelepasan hak dan sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Kota Mataram.

Dari nilai aset tetap tanah senilai Rp1.332.906.253.110,00, terdapat 647 bidang tanah yang belum bersertifikat senilai Rp346.969.353.357,00.

1.3.01.01.01 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp890.135.837.594,00 dan Rp882.604.471.139,00, naik senilai 0,85% atau Rp7.531.366.455,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah Persil	890.135.837.594,00	882.604.471.139,00	0,85	7.531.366.455,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	10.351.569.000,00	10.351.569.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	238.737.538.686,00	238.793.339.186,00	(0,02)	(55.800.500,00)
Tanah untuk Bangunan Industri	57.330.265,00	57.330.265,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	629.389.988.643,00	624.931.826.688,00	0,71	4.458.161.955,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.950.786.000,00	1.950.786.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	9.618.877.000,00	6.519.620.000,00	47,54	3.099.257.000,00
Tanah Persil Lainnya	29.748.000,00	0,00	0,00	29.748.000,00

1.3.01.01.02 Tanah Non Persil

Saldo Tanah Non Persil Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp109.012.531.782,00 dan Rp104.352.321.782,00, naik senilai 4,47% atau Rp4.660.210.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah Non Persil	109.012.531.782,00	104.352.321.782,00	4,47	4.660.210.000,00
Tanah Basah	14.054.327.862,00	14.054.327.862,00	0,00	0,00
Tanah Kering	69.233.895.200,00	64.573.685.200,00	7,22	4.660.210.000,00
Tanah Perkebunan	25.369.599.000,00	25.369.599.000,00	0,00	0,00
Tanah Hutan	354.709.720,00	354.709.720,00	0,00	0,00

1.3.01.01.03 Lapangan

Saldo Lapangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp333.757.883.734,00 dan Rp327.248.570.169,00, naik senilai 1,99% atau Rp6.509.313.565,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Lapangan	333.757.883.734,00	327.248.570.169,00	1,99	6.509.313.565,00
Tanah Lapangan Olahraga	56.167.127.700,00	54.199.727.700,00	3,63	1.967.400.000,00
Tanah Lapangan Parkir	5.611.308.007,00	5.611.308.007,00	0,00	0,00

Tanah Lapangan Penimbunan Barang	8.180.300.000,00	8.180.300.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Jalan	193.212.142.192,00	190.453.589.106,00	1,45	2.758.553.086,00
Tanah untuk Bangunan Air	782.976.250,00	782.976.250,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Instalasi	36.906.156.760,00	36.906.156.760,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	586.536.565,00	533.136.565,00	10,02	53.400.000,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Makam	10.379.074.586,00	8.679.190.586,00	19,59	1.699.884.000,00
Tanah untuk Taman	7.929.435.979,00	7.899.359.500,00	0,38	30.076.479,00
Tanah Kampung	10.002.825.695,00	10.002.825.695,00	0,00	0,00

1.3.02 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp940.058.935.876,37 dan Rp825.320.527.441,69 atau naik 13,90% senilai Rp114.738.408.434,68 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan dan Mesin	940.058.935.876,37	825.320.527.441,69	13,90	114.738.408.434,68
Alat Besar	34.591.924.056,42	27.706.874.431,42	24,85	6.885.049.625,00
Alat Angkutan	144.660.722.038,01	136.777.123.876,01	5,76	7.883.598.162,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.933.202.759,07	6.588.289.959,07	5,24	344.912.800,00
Alat Pertanian	8.423.599.094,42	8.000.227.797,42	5,29	423.371.297,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	167.874.322.810,13	155.786.703.652,13	7,76	12.087.619.158,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.507.067.825,01	16.871.206.025,01	3,77	635.861.800,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	351.936.768.230,88	277.228.910.006,88	26,95	74.707.858.224,00
Alat Laboratorium	103.333.267.113,17	101.640.151.952,17	1,67	1.693.115.161,00
Alat Persenjataaan	1.674.418.279,71	1.559.889.990,71	7,34	114.528.289,00
Komputer	87.974.364.510,37	80.561.879.439,69	9,20	7.412.485.070,68
Alat Pengeboran	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	310.022.500,00	160.172.500,00	93,56	149.850.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	2.242.916.646,04	1.738.056.015,04	29,05	504.860.631,00
Alat Peraga	3.138.340,00	3.138.340,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	67.286.768,00	58.286.768,00	15,44	9.000.000,00
Rambu-rambu	11.713.479.329,51	9.914.681.112,51	18,14	1.798.798.217,00
Peralatan Olahraga	796.535.575,62	712.035.575,62	11,87	84.500.000,00

Mutasi saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
SALDO AWAL	825.320.527.441,69	
Belanja Modal LRA	115.171.860.211,00	
Mutasi Tambah dari Beban Pegawai	10.500.000,00	
Mutasi Tambah dari Beban Barang dan Jasa	41.256.000,00	
Mutasi Antar Akun Dari Gedung dan Bangunan	1.150.678.201,00	
Mutasi Antar Akun Dari Aset Tetap Lainnya	494.305.393,00	
Mutasi Tambah Hasil Inventarisasi	13.050.000,00	
Mutasi Tambah dari Hibah	1.741.318.217,00	
Mutasi Kurang Ke Beban Barang dan Jasa		2.274.714.562,00
Mutasi Kurang Ke Ekstrakompatabel		1.150.248.325,32
Mutasi Kurang ke Aset Rusak Berat		146.645.000,00
Mutasi Kurang Hibah		308.724.700,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Lainnya (Kurvol)		4.227.000,00
JUMLAH MUTASI	118.622.968.022,00	3.884.559.587,32
TOTAL ASET PERALATAN DAN MESIN		940.058.935.876,37

1.3.02.01 *Alat Besar*

Saldo Alat Besar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp34.591.924.056,42 dan Rp27.706.874.431,42, naik senilai 24,85% atau Rp6.885.049.625,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Besar	34.591.924.056,42	27.706.874.431,42	24,85	6.885.049.625,00
Alat Besar Darat	24.873.623.911,42	18.260.624.286,42	36,21	6.612.999.625,00
Alat Bantu	9.718.300.145,00	9.446.250.145,00	2,88	272.050.000,00

1.3.02.01.01 *Alat Besar Darat*

Saldo Alat Besar Darat Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp24.873.623.911,42 dan Rp18.260.624.286,42, naik senilai 36,21% atau Rp6.612.999.625,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Besar Darat	24.873.623.911,42	18.260.624.286,42	36,21	6.612.999.625,00
Grader	2.956.898.864,00	2.956.898.864,00	0,00	0,00
Excavator	7.702.098.126,00	3.074.098.501,00	150,55	4.627.999.625,00
Pile Driver	218.015.571,42	218.015.571,42	0,00	0,00
Hauler	2.675.379.000,00	2.675.379.000,00	0,00	0,00
Asphalt Equipment	1.111.369.500,00	1.111.369.500,00	0,00	0,00
Compacting Equipment	284.900.000,00	284.900.000,00	0,00	0,00
Aggregate And Concrete Equipment	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00
Loader	2.042.780.000,00	1.647.780.000,00	23,97	395.000.000,00
Alat Pengangkat	2.367.112.500,00	2.367.112.500,00	0,00	0,00
Mesin Proses	2.067.320.350,00	2.067.320.350,00	0,00	0,00
Alat Besar Darat Lainnya	3.370.000.000,00	1.780.000.000,00	89,33	1.590.000.000,00

1.3.02.01.03 *Alat Bantu*

Saldo Alat Bantu Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp9.718.300.145,00 dan Rp9.446.250.145,00, naik senilai 2,88% atau Rp272.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Bantu	9.718.300.145,00	9.446.250.145,00	2,88	272.050.000,00
Feeder	4.038.055.850,00	4.038.055.850,00	0,00	0,00
Electric Generating Set	4.029.489.295,00	4.029.489.295,00	0,00	0,00
Pompa	316.865.000,00	193.815.000,00	63,49	123.050.000,00
Unit Pemeliharaan Lapangan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
Alat Pengolahan Air Kotor	953.890.000,00	953.890.000,00	0,00	0,00
Alat Bantu Lainnya	348.000.000,00	199.000.000,00	74,87	149.000.000,00

1.3.2.02 *Alat Angkutan*

Saldo Alat Angkutan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp144.660.722.038,01 dan Rp136.777.123.876,01, naik senilai 5,76% atau Rp7.883.598.162,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan	144.660.722.038,01	136.777.123.876,01	5,76	7.883.598.162,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	139.804.525.498,48	131.897.752.336,48	5,99	7.906.773.162,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.797.277.039,53	3.797.277.039,53	0,00	0,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	764.005.000,00	787.180.000,00	(2,94)	(23.175.000,00)
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	294.914.500,00	294.914.500,00	0,00	0,00

1.3.02.02.01 *Alat Angkutan Darat Bermotor*

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp139.804.525.498,49 dan Rp131.897.752.336,49, naik senilai 5,99% atau Rp7.906.773.162,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan Darat Bermotor	139.804.525.498,49	131.897.752.336,49	5,99	7.906.773.162,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.894.407.774,72	35.915.166.471,72	8,30	2.979.241.303,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	14.467.064.960,98	13.965.794.960,98	3,59	501.270.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.509.411.802,86	27.509.411.802,86	0,00	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.675.027.810,94	17.111.920.951,94	3,29	563.106.859,00
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	393.915.000,00	163.415.000,00	141,05	230.500.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	27.035.302.400,00	24.377.422.400,00	10,90	2.657.880.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	13.829.395.748,99	12.854.620.748,99	7,58	974.775.000,00

1.3.02.02.02 *Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023 ,yaitu senilai Rp3.797.277.039,53 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.797.277.039,53	3.797.277.039,53	0,00	0,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.377.605.740,47	3.377.605.740,47	0,00	0,00
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	419.671.299,06	419.671.299,06	0,00	0,00

1.3.02.02.03 *Alat Angkutan Apung Bermotor*

Saldo Alat Angkutan Apung Bermotor Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp764.005.000,00 dan Rp787.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan Apung Bermotor	764.005.000,00	787.180.000,00	(2,94)	(23.175.000,00)
Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	0,00	23.175.000,00	(100,00)	(23.175.000,00)
Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	722.015.000,00	722.015.000,00	0,00	0,00
Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	41.990.000,00	41.990.000,00	0,00	0,00

1.3.02.02.04 *Alat Angkutan Apung Tak Bermotor*

Saldo Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Tahun 2023 dan 2022 sama, yaitu senilai Rp294.914.500 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	294.914.500,00	294.914.500,00	0,00	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	276.539.500,00	276.539.500,00	0,00	0,00

1.3.02.03 *Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp6.933.202.759,07 dan Rp6.588.289.959,07, naik senilai 5,24% atau Rp344.912.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.933.202.759,07	6.588.289.959,07	5,24	344.912.800,00
Alat Bengkel Bermesin	2.323.486.384,77	2.082.144.884,77	11,59	241.341.500,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	462.764.517,54	449.684.717,54	2,91	13.079.800,00
Alat Ukur	4.146.951.856,76	4.056.460.356,76	2,23	90.491.500,00

1.3.02.03.01 *Alat Bengkel Bermesin*

Alat Bengkel Bermesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.323.486.384,77 dan Rp2.082.144.884,77, naik senilai 11,59% atau Rp241.341.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Bengkel Bermesin	2.323.486.384,77	2.082.144.884,77	11,59	241.341.500,00
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	871.753.460,77	871.753.460,77	0,00	0,00
Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	10.991.500,00	6.850.000,00	60,46	4.141.500,00
Perkakas Bengkel Listrik	162.085.000,00	100.585.000,00	61,14	61.500.000,00
Perkakas Bengkel Service	415.972.000,00	415.972.000,00	0,00	0,00
Perkakas Bengkel Kayu	666.979.424,00	491.279.424,00	35,76	175.700.000,00
Perkakas Bengkel Khusus	14.302.500,00	14.302.500,00	0,00	0,00
Peralatan Las	41.049.000,00	41.049.000,00	0,00	0,00
Perkakas Pabrik Es	104.353.500,00	104.353.500,00	0,00	0,00
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00

1.3.02.03.02 *Alat Bengkel Tak Bermesin*

Alat Bengkel Tak Bermesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp462.764.517,54 dan Rp449.684.717,54, naik senilai 2,91% atau Rp13.079.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Bengkel Tak Bermesin	462.764.517,54	449.684.717,54	2,91	13.079.800,00
Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00
Perkakas Bengkel Listrik	5.177.500,00	5.177.500,00	0,00	0,00
Perkakas Bengkel Service	60.991.355,54	60.991.355,54	0,00	0,00
Perkakas Standard (Standard Tools)	195.434.088,00	195.434.088,00	0,00	0,00
Perkakas Khusus (Special Tools)	11.938.539,00	11.938.539,00	0,00	0,00
Perkakas Bengkel Kerja	57.516.500,00	57.516.500,00	0,00	0,00
Peralatan Tukang Besi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Peralatan Tukang Kayu	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00
Peralatan Tukang Kayu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	29.016.900,00	25.637.100,00	13,18	3.379.800,00
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	23.783.385,00	14.083.385,00	68,88	9.700.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	34.781.250,00	34.781.250,00	0,00	0,00

1.3.02.03.03 *Alat Ukur*

Alat Ukur Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp4.146.951.856,76 dan Rp4.056.460.356,76, naik senilai 2,23% atau Rp90.491.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Ukur	4.146.951.856,76	4.056.460.356,76	2,23	90.491.500,00
Alat Ukur Universal	440.543.832,14	440.543.832,14	0,00	0,00
Alat Kalibrasi	453.450.000,00	453.450.000,00	0,00	0,00
Universal Tester	545.066.858,00	545.066.858,00	0,00	0,00
Alat Ukur/Pembanding	517.778.792,89	515.778.792,89	0,39	2.000.000,00
Alat Ukur Lain-Lain	690.432.000,00	690.432.000,00	0,00	0,00
Alat Timbangan/Biara	209.076.373,73	201.321.873,73	3,85	7.754.500,00
Anak Timbangan/Biara	78.860.000,00	78.860.000,00	0,00	0,00
Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.059.217.500,00	1.059.217.500,00	0,00	0,00
Alat Pengukur Keadaan Alam	70.397.000,00	65.917.000,00	6,80	4.480.000,00
Alat Pengukur Penglihatan	3.372.500,00	3.372.500,00	0,00	0,00
Alat Ukur Lainnya	78.757.000,00	2.500.000,00	3.050,28	76.257.000,00

1.3.02.04 *Alat Pertanian*

Saldo Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan masing-masing senilai Rp8.423.599.094,42 dan Rp8.000.227.797,42, naik senilai 5,29% atau Rp423.371.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Pengolahan	8.423.599.094,42	8.000.227.797,42	5,29	423.371.297,00
Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	0,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	504.567.400,00	504.567.400,00	0,00	0,00
Alat Panen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.338.282.587,40	2.225.614.290,40		112.668.297,00
Alat Laboratorium Pertanian	2.030.406.217,00	1.962.406.217,00	3,47	68.000.000,00
Alat Prosesing	214.515.000,00	206.015.000,00	4,13	8.500.000,00
Alat Pasca Panen	114.700.000,00	114.700.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi Perikanan	336.634.000,00	261.938.000,00	28,52	74.696.000,00
Alat-Alat Peternakan	2.642.406.890,02	2.642.406.890,02	0,00	0,00
Alat Pengolahan Lainnya	224.077.000,00	64.570.000,00	247,03	159.507.000,00

1.3.02.05 *Alat Kantor dan Rumah Tangga*

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga masing-masing senilai Rp167.874.322.810,13 dan Rp155.786.703.652,13, naik senilai 7,76% atau Rp12.087.619.158,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	167.874.322.810,13	155.786.703.652,13	7,76	12.087.619.158,00
Alat Kantor	44.358.626.832,92	41.051.759.828,92	8,06	3.306.867.004,00
Alat Rumah Tangga	111.578.904.709,69	103.892.149.500,69	7,40	7.686.755.209,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.936.791.267,52	10.842.794.322,52	10,09	1.093.996.945,00

1.3.02.05.01 *Alat Kantor*

Saldo Alat Kantor masing-masing senilai Rp44.358.626.832,92 dan Rp41.051.759.828,92, naik senilai 5,15% atau Rp3.361.941.373,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kantor	44.358.626.832,92	41.051.759.828,92	8,06	3.306.867.004,00
Mesin Ketik	731.002.689,00	736.402.689,00	(0,73)	(5.400.000,00)
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	640.418.200,00	617.948.200,00	3,64	22.470.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	523.529.936,00	500.529.936,00	4,60	23.000.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.194.547.020,74	16.166.073.328,74	6,36	1.028.473.692,00
Alat Kantor Lainnya	25.269.128.987,18	23.030.805.675,18	9,72	2.238.323.312,00

1.3.02.05.02 *Alat Rumah Tangga*

Saldo Alat Rumah Tangga masing-masing senilai Rp111.578.904.709,69 dan Rp103.892.149.500,69, naik senilai 7,40% atau Rp7.686.755.209,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Rumah Tangga	111.578.904.709,69	103.892.149.500,69	7,40	7.686.755.209,00
Meubelair	57.757.107.442,66	53.180.429.079,66	8,61	4.576.678.363,00
Alat Pengukur Waktu	248.001.984,00	246.251.984,00	0,71	1.750.000,00
Alat Pembersih	1.381.330.147,00	1.254.031.633,00	10,15	127.298.514,00
Alat Pendingin	18.961.558.632,76	18.062.463.743,76	4,98	899.094.889,00
Alat Dapur	1.194.869.586,53	1.145.170.111,53	4,34	49.699.475,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.039.966.536,63	28.051.301.568,63	7,09	1.988.664.968,00
Alat Pemadam Kebakaran	1.996.070.380,12	1.952.501.380,12	2,23	43.569.000,00

1.3.02.05.03 *Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat*

Saldo Alat Rumah Tangga masing-masing senilai Rp11.936.791.267,52 dan Rp10.842.794.322,52, naik senilai 10,09% atau Rp1.093.996.945,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.936.791.267,52	10.842.794.322,52	10,09	1.093.996.945,00
Meja Kerja Pejabat	4.084.135.708,63	3.750.352.558,63	8,90	333.783.150,00
Meja Rapat Pejabat	1.268.190.885,44	1.085.521.365,44	16,83	182.669.520,00
Kursi Kerja Pejabat	2.674.346.821,40	2.441.341.542,40	9,54	233.005.279,00
Kursi Rapat Pejabat	768.201.170,00	719.825.170,00	6,72	48.376.000,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	199.666.228,54	199.666.228,54	0,00	0,00
Kursi Tamu Di Ruangannya Pejabat	728.896.785,38	584.708.785,38	24,66	144.188.000,00
Lemari Dan Arsip Pejabat	2.213.353.668,13	2.061.378.672,13	7,37	151.974.996,00

1.3.02.06 *Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar masing-masing senilai Rp17.507.067.825,01 dan Rp16.871.206.025,01, naik senilai 3,77% atau Rp635.861.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.507.067.825,01	16.871.206.025,01	3,77	635.861.800,00
Alat Studio	10.007.220.775,45	9.436.351.975,45	6,05	570.868.800,00
Alat Komunikasi	6.008.658.608,70	5.943.665.608,70	1,09	64.993.000,00
Peralatan Pemancar	1.491.188.440,86	1.491.188.440,86	0,00	0,00

1.3.02.06.01 *Alat Studio*

Saldo Alat Studio masing-masing senilai Rp10.007.220.775,45 dan Rp9.436.351.975,45, naik senilai 6,05% atau Rp570.868.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Studio	10.007.220.775,45	9.436.351.975,45	6,05	570.868.800,00
Peralatan Studio Audio	5.008.254.963,14	4.813.510.963,14	4,05	194.744.000,00
Peralatan Studio Video Dan Film	4.599.710.562,31	4.264.195.762,31	7,87	335.514.800,00
Peralatan Cetak	172.445.000,00	172.445.000,00	0,00	0,00
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	103.024.250,00	99.874.250,00	3,15	3.150.000,00
Alat Studio Lainnya	123.786.000,00	86.326.000,00	43,39	37.460.000,00

1.3.02.06.02 *Alat Komunikasi*

Saldo Alat Komunikasi masing-masing senilai Rp6.008.658.608,70 dan Rp5.943.665.608,70, naik senilai 1,09% atau Rp64.993.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Komunikasi	6.008.658.608,70	5.943.665.608,70	1,09	64.993.000,00
Alat Komunikasi Telephone	3.233.546.107,24	3.199.553.107,24	1,06	33.993.000,00
Alat Komunikasi Radio SSB	241.084.000,00	241.084.000,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	114.688.000,00	114.688.000,00		0,00
Alat Komunikasi Radio VHF	110.470.000,00	101.470.000,00		9.000.000,00
Alat Komunikasi Radio UHF	71.115.000,00	71.115.000,00		0,00
Alat Komunikasi Sosial	740.885.001,46	736.885.001,46	0,54	4.000.000,00
Alat-Alat Sandi	155.750.500,00	155.750.500,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Alat Komunikasi Lainnya	1.323.120.000,00	1.323.120.000,00	0,00	0,00

1.3.02.06.03 *Peralatan Pemancar*

Saldo Peralatan Pemancar tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak terdapat penambahan maupun pengurangan, yaitu senilai Rp1.491.188.440,86 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan Pemancar	1.491.188.440,86	1.491.188.440,86	0,00	0,00
Peralatan Pemancar Vhf/Fm	533.020.000,00	533.020.000,00	0,00	0,00
Peralatan Pemancar Uhf	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	0,00
Peralatan Antena Vhf/Fm	7.247.500,00	7.247.500,00	0,00	0,00
Peralatan Antena Uhf	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
Peeralatan Antena Shf/Parabola	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Switcher Antena	69.700.196,99	69.700.196,99	0,00	0,00
Switcher/Menara Antena	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00
Humidity Control	88.820.302,87	88.820.302,87	0,00	0,00
Program Input Equipment	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00
Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
Peralatan Perlengkapan Radio	5.769.000,00	5.769.000,00	0,00	0,00
Sumber Tenaga	664.697.441,00	664.697.441,00	0,00	0,00

1.3.02.07 *Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan masing-masing senilai Rp351.936.768.230,88 dan Rp277.228.910.006,88, naik senilai 26,95% atau Rp74.707.858.224,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	351.936.768.230,88	277.228.910.006,88	26,95	74.707.858.224,00
Alat Kedokteran	325.394.789.552,99	256.954.771.656,99	26,64	68.440.017.896,00
Alat Kesehatan Umum	26.541.978.677,90	20.274.138.349,90	30,92	6.267.840.328,00

1.3.02.07.01 *Alat Kedokteran*

Saldo Alat Kedokteran masing-masing senilai Rp325.394.789.552,99 dan Rp256.954.771.656,99, naik senilai 26,64% atau Rp68.440.017.896,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kedokteran	325.394.789.552,99	256.954.771.656,99	26,64	68.440.017.896,00
Alat Kedokteran Umum	95.273.324.881,79	91.325.128.418,79	4,32	3.948.196.463,00
Alat Kedokteran Gigi	4.805.926.600,76	4.804.128.600,76	0,04	1.798.000,00
Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.044.738.084,36	1.044.738.084,36	0,00	0,00
Alat Kedokteran Bedah	36.581.687.993,49	27.687.021.776,49	32,13	8.894.666.217,00
Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	9.679.917.851,65	4.860.120.152,65	99,17	4.819.797.699,00
Alat Kedokteran Tht	3.151.611.934,69	620.882.516,69	407,60	2.530.729.418,00
Alat Kedokteran Mata	3.674.084.570,00	996.772.640,00	268,60	2.677.311.930,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	25.670.017.707,71	25.468.979.273,71	0,79	201.038.434,00
Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	1.888.091.000,00	1.888.091.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran Anak	1.924.968.043,00	1.421.083.043,00	35,46	503.885.000,00
Alat Kedokteran Poliklinik	531.274.078,23	531.274.078,23	0,00	0,00
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.737.496.873,00	2.814.496.873,00	32,79	923.000.000,00
Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	20.936.147.198,78	19.945.813.871,78	4,97	990.333.327,00
Alat Kedokteran Jantung	22.854.813.532,90	7.501.936.532,90	204,65	15.352.877.000,00
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	47.035.659.640,54	28.118.286.640,54	67,28	18.917.373.000,00
Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	57.725.680,00	0,00	0,00	57.725.680,00
Alat Kedokteran Radioterapy	170.370.218,65	170.370.218,65	0,00	0,00
Alat Kedokteran Nuklir	2.960.436.055,64	2.947.241.055,64	0,45	13.195.000,00
Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	1.699.890.567,66	1.681.710.367,66	1,08	18.180.200,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	20.709.342.461,13	20.000.992.461,13	3,54	708.350.000,00
Alat Kedokteran Jiwa	1.411.356.000,00	1.411.356.000,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran I C U	1.143.706.500,00	0,00	0,00	1.143.706.500,00
Alat Kedokteran Bedah Jantung	89.876.524,00	89.876.524,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran Lainnya	18.362.325.555,00	11.624.471.527,00	57,96	6.737.854.028,00

1.3.02.07.02 Alat Kesehatan Umum

Saldo Alat Kesehatan Umum masing-masing senilai Rp26.541.978.677,90 dan Rp20.274.138.349,90, naik senilai 30,92% atau Rp6.267.840.328,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kesehatan Umum	26.541.978.677,90	20.274.138.349,90	30,92	6.267.840.328,00
Alat Kesehatan Matra Laut	62.370.000,00	62.370.000,00	0,00	0,00
Alat Kesehatan Matra Udara	4.534.604.271,90	4.534.604.271,90	0,00	0,00
Alat Kesehatan Kepolisian	203.101.445,00	203.101.445,00	0,00	0,00
Alat Kesehatan Olah Raga	216.471.000,00	213.750.000,00	1,27	2.721.000,00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	21.525.431.961,00	15.260.312.633,00	41,05	6.265.119.328,00

1.3.02.08 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium masing-masing senilai Rp103.333.267.113,17 dan Rp101.640.151.952,17, naik senilai 1,67% atau Rp1.693.115.161,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Laboratorium	103.333.267.113,17	101.640.151.952,17	1,67	1.693.115.161,00
Unit Alat Laboratorium	24.349.470.794,47	23.085.703.596,47	5,47	1.263.767.198,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	429.680.106,34	429.680.106,34	0,00	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	11.952.375.083,33	11.848.896.630,33	0,87	103.478.453,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	720.565.642,00	647.668.132,00	11,26	72.897.510,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	60.750.131.109,80	60.750.131.109,80	0,00	0,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	19.707.594,29	19.707.594,29	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.922.838.499,41	1.878.058.499,41	2,38	44.780.000,00
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	1.685.998.041,00	1.677.498.041,00	0,51	8.500.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.502.500.242,54	1.302.808.242,54	15,33	199.692.000,00

1.3.02.08.01 Unit Alat Laboratorium

Saldo Unit Alat Laboratorium masing-masing senilai Rp24.349.470.794,47 dan Rp23.085.703.596,47, naik senilai 5,47% atau Rp1.263.767.198,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Unit Alat Laboratorium	24.349.470.794,47	23.085.703.596,47	5,47	1.263.767.198,00
Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	107.840.000,00	107.840.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	98.698.000,00	98.698.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Hidrokimia	21.021.350,00	21.021.350,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Model Hidrolika	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Batuan/Geologi	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	18.255.800,00	18.255.800,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	111.669.342,00	111.669.342,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	76.261.000,00	76.261.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	679.461.080,00	679.461.080,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Umum	7.892.793.515,38	7.625.497.816,38	3,51	267.295.699,00
Alat Laboratorium Microbiologi	461.865.092,00	431.565.092,00	7,02	30.300.000,00
Alat Laboratorium Kimia	1.004.638.854,87	1.000.138.854,87	0,45	4.500.000,00
Alat Laboratorium Patologi	2.231.114.707,05	2.223.514.707,05	0,34	7.600.000,00
Alat Laboratorium Immunologi	41.408.000,00	41.408.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Hematologi	105.095.938,77	79.786.438,77	31,72	25.309.500,00
Alat Laboratorium Film	348.284.276,00	334.284.276,00	4,19	14.000.000,00
Alat Laboratorium Makanan	430.585.227,56	428.463.227,56	0,50	2.122.000,00
Alat Laboratorium Farmasi	194.181.800,00	194.181.800,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Fisika	19.539.500,00	19.539.500,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Peleburan	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Pasir	161.672.500,00	161.672.500,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Pembuatan Pola	7.000.000,00	4.500.000,00	55,56	2.500.000,00
Alat Laboratorium Metalography	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	313.395.779,31	313.395.779,31	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	51.491.000,00	47.341.000,00	8,77	4.150.000,00
Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Pertanian	2.521.969.747,00	2.011.979.747,00	25,35	509.990.000,00
Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	44.182.118,80	44.182.118,80	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Biologi Perairan	4.564.000,00	4.564.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Biologi	55.179.000,00	55.179.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Geofisika	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Tambang	11.733.476,68	11.733.476,68	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	296.411.434,00	296.411.434,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Proses Industri	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00
Laboratorium Kearsipan	29.128.259,56	29.128.259,56	0,00	0,00
Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	2.673.604.185,38	2.673.604.185,38	0,00	0,00
Alat Laboratorium Lain	4.242.878.810,11	3.857.378.811,11	9,99	385.499.999,00
Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Alat Pengukur Gelombang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

1.3.02.08.02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp429.680.106,34 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	429.680.106,34	429.680.106,34	0,00	0,00
<i>Analytical Instrument</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
<i>General Laboratory Tool</i>	19.308.463,70	19.308.463,70	0,00	0,00
<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
<i>Laboratory Safety Equipment</i>	390.851.642,64	390.851.642,64	0,00	0,00

1.3.02.08.03 Alat Peraga Praktek Sekolah

Saldo Alat Peraga Praktek Sekolah masing-masing senilai Rp11.952.375.083,33 dan Rp11.848.896.630,33, naik senilai 0,87% atau Rp103.478.453,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Peraga Praktik Sekolah	11.952.375.083,33	11.848.896.630,33	0,87	103.478.453,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.129.255.388,00	1.127.255.388,00	0,18	2.000.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	1.963.397.148,00	1.945.082.295,00	0,94	18.314.853,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	1.385.902.274,00	1.384.457.274,00	0,10	1.445.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	1.342.605.941,41	1.340.619.341,41	0,15	1.986.600,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	597.029.266,42	567.859.266,42	5,14	29.170.000,00

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	66.067.025,00	64.067.025,00	3,12	2.000.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	708.637.359,00	708.637.359,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	171.951.850,00	171.951.850,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	2.352.444.401,69	2.310.022.401,69	1,84	42.422.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2.020.033.199,80	2.017.393.199,80	0,13	2.640.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	128.465.000,00	124.965.000,00	2,80	3.500.000,00
Alat Peraga Kejuruan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	28.486.230,00	28.486.230,00	0,00	0,00

1.3.02.08.04 *Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika*

Saldo Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika masing-masing senilai Rp720.565.642,00 dan Rp647.668.132,00, naik senilai 11,26% atau Rp72.897.510,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	720.565.642,00	647.668.132,00	11,26	72.897.510,00
<i>Radiation Detector</i>	53.819.000,00	53.819.000,00	0,00	0,00
<i>Modular Counting And Scientific Electronic</i>	166.118.885,00	96.041.085,00	72,97	70.077.800,00
<i>Assembly/Counting System</i>	28.216.900,00	28.216.900,00	0,00	0,00
<i>Recorder Display</i>	264.983.647,00	264.983.647,00	0,00	0,00
<i>System/Power Supply</i>	167.481.500,00	165.913.500,00	0,95	1.568.000,00
<i>Measuring/Testing Device</i>	39.945.710,00	38.694.000,00	3,23	1.251.710,00

1.3.02.08.05 *Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan*

Saldo Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp60.750.131.109,80 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	60.750.131.109,80	60.750.131.109,80	0,00	0,00
Alat Ukur Fisika Kesehatan	50.613.756,34	50.613.756,34	0,00	0,00
Alat Kesehatan Kerja	59.566.267.353,44	59.566.267.353,44	0,00	0,00
Proteksi Lingkungan	1.133.250.000,02	1.133.250.000,02	0,00	0,00

1.3.02.08.06 *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya*

Saldo *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya* Tahun 2023 sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023, yaitu senilai Rp19.707.594,29 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	19.707.594,29	19.707.594,29	0,00	0,00
Radiation Application Equipment	8.776.969,71	8.776.969,71	0,00	0,00
Non Destructive Test (Ndt) Device	4.814.924,58	4.814.924,58	0,00	0,00
Peralatan Hidrologi	6.115.700,00	6.115.700,00	0,00	0,00

1.3.02.08.07 *Alat Laboratorium Lingkungan Hidup*

Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.922.838.499,41 dan Rp1.878.058.499,41, naik senilai 2,38% atau Rp44.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.922.838.499,41	1.878.058.499,41	2,38	44.780.000,00
Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	208.848.749,00	208.848.749,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	722.327.321,42	722.327.321,42	0,00	0,00
Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	40.918.750,43	40.918.750,43	0,00	0,00
Laboratorium Lingkungan	865.423.678,56	865.423.678,56	0,00	0,00
Alat Laboratorium Penunjang	85.320.000,00	40.540.000,00	110,46	44.780.000,00

1.3.02.08.08 *Peralatan Laboratorium Hydrodinamica*

Saldo Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* masing-masing senilai Rp1.685.998.041,00 dan Rp1.677.498.041,00, naik senilai 0,51% atau Rp8.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.685.998.041,00	1.677.498.041,00	0,51	8.500.000,00
Data Acquisition And Analyzing System	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	0,00
Cavitation Tunnel	63.491.375,00	63.491.375,00	0,00	0,00
Peralatan Umum	44.398.333,00	37.398.333,00	18,72	7.000.000,00
Pemesinan : Model Ship Workshop	1.431.309.000,00	1.431.309.000,00	0,00	0,00
Mob	15.771.000,00	15.771.000,00	0,00	0,00
Photo And Film Equipment	57.348.333,00	55.848.333,00	2,69	1.500.000,00

1.3.02.08.09 *Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi*

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.502.500.242,54 dan Rp1.302.808.242,54, naik senilai 15,33% atau Rp199.692.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan / (Penurunan)
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.502.500.242,54	1.302.808.242,54	15,33	199.692.000,00
Alat Laboratorium Standard dan Kalibrator	11.037.118,00	11.037.118,00	0,00	0,00

Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	249.654.524,54	249.654.524,54	0,00	0,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	1.241.808.600,00	1.042.116.600,00	19,16	199.692.000,00

1.3.02.09 Alat Persenjataan

Saldo Alat Persenjataan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.674.418.279,71 dan Rp1.559.889.990,71, naik senilai 7,34% atau Rp114.528.289,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Persenjataan	1.674.418.279,71	1.559.889.990,71	7,34	114.528.289,00
Senjata Api	21.597.740,70	20.797.740,70	3,85	800.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	1.016.163.790,01	1.015.259.500,01	0,09	904.290,00
Alat Khusus Kepolisian	636.656.749,00	523.832.750,00	21,54	112.823.999,00

1.3.02.09.01 Senjata Api

Saldo Senjata Api Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp21.597.740,70 dan Rp20.797.740,70, naik senilai 3,85% atau Rp800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Senjata Api	21.597.740,70	20.797.740,70	3,85	800.000,00
Senapan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Senjata Lain-Lain	17.597.740,70	16.797.740,70	4,76	800.000,00

1.3.02.09.02 Persenjataan Non Senjata Api

Saldo Persenjataan Non Senjata Api Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 1.016.163.790,01 dan 1.015.259.500,01, naik senilai 0,09% atau Rp904.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Persenjataan Non Senjata Api	1.016.163.790,01	1.015.259.500,01	0,09	904.290,00
Alat Keamanan	367.917.290,00	367.013.000,00	0,25	904.290,00
Non Senjata Api	30.746.500,01	30.746.500,01	0,00	0,00
Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	439.250.000,00	439.250.000,00	0,00	0,00
Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	178.250.000,00	178.250.000,00	0,00	0,00

1.3.02.09.02 Alat Khusus Kepolisian

Saldo Alat Khusus Kepolisian Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 636.656.749,00 dan 523.832.750,00, naik senilai 21,54% atau 112.823.999,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Khusus Kepolisian	636.656.749,00	523.832.750,00	21,54	112.823.999,00
Alat Dalmas/Alat Dakhura	257.647.999,00	201.324.000,00	27,98	56.323.999,00
Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
Peralatan Deteksi Intel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Alsus Lantas	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	0,00
Alsus Fotografi Kepolisian	130.938.000,00	81.188.000,00	61,28	49.750.000,00
Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	190.695.750,00	183.945.750,00	3,67	6.750.000,00

1.3.02.10 *Komputer*

Saldo Komputer masing-masing senilai 87.974.364.510,37 dan 80.561.879.439,69, naik senilai 9,20% atau 7.412.485.070,68 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Komputer	87.974.364.510,37	80.561.879.439,69	9,20	7.412.485.070,68
Komputer Unit	63.740.488.856,66	57.986.119.462,66	9,92	5.754.369.394,00
Peralatan Komputer	24.233.875.653,71	22.575.759.977,03	7,34	1.658.115.676,68

1.3.02.10.01 *Komputer Unit*

Saldo Komputer Unit masing-masing senilai 63.740.488.856,66 dan 57.986.119.462,66, naik senilai 9,92% atau 5.754.369.394,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Komputer Unit	63.740.488.856,66	57.986.119.462,66	9,92	5.754.369.394,00
Komputer Jaringan	2.245.577.388,87	2.055.577.388,87	9,24	190.000.000,00
Personal Komputer	60.520.437.029,79	55.266.917.635,79	9,51	5.253.519.394,00
Komputer Unit Lainnya	974.474.438,00	663.624.438,00	46,84	310.850.000,00

1.3.02.10.02 *Peralatan Komputer*

Saldo Peralatan Komputer masing-masing senilai 24.233.875.653,71 dan 22.575.759.977,03, naik senilai 7,34% atau 1.658.115.676,68 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan Komputer	24.233.875.653,71	22.575.759.977,03	7,34	1.658.115.676,68
Peralatan <i>Mainframe</i>	1.503.303.213,49	1.456.973.213,49	3,18	46.330.000,00
Peralatan <i>Mini Computer</i>	2.194.862.280,94	2.167.385.281,26	1,27	27.476.999,68
Peralatan <i>Personal Computer</i>	13.871.224.096,57	12.719.695.799,57	9,05	1.151.528.297,00
Peralatan Jaringan	6.415.337.576,71	6.086.587.146,71	5,40	328.750.430,00
Peralatan Komputer Lainnya	249.148.486,00	145.118.536,00	71,69	104.029.950,00

1.3.02.12 *Alat Pengeboran*

Saldo Alat Pengeboran Tahun 2023 berupa Alat Pengeboran Non Mesin yaitu senilai Rp3.000.000,00.

1.3.02.13 *Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian*

Saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian masing-masing senilai 310.022.500,00 dan 160.172.500,00, naik senilai 93,56% atau Rp149.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	310.022.500,00	160.172.500,00	93,56	149.850.000,00
Sumur	289.850.000,00	140.000.000,00	107,04	149.850.000,00
Produksi	14.052.500,00	14.052.500,00	0,00	0,00
Pengolahan Dan Pemurnian	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00

1.3.02.13.01 *Sumur*

Saldo Sumur masing-masing senilai Rp289.850.000,00 dan Rp140.000.000,00, naik senilai 107,04% atau Rp149.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Sumur	289.850.000,00	140.000.000,00	107,04	149.850.000,00
Sumur Pemboran	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
Sumur Lainnya	149.850.000,00	0,00	0,00	149.850.000,00

1.3.02.13.02 *Produksi*

Saldo Produksi Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp14.052.500,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023.

1.3.02.13.02 *Pengolahan dan Pemurnian*

Saldo Pengolahan Dan Pemurnian Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp6.120.000,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023.

1.3.02.14 *Alat Bantu Eksplorasi*

Saldo Alat Bantu Eksplorasi berupa Alat Bantu Produksi Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp12.900.000,00.

1.3.02.15 *Alat Keselamatan Kerja*

Saldo Alat Keselamatan Kerja masing-masing senilai Rp2.242.916.646,04 dan Rp1.738.056.015,04, naik senilai 29,05% atau Rp504.860.631,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Keselamatan Kerja	2.242.916.646,04	1.738.056.015,04	29,05	504.860.631,00
Alat Pelindung	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Alat Sar	1.350.318.450,04	1.287.218.450,04	4,90	63.100.000,00
Alat Kerja Penerbangan	890.598.196,00	449.837.565,00	97,98	440.760.631,00

1.3.02.15.02 *Alat Pelindung*

Saldo Alat Pelindung berupa Baju Pengaman masing-masing senilai Rp2.000.000,00 dan Rp1.000.000,00, naik senilai 100,00% atau Rp1.000.000,00

1.3.02.15.03 *Alat SAR*

Saldo Alat SAR masing-masing senilai Rp1.350.318.450,04 dan Rp1.287.218.450,04, naik senilai 4,90% atau Rp63.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Sar	1.350.318.450,04	1.287.218.450,04	4,90	63.100.000,00
Alat Pendukung Pencarian	1.062.913.450,04	1.029.813.450,04	3,21	33.100.000,00
Alat Kerja Bawah Air	257.405.000,00	257.405.000,00	0,00	0,00
Alat Sar Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

1.3.02.15.04 *Alat Kerja Penerbangan*

Saldo Alat Kerja Penerbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp890.598.196,00 dan Rp449.837.565,00, naik senilai 97,98% atau Rp440.761.631,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Kerja Penerbangan	890.598.196,00	449.837.565,00	97,98	440.760.631,00
Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	167.827.150,00	137.627.150,00	21,94	30.200.000,00
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	712.357.686,00	312.210.415,00	128,17	400.147.271,00
Alat Ukur Peralatan Faspelkrik	10.413.360,00	0,00	0,00	10.413.360,00

1.3.02.16 *Alat Peraga*

Saldo Alat Peraga berupa Alat Peraga Pelatihan Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak terdapat penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp3.138.340,00.

1.3.02.17 *Peralatan Proses/Produksi*

Saldo Peralatan Proses/Produksi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp67.286.768,00 dan Rp58.286.768,00, naik senilai 15,44% atau Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan Proses/Produksi	67.286.768,00	58.286.768,00	15,44	9.000.000,00
<i>Transport And Storage Equipment For Liquid</i>	62.828.193,00	53.828.193,00	16,72	9.000.000,00
<i>Heat Generating Equipment</i>	2.533.575,00	2.533.575,00	0,00	0,00
<i>Heat Transfer Equipment</i>	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00

1.3.02.18 *Rambu-rambu*

Saldo Rambu-rambu masing-masing senilai Rp11.713.479.329,51 dan Rp9.914.681.112,51, naik senilai 18,14% atau Rp1.798.798.217,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Rambu-rambu	11.713.479.329,51	9.914.681.112,51	18,14	1.798.798.217,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	11.699.279.329,51	9.900.481.112,51	18,17	1.798.798.217,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00

1.3.02.18.01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat

Saldo Rambu-rambu Lalu Lintas Darat masing-masing senilai Rp11.699.279.329,51 dan Rp9.900.481.112,51, naik senilai 18,17% atau Rp1.798.798.217,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	11.699.279.329,51	9.900.481.112,51	18,17	1.798.798.217,00
Rambu Bersuar	8.879.080.348,90	7.189.312.792,90	23,50	1.689.767.556,00
Rambu Tidak Bersuar	2.403.072.319,61	2.403.072.319,61	0,00	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	417.126.661,00	308.096.000,00	35,39	109.030.661,00

1.3.02.18.02 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara

Saldo Rambu-rambu Lalu Lintas Udara berupa *Flood Lights* Tahun 2023 dan 2022 masih sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp14.200.000,00.

1.3.02.19 Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp796.535.575,62 dan Rp712.035.575,62, turun senilai 11,87% atau Rp84.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan Olahraga	796.535.575,62	712.035.575,62	11,87	84.500.000,00
Peralatan Permainan	310.492.945,62	225.992.945,62	37,39	84.500.000,00
Peralatan Senam	148.210.500,00	148.210.500,00	0,00	0,00
Peralatan Olah Raga Lainnya	337.832.130,00	337.832.130,00	0,00	0,00

1.3.03 Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.221.838.466.235,75 dan Rp1.155.983.738.425,43 naik senilai Rp65.854.727.810,32 atau 5,70% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Gedung dan Bangunan	1.221.838.466.235,75	1.155.983.738.425,43	5,70	65.854.727.810,32
Bangunan Gedung	1.156.890.296.177,55	1.093.672.406.207,09	5,82	63.624.688.970,04
Monumen	38.845.268.542,55	39.934.153.701,21	(2,73)	(1.088.885.158,66)
Bangunan Menara	595.926.000,00	595.926.000,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.506.975.516,07	21.781.252.517,12	17,11	3.725.722.998,95

Mutasi aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
Saldo Awal	1.155.983.738.425,43	
Belanja Modal LRA	68.940.565.477,00	
Mutasi Tambah dari Beban Pegawai	4.250.000,00	
Mutasi Tambah dari Beban Barjas	550.007.585,00	
Mutasi Tambah dari Ekstrakomptabel	19.720.000,00	
Mutasi Antar Akun dari KDP	551.517.000,00	
Mutasi ke Ekstrakomptabel		98.420.000,26
Mutasi Kurang ke Barang dan Jasa		466.685.000,00
Mutasi Antar Akun ke Peralatan dan Mesin		1.150.678.201,00
Mutasi Antar Akun ke JIJ		12.925.600,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Tetap Lainnya		1.243.471.000,00
Mutasi Antar Akun ke KDP		536.454.450,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Lainnya (Kurvol)		630.198.000,00
Mutasi Kurang Hibah		72.500.000,00
Koreksi Pembulatan		0,42
JUMLAH MUTASI	70.066.060.062,00	4.211.332.251,21
TOTAL ASET GEDUNG DAN BANGUNAN		1.221.838.466.235,75

1.3.03.01 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.156.890.296.177,55 dan Rp1.093.672.406.207,09, naik senilai 5,78% atau Rp63.217.889.970,46 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Gedung	1.156.890.296.177,55	1.093.672.406.207,09	5,78	63.217.889.970,46
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.128.677.920.576,16	1.067.564.191.253,70	5,72	61.113.729.322,46
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.212.375.601,39	26.108.214.953,39	8,06	2.104.160.648,00

1.3.03.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.128.677.920.576,16 dan Rp1.067.564.191.253,70, naik senilai 5,72% atau Rp61.113.729.322,46 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.128.677.920.576,16	1.067.564.191.253,70	5,72	61.113.729.322,46
Bangunan Gedung Kantor	239.249.574.882,90	224.501.395.432,51	6,57	14.748.179.450,39
Bangunan Gudang	13.404.556.043,87	13.270.299.043,87	1,01	134.257.000,00
Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	19.949.000,00	19.949.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Instalasi	1.662.543.464,80	1.662.543.464,80	0,00	0,00
Bangunan Gedung Laboratorium	8.308.807.945,00	5.289.024.945,00	57,10	3.019.783.000,00
Bangunan Kesehatan	209.651.112.224,00	204.286.755.213,00	2,63	5.364.357.011,00
Bangunan Oceanarium/Observatorium	97.629.000,00	97.629.000,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.246.757.700,00	5.931.045.700,00	5,32	315.712.000,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.369.332.131,61	22.224.909.551,61	32,15	7.144.422.580,00

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	183.845.267.212,88	179.281.004.212,88	2,55	4.564.263.000,00
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	8.155.137.148,82	8.067.525.148,82	1,09	87.612.000,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	312.768.434.936,76	309.799.725.936,34	0,96	2.968.709.000,42
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	2.895.424.773,69	2.752.027.773,69	5,21	143.397.000,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.302.480.674,00	3.252.600.674,00	1,53	49.880.000,00
Bangunan Gedung Pemotong Hewan	6.441.829.860,18	6.441.829.860,18	0,00	0,00
Bangunan Gedung Perpustakaan	19.809.372.422,07	9.646.675.506,07	105,35	10.162.696.916,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	767.357.657,00	767.357.657,00	0,00	0,00
Bangunan Pengujian Kelaikan	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00
Bangunan Terbuka	29.780.000,00	29.780.000,00	0,00	0,00
Bangunan Industri	1.191.402.000,00	0,00	0,00	1.191.402.000,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	484.007.600,00	484.007.600,00	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.515.243.510,40	51.489.194.308,44	3,93	2.026.049.201,96
Bangunan Fasilitas Umum	6.398.029.906,00	3.556.639.065,96	79,89	2.841.390.840,04
Bangunan Parkir	417.282.837,00	320.851.000,00	30,06	96.431.837,00
Bangunan Stasiun Bus	409.277.500,00	409.277.500,00	0,00	0,00
Taman	10.061.984.543,49	5.486.398.137,68	83,40	4.575.586.405,81
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.980.445.601,69	8.300.845.521,86	20,23	1.679.600.079,83

1.3.03.01.02 *Bangunan Gedung Tempat Tinggal*

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp28.212.375.601,39 dan Rp26.108.214.953,39, naik senilai 8,06% atau Rp2.104.160.648,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.212.375.601,39	26.108.214.953,39	8,06	2.104.160.648,00
Rumah Negara Golongan I	18.047.073.661,60	18.047.073.661,60	0,00	0,00
Rumah Negara Golongan Ii	354.071.000,00	354.071.000,00	0,00	0,00
Rumah Negara Golongan Iii	6.606.132.110,00	6.606.132.110,00	0,00	0,00
Flat/Rumah Susun	703.470.181,79	703.470.181,79	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.501.628.648,00	397.468.000,00	529,39	2.104.160.648,00

1.3.03.02 *Monumen*

Saldo Monumen Tahun 2023 dan 2022 yaitu senilai Rp38.845.268.542,55 dan Rp39.934.153.701,21, turun senilai 2,73% atau Rp1.088.885.158,66 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Monumen	38.845.268.542,55	39.934.153.701,21	(2,73)	(1.088.885.158,66)
Tugu	18.661.229.138,99	19.750.114.297,65	(5,51)	(1.088.885.158,66)
Bangunan Peninggalan	4.879.168.500,00	4.879.168.500,00	0,00	0,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	15.304.870.903,56	15.304.870.903,56	0,00	0,00

1.3.03.03 *Bangunan Menara*

Saldo Bangunan Menara berupa Bangunan Menara Perambuan Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masih sama yaitu senilai Rp595.926.000,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023.

1.3.03.04 *Tugu Titik Kontrol/Pasti*

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp25.506.975.516,07 dan Rp21.781.252.517,12, naik senilai 17,11% atau Rp3.725.722.998,95 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.506.975.516,07	21.781.252.517,12	17,11	3.725.722.998,95
Tugu/Tanda Batas Administrasi	19.696.178.986,99	18.040.064.547,35	9,18	1.656.114.439,65
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	589.192.817,18	336.776.190,00	74,95	252.416.627,18
Pagar	3.094.038.845,13	1.276.846.913,00	142,32	1.817.191.932,13
Tugu/Tanda Batas Lainnya	2.127.564.866,77	2.127.564.866,77	0,00	0,00

1.3.04 *Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.205.477.427.032,08 dan Rp1.134.657.254.831,51 atau meningkat 6,24% senilai Rp70.820.172.200,57 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.477.427.032,08	1.134.657.254.831,51	6,24	70.820.172.200,57
Jalan dan Jembatan	810.960.807.119,48	764.958.144.274,82	6,01	46.002.662.844,66
Bangunan Air	303.223.419.219,55	287.222.814.363,64	5,57	16.000.604.855,91
Instalasi	30.782.346.755,75	22.034.707.755,75	39,70	8.747.639.000,00
Jaringan	60.510.853.937,30	60.441.588.437,30	0,11	69.265.500,00

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
Saldo Awal	1.134.657.254.831,51	
Belanja Modal LRA	71.240.765.500,00	
Mutasi Tambah dari Beban Barjas	2.100.000,00	
Mutasi Antar Akun dari Gedung dan Bangunan	12.925.600,00	
Koreksi Pembulatan	0,57	
Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel		30.221.900,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Lainnya (Kurvul)		405.397.000,00
JUMLAH MUTASI	71.255.791.100,57	435.618.900,00
TOTAL ASET JALAN JARINGAN IRIGASI		1.205.477.427.032,08

1.3.04.01 *Jalan dan Jembatan*

Saldo Jalan dan Jembatan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp810.960.807.119,48 dan Rp764.958.144.274,82, naik senilai 6,01% atau Rp46.002.662.844,66 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jalan dan Jembatan	810.960.807.119,48	764.958.144.274,82	6,01	46.002.662.844,66
Jalan	791.489.146.923,21	747.114.579.703,42	5,94	44.374.567.219,79
Jembatan	19.471.660.196,27	17.843.564.571,40	9,12	1.628.095.624,87

1.3.04.01.01 Jalan

Saldo Jalan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp791.489.146.923,21 dan Rp747.114.579.703,42, naik senilai 5,94% atau Rp46.225.994.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jalan	791.489.146.923,21	747.114.579.703,42	5,94	44.374.567.219,79
Jalan Propinsi	801.049.506,00	801.049.506,00	0,00	0,00
Jalan Kabupaten	547.731.794.436,75	546.779.178.629,41	0,17	952.615.807,35
Jalan Kota	93.329.593.060,81	50.549.915.648,36	84,63	42.779.677.412,44
Jalan Desa	136.750.093.991,71	136.556.298.991,71	0,14	193.795.000,00
Jalan Khusus	5.251.163.407,00	5.251.163.407,00	0,00	0,00
Jalan Lainnya	7.625.452.520,95	7.176.973.520,95	6,25	448.479.000,00

1.3.04.01.01 Jembatan

Saldo Jembatan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp19.471.660.196,27 dan Rp17.843.564.571,40, naik senilai 9,12% atau Rp1.628.095.624,87 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jembatan	19.471.660.196,27	17.843.564.571,40	9,12	1.628.095.624,87
Jembatan Pada Jalan Kabupaten	14.040.387.991,47	15.898.048.165,71	(11,68)	(1.857.660.174,24)
Jembatan Pada Jalan Kota	3.815.244.340,80	329.488.541,69	1.057,93	3.485.755.799,11
Jembatan Pada Jalan Desa	569.435.864,00	569.435.864,00	0,00	0,00
Jembatan Pada Jalan Khusus	212.422.000,00	212.422.000,00	0,00	0,00
Jembatan Penyeberangan	834.170.000,00	834.170.000,00	0,00	0,00

1.3.04.02 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp303.223.419.219,55 dan Rp287.222.814.363,64, naik senilai 5,57% atau Rp16.000.604.855,91 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Air	303.223.419.219,55	287.222.814.363,64	5,57	16.000.604.855,91
Bangunan Air Irigasi	95.743.231.510,76	93.737.319.959,98	2,14	2.005.911.550,78
Bangunan Pengairan Pasang Surut	624.022.000,00	624.022.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	1.546.898.000,00	1.546.898.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	194.549.284.401,73	180.699.981.952,50	7,66	13.849.302.449,23
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	639.553.500,00	639.553.500,00	0,00	0,00

Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.760.419.525,62	4.760.419.525,62	0,00	0,00
Bangunan Air Kotor	5.360.010.281,43	5.214.619.425,53	2,79	145.390.855,90

1.3.04.02.01 *Bangunan Air Irigasi*

Saldo Bangunan Air Irigasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp95.743.231.510,76 dan Rp93.737.319.959,98, naik senilai 2,14% atau Rp2.005.911.550,78 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Air Irigasi	95.743.231.510,76	93.737.319.959,98	2,14	2.005.911.550,78
Bangunan Waduk Irigasi	259.356.891,33	259.356.891,33	0,00	0,00
Bangunan Pengambilan Irigasi	1.917.410.472,73	1.917.410.472,73	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Irigasi	68.005.562.173,81	66.616.162.623,03	2,09	1.389.399.550,78
Bangunan Pembuang Irigasi	2.586.267.939,00	2.586.267.939,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Irigasi	8.282.877.248,80	8.091.097.248,80	2,37	191.780.000,00
Bangunan Pelengkap Irigasi	14.267.024.785,10	14.267.024.785,10	0,00	0,00
Bangunan Air Irigasi Lainnya	424.732.000,00	0,00	0,00	424.732.000,00

1.3.04.02.02 *Bangunan Pengairan Pasang Surut*

Saldo Bangunan Pengairan Pasang Surut Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp624.022.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	624.022.000,00	624.022.000,00	0,00	0,00
Bangunan Waduk Pasang Surut	271.320.000,00	271.320.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Pasang Surut	322.418.000,00	322.418.000,00	0,00	0,00
Saluran Pembuang Pasang Surut	10.284.000,00	10.284.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Pasang Surut	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

1.3.04.02.02 *Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder*

Saldo Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp1.546.898.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	1.546.898.000,00	1.546.898.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	767.348.000,00	767.348.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	92.550.000,00	92.550.000,00	0,00	0,00

1.3.04.02.04 *Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam*

Saldo Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp194.549.284.401,73 dan Rp180.699.981.952,50, naik senilai 7,66% atau Rp13.849.302.449,23 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	194.549.284.401,73	180.699.981.952,50	7,66	13.849.302.449,23
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	11.084.819.447,95	9.543.667.528,73	16,15	1.541.151.919,22
Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	12.755.619.583,88	12.755.619.583,88	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	316.009.810,23	316.009.810,23	0,00	0,00
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	68.368.643.657,79	59.897.223.404,42	14,14	8.471.420.253,37
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	45.409.833.921,90	45.218.063.921,90	0,42	191.770.000,00
Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	52.586.817.703,34	52.586.817.703,34	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	4.027.540.276,64	382.580.000,00	952,73	3.644.960.276,64

1.3.04.02.05 *Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah*

Saldo Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah berupa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp639.553.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	639.553.500,00	639.553.500,00	0,00	0,00
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	259.428.500,00	259.428.500,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	315.360.000,00	315.360.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	64.765.000,00	64.765.000,00	0,00	0,00

1.3.04.02.06 *Bangunan Air Bersih/Air Baku*

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp4.760.419.525,62 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.760.419.525,62	4.760.419.525,62	0,00	0,00
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	266.810.451,30	266.810.451,30	0,00	0,00
Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	746.054.000,00	746.054.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	70.254.000,00	70.254.000,00	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.874.586.630,32	2.874.586.630,32	0,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	802.714.444,00	802.714.444,00	0,00	0,00

1.3.04.02.07 *Bangunan Air Kotor*

Saldo Bangunan Air Kotor Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 5.360.010.281,43 dan 5.214.619.425,53, naik senilai 2,79% atau Rp145.390.855,90 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bangunan Air Kotor	5.360.010.281,43	5.214.619.425,53	2,79	145.390.855,90
Bangunan Pembawa Air Kotor	1.858.496.700,00	1.858.496.700,00	0,00	0,00
Bangunan Pembuang Air Kotor	3.124.041.620,83	3.124.041.620,83	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Air Kotor	118.224.104,70	118.224.104,70	0,00	0,00
Bangunan Pelengkap Air Kotor	113.857.000,00	113.857.000,00	0,00	0,00
Bangunan Air Kotor Lainnya	145.390.855,90	0,00	0,00	145.390.855,90

1.3.04.03 *Instalasi*

Saldo Instalasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 30.782.346.755,75 dan 22.034.707.755,75, naik senilai 39,70% atau 8.747.639.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi	30.782.346.755,75	22.034.707.755,75	39,70	8.747.639.000,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku	11.939.417.786,41	11.721.007.786,41	1,86	218.410.000,00
Instalasi Air Kotor	5.965.038.168,34	5.965.038.168,34	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	111.783.290,00	111.783.290,00	0,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	8.807.631.500,00	290.402.500,00	2.932,90	8.517.229.000,00
Instalasi Gardu Listrik	1.485.514.881,00	1.473.514.881,00	0,81	12.000.000,00
Instalasi Gas	2.350.788.855,00	2.350.788.855,00	0,00	0,00
Instalasi Pengaman	21.995.275,00	21.995.275,00	0,00	0,00
Instalasi Lain	100.177.000,00	100.177.000,00	0,00	0,00

1.3.04.03.01 *Instalasi Air Bersih/Air Baku*

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 11.939.417.786,41 dan 11.721.007.786,41, naik senilai 1,86% atau 218.410.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Air Bersih / Air Baku	11.939.417.786,41	11.721.007.786,41	1,86	218.410.000,00
Instalasi Air Permukaan	12.907.100,00	12.907.100,00	0,00	0,00

Instalasi Air Sumber / Mata Air	172.005.950,00	167.505.950,00	2,69	4.500.000,00
Instalasi Air Tanah Dalam	35.385.000,00	35.385.000,00	0,00	0,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	11.719.119.736,41	11.505.209.736,41	1,86	213.910.000,00

1.3.04.03.02 Instalasi Air Kotor

Saldo Instalasi Air Kotor Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai 5.965.038.168,34 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Air Kotor	5.965.038.168,34	5.965.038.168,34	0,00	0,00
Instalasi Air Buangan Domestik	5.274.479.168,34	5.274.479.168,34	0,00	0,00
Instalasi Air Kotor Lainnya	690.559.000,00	690.559.000,00	0,00	0,00

1.3.04.03.03 Instalasi Pengolahan Sampah

Saldo Instalasi Pengolahan Sampah berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp111.783.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Pengolahan Sampah	111.783.290,00	111.783.290,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik	73.876.645,00	73.876.645,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	37.906.645,00	37.906.645,00	0,00	0,00

1.3.04.03.05 Instalasi Pembangkit Listrik

Saldo Instalasi Pembangkit Listrik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp8.807.631.500,00 dan Rp290.402.500,00, naik senilai 2.932,90% atau Rp8.517.229.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Pembangkit Listrik	8.807.631.500,00	290.402.500,00	2.932,90	8.517.229.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	10.048.500,00	10.048.500,00	0,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	75.854.000,00	75.854.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn)	5.276.350.000,00	12.500.000,00	42.110,80	5.263.850.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	3.253.379.000,00	0,00	0,00	3.253.379.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00

1.3.04.03.06 *Instalasi Gardu Listrik*

Saldo Instalasi Gardu Listrik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.485.514.881,00 dan Rp1.473.514.881,00, naik senilai 0,81% atau Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Gardu Listrik	1.485.514.881,00	1.473.514.881,00	0,81	12.000.000,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	244.192.400,00	244.192.400,00	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2.513.110,00	2.513.110,00	0,00	0,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.226.809.371,00	1.226.809.371,00	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

1.3.04.03.08 *Instalasi Gas*

Saldo Instalasi Gas Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp2.350.788.855,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Instalasi Gas	2.350.788.855,00	2.350.788.855,00	0,00	0,00
Instalasi Jaringan Pipa Gas	1.699.448.605,00	1.699.448.605,00	0,00	0,00
Instalasi Gas Lainnya	651.340.250,00	651.340.250,00	0,00	0,00

1.3.04.03.10 *Instalasi Lain*

Saldo Instalasi Lain Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai 100.177.000,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023.

1.3.04.04 *Jaringan*

Saldo Jaringan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp60.510.853.937,30 dan Rp60.441.588.437,30, naik senilai 0,11% atau Rp69.265.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jaringan	60.510.853.937,30	60.441.588.437,30	0,11	69.265.500,00
Jaringan Air Minum	6.937.949.535,47	6.937.949.535,47	0,00	0,00
Jaringan Listrik	50.272.014.901,83	50.202.749.401,83	0,14	69.265.500,00
Jaringan Telepon	1.602.550.500,00	1.602.550.500,00	0,00	0,00
Jaringan Gas	1.698.339.000,00	1.698.339.000,00	0,00	0,00

1.3.04.04.01 *Jaringan Air Minum*

Saldo Jaringan Air Minum Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp6.937.949.535,47 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jaringan Air Minum	6.937.949.535,47	6.937.949.535,47	0,00	0,00
Jaringan Pembawa	396.944.200,00	396.944.200,00	0,00	0,00
Jaringan Induk Distribusi	100.771.000,00	100.771.000,00	0,00	0,00
Jaringan Cabang Distribusi	101.480.000,00	101.480.000,00	0,00	0,00
Jaringan Sambungan Ke Rumah	6.321.581.835,47	6.321.581.835,47	0,00	0,00
Jaringan Air Minum Lainnya	17.172.500,00	17.172.500,00	0,00	0,00

1.3.04.04.02 Jaringan Listrik

Saldo Jaringan Listrik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 50.272.014.901,83 dan 50.202.749.401,83, naik senilai 0,17% atau Rp69.265.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jaringan Listrik	50.272.014.901,83	50.202.749.401,83	0,14	69.265.500,00
Jaringan Transmisi	11.205.033.040,28	11.205.033.040,28	0,00	0,00
Jaringan Distribusi	38.535.030.528,00	38.535.030.528,00	0,00	0,00
Jaringan Listrik Lainnya	531.951.333,55	462.685.833,55	14,97	69.265.500,00

1.3.04.04.03 Jaringan Telepon

Saldo Jaringan Telepon Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp1.602.550.500,00. Tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023.

1.3.04.04.04 Jaringan Gas

Saldo Jaringan Gas Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp1.698.339.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jaringan Gas	1.698.339.000,00	1.698.339.000,00	0,00	0,00
Jaringan Pipa Gas Transmisi	1.387.934.000,00	1.387.934.000,00	0,00	0,00
Jaringan Pipa Distribusi	265.205.000,00	265.205.000,00	0,00	0,00
Jaringan Pipa Dinas	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00

1.3.05 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai 14.485.603.528,74 dan 11.694.038.944,75 atau naik 23,87% senilai 2.791.564.583,99 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tetap Lainnya	14.485.603.528,74	11.694.038.944,75	23,87	2.791.564.583,99
Bahan Perpustakaan	8.709.991.103,25	8.034.362.501,25	8,41	675.628.602,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.637.078.735,00	2.616.278.735,00	0,80	20.800.000,00
Hewan	24.790.000,00	24.790.000,00	0,00	0,00
Biota Perairan	290.001.500,00	287.001.500,00	1,05	3.000.000,00
Tanaman	385.945.190,49	379.081.208,50	1,81	6.863.981,99
Aset Tetap Dalam Renovasi	2.437.797.000,00	352.525.000,00	591,52	2.085.272.000,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
SALDO AWAL	11.694.038.944,75	
Belanja Modal LRA	6.271.723.948,00	
Mutasi Antar Akun dari Gedung dan Bangunan	1.243.471.000,00	
Mutasi ke Ekstrakomptabel		49.849.018,00
Mutasi Kurang ke Barang dan Jasa		3.951.807.456,00
Mutasi Antar Akun Peralatan dan Mesin		494.305.393,00
Mutasi Antar Akun ke Aset tidak Berwujud		190.006.500,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Lainnya (RB)		2.749.997,00
Mutasi Antar Akun ke Aset Lainnya (Kurvol)		34.912.000,00
Koreksi Pembulatan		0,01
JUMLAH MUTASI	7.515.194.948,00	4.723.630.364,01
TOTAL ASET ASET TETAP LAIINYA		14.485.603.528,74

1.3.05.01 Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp8.709.991.103,25 dan Rp8.034.362.501,25, naik senilai 8,41% atau Rp675.628.602,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bahan Perpustakaan	8.709.991.103,25	8.034.362.501,25	8,41	675.628.602,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	8.549.423.540,25	7.873.794.938,25	8,58	675.628.602,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	26.257.000,00	26.257.000,00	0,00	0,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	103.592.463,00	103.592.463,00	0,00	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	30.718.100,00	30.718.100,00	0,00	0,00

1.3.05.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp8.549.423.540,25 dan Rp7.873.794.938,25, naik senilai 8,58% atau Rp675.628.602,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bahan Perpustakaan Tercetak	8.549.423.540,25	7.873.794.938,25	8,58	675.628.602,00
Buku Umum	6.371.250.100,02	5.725.852.498,02	11,27	645.397.602,00
Buku Filsafat	9.998.735,00	9.998.735,00	0,00	0,00
Buku Agama	227.881.492,91	227.881.492,91	0,00	0,00
Buku Ilmu Sosial	515.556.266,02	503.621.266,02	2,37	11.935.000,00
Buku Ilmu Bahasa	426.229.577,84	417.139.577,84	2,18	9.090.000,00
Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	389.909.295,58	380.703.295,58	2,42	9.206.000,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	285.500.661,88	285.500.661,88	0,00	0,00
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	211.906.730,00	211.906.730,00	0,00	0,00
Buku Geografi, Biografi, Sejarah	49.014.967,00	49.014.967,00	0,00	0,00
Serial	27.599.514,00	27.599.514,00	0,00	0,00
Buku Laporan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	27.226.200,00	27.226.200,00	0,00	0,00

1.3.05.01.02 *Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro*

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp26.257.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	26.257.000,00	26.257.000,00	0,00	0,00
Audio Visual	25.105.000,00	25.105.000,00	0,00	0,00
Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00

1.3.05.01.03 *Kartografi, Naskah dan Lukisan*

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp103.592.463,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kartografi, Naskah dan Lukisan	103.592.463,00	103.592.463,00	0,00	0,00
Bahan Kartografi	100.092.463,00	100.092.463,00	0,00	0,00
Naskah (Manuskrip) / Asli	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

1.3.05.01.05 *Karya Grafika (Graphic Material)*

Saldo Karya Grafika (*Graphic Material*) Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp30.718.100,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023.

1.3.05.02 *Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga*

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.637.078.735,00 dan Rp2.616.278.735,00 naik senilai 0,80% atau Rp20.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.637.078.735,00	2.616.278.735,00	0,80	20.800.000,00
Barang Bercorak Kesenian	2.041.700.495,00	2.041.700.495,00	0,00	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	590.379.240,00	569.579.240,00	3,65	20.800.000,00
Tanda Penghargaan	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00

1.3.05.02.01 *Barang Bercorak Kesenian*

Saldo Barang Bercorak Kesenian Tahun 2023 dan 2022 masih sama karena tidak ada penambahan dan pengurangan selama Tahun 2023, yaitu senilai Rp2.041.700.495,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Barang Bercorak Kesenian	2.041.700.495,00	2.041.700.495,00	0,00	0,00
Alat Musik	1.717.706.495,00	1.717.706.495,00	0,00	0,00
Lukisan	308.184.000,00	308.184.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Kesenian	15.810.000,00	15.810.000,00	0,00	0,00

1.3.05.02.02 *Alat Bercorak Kebudayaan*

Saldo Alat Bercorak Kebudayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp590.379.240,00 dan Rp569.579.240,00, naik sebesar 3,65% atau Rp20.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Bercorak Kebudayaan	590.379.240,00	569.579.240,00	3,65	20.800.000,00
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	399.770.000,00	399.770.000,00	0,00	0,00
Barang Kerajinan	178.609.240,00	169.809.240,00	5,18	8.800.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

1.3.05.02.03 *Tanda Penghargaan*

Saldo Tanda Penghargaan Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp4.999.000,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023.

1.3.05.03 *Hewan*

Saldo Hewan Tahun 2023 dan 2022 masih sama, yaitu senilai Rp24.790.000,00. tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2023.

1.3.05.04 *Biota Perairan*

Saldo Biota Perairan berupa Ikan Budidaya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp290.001.500,00 dan Rp287.001.500,00, naik sebesar 1,05% atau Rp3.000.000,00.

1.3.05.05 *Tanaman*

Saldo Tanaman Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 385.945.190,49 dan 379.081.208,50, naik sebesar 1,81% atau 6.863.981,99.

1.3.05.07 *Aset Tetap Dalam Renovasi*

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai 2.437.797.000,00 dan Rp352.525.000,00, naik sebesar 591,52% atau 2.085.272.000,00.

1.3.06 *Konstruksi dalam Pengerjaan*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.340.948.450,00 dan Rp551.517.000,00, naik senilai Rp789.431.450,00 atau 143,14% dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG
SALDO AWAL	551.517.000,00	
Mutasi Tambah dari Beban Barang dan Jasa	397.695.000,00	
Mutasi Tambah dari Utang Belanja Modal	406.799.000,00	
Mutasi Antar Akun dari Gedung dan Bangunan	536.454.450,00	
Mutasi Antar Akun ke Gedung dan Bangunan		551.517.000,00
JUMLAH MUTASI	1.340.948.450,00	551.517.000,00
TOTAL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		1.340.948.450,00

Aset tetap yang sampai saat ini masih menjadi KDP adalah sebagai berikut.

1. Pekerjaan Pasar Tradisional Selagalas senilai Rp49.245.000,00;
2. Pekerjaan Pasar Tradisional Cakranegara senilai Rp49.800.000,00;
3. Pekerjaan Pasar Wisata Kebon Roek Baru – Bintaro senilai Rp198.810.000,00;
4. Pekerjaan GOR Mini Komplek Perkantoran Lingkar Selatan senilai Rp99.840.000,00;
5. Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Bersih senilai Rp406.799.000,00;
6. Pekerjaan Pembangunan Bank Sampah Induk senilai Rp49.588.000,00;
7. Pekerjaan Pembangunan TPST Kebon Talo senilai Rp278.493.450,00; dan
8. Pekerjaan Pematangan Lahan Rusunawa Bintaro senilai Rp208.373.000,00.

1.3.07 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Mataram menerapkan penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis masing-masing jenis aset tetap dengan metode periodik per tahun. Akumulasi Penyusutan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai (Rp1.630.116.764.495,49) dan (Rp1.458.464.280.712,30) naik senilai Rp171.652.483.783,19 atau 11,77%. Atas Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilakukan penyusutan. Nilai bersih Aset Tetap setelah dikurangi dengan Nilai Penyusutan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Uraian	Nilai Aset Tetap	Penyusutan	Nilai Setelah Penyusutan
Aset Tetap	4.716.107.634.232,94	(1.630.116.764.495,49)	3.085.990.869.737,45
Tanah	1.332.906.253.110,00	0,00	1.332.906.253.110,00
Peralatan dan Mesin	940.058.935.876,37	(678.534.106.683,48)	261.524.829.192,89
Gedung dan Bangunan	1.221.838.466.235,75	(226.920.736.327,00)	994.917.729.908,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.477.427.032,08	(724.661.921.485,01)	480.815.505.547,07
Aset Tetap Lainnya	14.485.603.528,74	0,00	14.485.603.528,74
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.340.948.450,00	0,00	1.340.948.450,00

1.3.09 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp13.685.481.323,00. Dalam PSAP 17 dijelaskan bahwa properti tanah dan bangunan yang disewakan untuk menghasilkan rental dan untuk kenaikan nilai harus dikategorikan sebagai properti investasi karena tidak digunakan sendiri. Rincian properti Investasi milik Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut.

No	Aset	Luasan (m ²)	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah Pecatu	2.591	367.922.000,00	
2	Tanah Pecatu	2.820	400.440.000,00	
3	Tanah Pecatu	3.375	479.250.000,00	

No	Aset	Luasan (m ²)	Nilai Aset	Keterangan
4	Tanah Pecatu	3.542	502.964.000,00	
5	Tanah Pecatu	5.005	22.140.000,00	
6	Tanah Pecatu	2.540	231.140.000,00	
7	Tanah Pecatu	4.910	446.810.000,00	
8	Tanah Pecatu	3.010	273.910.000,00	
9	Tanah Pertanian	1.642	955.382.197,00	
10	Tanah Pertanian	1.092	615.806.008,00	
11	Tanah Pertanian	1.201	677.574.512,00	
12	Tanah Pertanian	2.734	505.790.000,00	
13	Tanah Pertanian	1.179	737.930.364,00	
14	Tanah Pertanian	913	11.475.000,00	
15	Tanah Pertanian	1.632	991.335.488,00	
16	Tanah Pertanian	3.667	557.028.673,00	
17	Tanah Pertanian	2.894	1.441.363.134,00	
18	Tanah Pertanian	2.347	1.280.242.048,00	Tidak disewakan seluruhnya. Terdapat Pengurangan Aset seluas 516 m ² dari keseluruhan tanah seluas 2.347 m ² dipergunakan sebagai akses jalan masuk TPS
19	Tanah Pertanian	657	345.508.699,00	
20	Tanah Pertanian	5.000	2.488.818.700,00	
21	Tanah Pecatu	3.978	11.610.000,00	
22	Tanah Pecatu	4.159	285.240.000,00	
23	Tanah Pecatu	3.400	38.130.500,00	
24	Tanah Pecatu	150	17.670.000,00	
TOTAL			Rp13.685.481.323,00	

1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp310.774.104.216,72 dan Rp324.517.644.127,36 atau turun sebesar 4,24% senilai Rp13.743.539.910,64 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lainnya	310.774.104.216,72	324.517.644.127,36	(4,24)	(13.743.539.910,64)
Treasure Deposit Facility	34.599.246.000,00	0,00	100,00	34.599.246.000,00
Tuntutan Ganti Rugi	620.942.673,00	19.612.113,00	3.066,12	601.330.560,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.834.396.800,00	4.595.550.300,00	5,20	238.846.500,00
Aset Lain-lain	43.610.189.665,72	92.250.944.341,36	(52,73)	(48.640.754.675,64)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.019.400.922,00)	(3.477.192.627,00)	15,59	(542.208.295,00)

1.5.01.01 Treasure Deposit Facility

Saldo TDF per 31 Desember 2023 senilai Rp34.599.246.000,00. *Treasure Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Atas saldo dana TDF, pemerintah daerah akan menerima remunerasi yang tarifnya sama dengan persentase yang diterima pemerintah dari BI. Remunerasi dibayarkan dari RKUN ke RKUD setiap 3 bulan sekali, berdasarkan rekonsiliasi antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb dengan Direktorat Transfer Umum DJPK. Saldo TDF per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Jenis TKD	Jumlah Bersih
1	DBH, TDF 2023 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	5.227.665.000,00
2	DBH, TDF 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	154.011.000,00
3	DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (DBH PBB Migas Bagian Daerah)	71.549.000,00
4	DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	320.546.000,00
5	DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	12.972.000,00
6	DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah)	2.278.000
7	DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	1.483.000,00
8	DBH, TDF 2023 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	8.050.032.000,00
9	DBH, TDF 2023 => 612312 DBH SDA Minerba – Royalti (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	20.758.710.000,00
Jumlah		34.599.246.000,00

1.5.01.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp620.942.673,00 dan Rp19.612.113,00 naik senilai Rp601.330.560,00 atau 3.066,12%. TGR pada Aset Lainnya merupakan nilai TGR yang telah mempunyai SK Penetapan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau 31 Desember 2023.

1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp231.128.730.000,00 merupakan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasy Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 11 Juli 1996. Saldo tersebut merupakan hasil penilaian tanah yang dikerjasamakan dengan KPKNL Mataram pada Tahun 2012 dengan laporan hasil penilaian Nomor: Lap-85/WKN.14/KNL.03/06.00/2012. Pemerintah Kota Mataram menyerahkan pengelolaan tanah di Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara seluas 34.397 m² yang merupakan sebagian dari luas 39.000 m² kepada PT Fasifik Cilinaya Fantasy selama 30 Tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian 11 Juli 1996 sampai dengan 11 Juli 2026 untuk pembangunan AHPM Cilinaya. Selanjutnya pengelola membangun di atas tanah tersebut berupa gedung dan fasilitas lainnya sesuai perjanjian. Pada akhir masa kontrak/perjanjian, tanah, bangunan/gedung dan fasilitas yang ada di atasnya akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kota Mataram dalam kondisi baik dan layak operasional. Atas izin pengelolaan tersebut Pemerintah Kota Mataram memperoleh sejumlah bagian penghasilan (*Royalty*) senilai Rp300.000.000,00 per tahun.

1.5.03 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp4.834.396.800,00 dan Rp4.595.550.300,00 naik senilai Rp238.846.500,00 atau 5,20%. Aset tidak berwujud terdiri dari aplikasi, *website*, *user license*, dan *setup server* dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Billing System Terintegrasi RSUD Kota Mataram	199.812.800,00
2	Aplikasi Rekam Medik RSUD Kota Mataram	199.903.000,00
3	Aplikasi Remunerasi RSUD Kota Mataram	50.000.000,00
4	Aplikasi RSUD Kota Mataram	74.480.000,00
5	Aplikasi Bridging SIMRS & BPJS RSUD Kota Mataram	199.910.000,00
6	Aplikasi Daloket RSUD Kota Mataram	124.000.000,00
7	Aplikasi Android PSC 119 RSUD Kota Mataram	38.000.000,00
8	Website RSUD Kota Mataram	57.000.000,00
9	User License Aplikasi Server RSUD Kota Mataram	19.250.000,00
10	Setup Server Web Database RSUD Kota Mataram	53.350.000,00
11	Aplikasi SIMRS RSUD Kota Mataram	2.229.586.200,00
12	Aplikasi Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Selaparang	25.102.900,00
13	Aplikasi Perijinan Di KIB B Dinas Perdagangan	16.600.000,00
14	Aplikasi Sistem Informasi Bahan Pokok Dinas Perdagangan	38.352.000,00
15	Aplikasi Informasi Data Perusahaan Dinas Perdagangan	11.194.000,00
16	Aplikasi SIMYANDU DPMPSTP	272.614.000,00
17	Aplikasi Perizinan Android dan Digital Arsip pada DPMPSTP	40.500.000,00
18	Aplikasi GIS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.250.000,00
19	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata	98.800.000,00
20	Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	49.500.000,00
21	Aplikasi SISKUM Bagian Hukum Setda kota Mataram	162.734.000,00
22	Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	49.650.000,00
23	Aplikasi SIPD Bappeda	192.830.000,00
24	Program pengelola arsip digital dukcapil	15.000.000,00
25	Aplikasi Mobile Informatif berbasis Android Pariwisata	189.886.400,00
26	Aplikasi Pengawasan Pajak Berbasis Informasi Masyarakat BKD Kota Mataram	9.900.000,00
27	Aplikasi Berbasis Web Standar Harga BKD Kota Mataram	49.500.000,00
28	Aplikasi pada Dinas Perinkop Kota Mataram	64.845.000,00
29	Aplikasi PBB pada BKD Kota Mataram	42.000.000,00
30	Aplikasi Inovasi Pengawasan Pajak Daerah berbasis Informasi Masyarakat (Giveaway)	35.520.000,00
31	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Reklame	68.986.500,00
32	Aplikasi <i>Dashboard</i> Kasir dan Penerimaan	35.500.000,00
33	Aplikasi Nontunai Pasar Tradisional E-Retribusi	50.000.000,00
34	Apikasi Dasi Renbang	48.840.000,00
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022		4.834.396.800,00

Mutasi aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	4.595.550.300,00
Mutasi tambah dari Belanja Modal Aset Lainnya	48.840.000,00
Mutasi Antar Akun dari Aset Tetap Lainnya	190.006.500,00
Saldo Akhir	4.834.396.800,00

1.5.04 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp43.610.189.665,72 dan Rp92.250.944.341,36 turun senilai Rp48.640.754.675,64 atau sebesar 52,73% dari saldo Tahun 2022. Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	BERTAMBAH	BERKURANG
Saldo awal	92.250.944.341,36	
Mutasi tambah dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain	125.874.997,00	
Koreksi Pembulatan Dampak Hasil Inventarisasi pada Simda BMD		3,01
Mutasi Kurang Penghapusan (Pelelangan)		48.766.629.675,65
Jumlah Mutasi	125.875.000,01	48.766.629.675,65
Total Aset Lain-lain		43.610.189.665,72

1.5.05 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai (Rp4.019.400.922,00) dan (Rp3.477.192.627,00) naik 15,59% senilai Rp542.208.295,00.

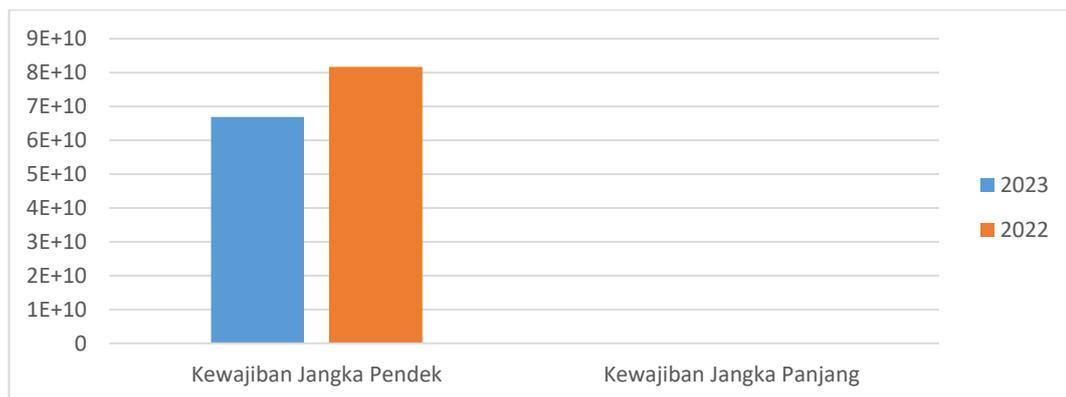
NO	NAMA SKPD	NILAI BMD	AMORTISASI ATB
1	Rumah Sakit Umum Kota Mataram	3.245.292.000,00	(2.845.493.134,00)
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	36.250.000,00	(30.500.000,00)
3	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	(49.500.000,00)
4	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	64.845.000,00	(28.099.500,00)
5	Dinas Penanaman Modal Dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	313.114.000,00	(313.114.000,00)
6	Dinas Pariwisata	288.686.400,00	(215.896.613,00)
7	Dinas Perdagangan	116.146.000,00	(66.979.333,00)
8	Sekretariat Daerah	162.734.000,00	(162.734.000,00)
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.670.000,00	(194.458.000,00)
10	Badan Keuangan Daerah	291.056.500,00	(87.523.442,00)
11	Kecamatan Selaparang	25.102.900,00	(25.102.900,00)
Jumlah		4.834.396.800,00	(4.019.400.922,00)

2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp74.405.795.055,44 dan Rp84.629.111.701,31 atau turun sebesar 12,08% senilai Rp10.223.316.645,87 yang terdiri dari:

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban	74.405.795.055,44	84.629.111.701,31	(12,08)	(10.223.316.645,87)
Kewajiban Jangka Pendek	74.405.795.055,44	84.629.111.701,31	(12,08)	(10.223.316.645,87)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00

Perbandingan kewajiban Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.4 Komposisi Kewajiban 2023 dan 2022

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek berupa saldo Utang PFK dan Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp74.405.795.055,44 dan Rp84.629.111.701,31 naik senilai Rp10.223.316.645,87 atau 12,08%.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	74.405.795.055,44	84.629.111.701,31	(12,08)	(10.223.316.645,87)
Utang PFK	175.410.818,00	1.576.807.050,50	(88,88)	(1.401.396.232,50)
Pendapatan Diterima Dimuka	66.666.667,00	106.666.667,00	(37,50)	(40.000.000,00)
Utang Belanja	74.163.717.570,44	82.945.637.983,81	(10,59)	(8.781.920.413,37)

Terhadap penjelasan kewajiban jangka pendek dapat dilihat pada **Lampiran 10** Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2023.

2.1.01 Utang PFK

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp175.410.818,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang PFK	175.410.818,00	1.576.807.050,50	(88,88)	(1.401.396.232,50)
Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat, dan PPh Final BUD	28.051.537,00	(16.430.761,00)	(270,73)	44.482.298,00
Jaminan Bongkar Reklame di BUD	121.344.842,00	1.567.223.372,50	(92,26)	(1.445.878.530,50)
Penerimaan Pemda Lain	26.014.439,00	26.014.439,00	0,00	0,00

Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final di BUD di luar Jaminan Bongkar Reklame pada akhir Tahun 2023 senilai Rp28.051.537,00 merupakan Utang PPh dan PPN Dana BOS. Terhadap kelebihan pembayaran Pajak Pusat tahun sebelumnya sudah dikoreksi berdasarkan hasil rekonsiliasi pajak antara Pemerintah Kota Mataram, KPP dan KPPN yang menyatakan tidak ada saldo pajak di Tahun 2023. Rincian mutasi saldo Utang Pajak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Utang PFK	(16.430.761,00)	44.482.298,00	0,00	28.051.537,00
Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
Askes	0,00	0,00	0,00	0,00
PPh 21	(2.151.697,00)	7.374.142,00	0,00	5.222.445,00
PPh 22	0,00	0,00	0,00	0,00
PPh 23	(1.089.952,00)	7.675.397,00	0,00	6.585.445,00
PPh Ps 4 (2)	(2.198.164,00)	2.198.164,00	0,00	0,00
PPN	(10.990.948,00)	27.234.595,00	0,00	16.243.647,00

Dana titipan jaminan jasa bongkar reklame Tahun 2023 senilai Rp121.344.842,00. Sisa Jaminan Bongkar Tahun 2022 dan sebelumnya senilai Rp1.537.223.372,50 telah diakui seluruhnya sebagai Pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah;

Pajak Lombok Barat salah masuk ke Kas Daerah Kota Mataram senilai Rp2.009.491,00 dan kelebihan pembayaran pajak oleh PT Pertamina senilai Rp24.004.948,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pajak Lobar , Penerimaan tgl 17-6-2021 di R/C 37.968,00
Rp1.432.133, menurut catatan bendahara penerimaan
Rp1.394.165 selisih senilai Rp37.968,00

2.	Pajak Lobar , Penerimaan tgl 23-6-2021 di R/C Rp2.202.414,00, menurut catatan bendahara penerimaan Rp1.940.283,00 selisih senilai Rp262.131,00	262.131,00
3.	Penerimaan pajak hotel di rekening koran tgl 23 Juni 2021 R/C 3.892.554,00 sedangkan di simda 3,771,080,00 sehingga selisih senilai Rp121,474,00 yang merupakan penerimaan Lobar	121.474,00
4.	Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13-8-2021R/C 1.165.333,00 menurut catatan bendahara penerimaan Rp922.901 sehingga selisih senilai Rp242.432,00 yang merupakan double pelimpahan pihak bank NTB	242.432,00
5.	Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13 -8-2021 R/C Rp2.286.104,00, menurut catatan bendahara penerimaan Rp940.618,00 sehingga selisih senilai Rp1.345.486,00 yang merupakan <i>double</i> pelimpahan pihak bank NTB	1.345.486,00
6.	Kelebihan transfer pajak PT. Pertamina tanggal 1-9-2021	24.004.948,00

2.1.02 *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka BLUD RSUD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp66.666.667,00 merupakan sewa lokasi *Automatic Teller Machine* (ATM).

2.1.03 *Utang Belanja*

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp74.163.717.570,44 dan Rp82.945.637.983,81 turun senilai Rp8.781.920.413,37 atau 10,59% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja	74.163.717.570,44	82.945.637.983,81	(10,59)	(8.781.920.413,37)
Utang Belanja Pegawai	10.813.281.862,00	10.153.117.141,00	6,50	660.164.721,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	52.222.327.363,44	53.619.360.342,81	(2,61)	(1.397.032.979,37)
Utang Belanja Modal Tanah	10.298.010.500,00	19.173.160.500,00	(46,29)	(8.875.150.000,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	406.799.000,00	0,00	0,00	406.799.000,00

2.1.03.01 *Utang Belanja Pegawai*

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp10.813.281.862,00 dan Rp10.153.117.141,00 naik senilai Rp660.164.721,00 atau 6,50% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Pegawai	10.813.281.862,00	10.153.117.141,00	6,50	660.164.721,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.315.837,00	68.046.453,00	188,50	128.269.384,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.442.332.834,00	8.990.375.951,00	(6,10)	(548.043.117,00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	978.465.434,00	12.500.000,00	7.727,72	965.965.434,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	1.196.167.757,00	1.082.194.737,00	10,53	113.973.020,00

2.1.03.01.01 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp196.315.837,00 dan Rp68.046.453,00 naik senilai Rp128.269.384,00 atau 188,50% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.315.837,00	68.046.453,00	188,50	128.269.384,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	4.572.900,00	21.276.067,00	(78,51)	(16.703.167,00)
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	95.584,00	133.422,00	(28,36)	(37.838,00)
Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	1.420.000,00	(100,00)	(1.420.000,00)
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	2.600.000,00	(100,00)	(2.600.000,00)
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	72.420,00	0,00	0,00	72.420,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.000.000,00	8.429,00	11763,80	991.571,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	145,00	147,00	(1,36)	(2,00)
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.958.404,00	42.608.388,00	26,64	11.350.016,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	136.431.384,00	0,00	0,00	136.431.384,00

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Merupakan:

- Utang Belanja Pegawai Kekurangan Iuran BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan per 31 Desember Tahun 2023 senilai Rp190.389.788,00 terdiri dari Iuran Wajib Pemda untuk PNS senilai Rp53.958.404,00 dan PPPK senilai Rp136.431.384,00; serta
- Utang Gaji Berkala dan Kekurangan Gaji senilai Rp5.926.049,00 terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, BKD dan BKPSDM.

2.1.03.01.02 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp8.442.332.834,00 dan Rp8.990.375.951,00, turun senilai Rp548.043.117,00 atau 6,10% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.442.332.834,00	8.990.375.951,00	(6,10)	(548.043.117,00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.971.243.641,00	3.102.073.194,00	(4,22)	(130.829.553,00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	244.753.793,00	1.067.200.000,00	(77,07)	(822.446.207,00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	26.752.000,00	12.274.000,00	117,96	14.478.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	15.768.000,00	22.150.000,00	(28,81)	(6.382.000,00)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.566.162.125,00	4.506.946.757,00	1,31	59.215.368,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	617.653.275,00	279.732.000,00	120,80	337.921.275,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan:

- Utang Belanja TPP senilai Rp7.416.358.255,00 merupakan utang TPP bagian bulan Desember yang belum dibayarkan sampai dengan per 31 Desember 2023; serta
- Utang Belanja TPP BLUD PKM senilai Rp1.024.166.579,00.

2.1.06.01.03 Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp978.465.434,00 dan Rp12.500.000,00, naik senilai Rp965.965.434,00 atau 7.727,72% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	978.465.434,00	12.500.000,00	7.727,72	965.965.434,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	12.500.000,00	(100,00)	(12.500.000,00)
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	22.225.800,00	0,00	0,00	22.225.800,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	331.500.000,00	0,00	0,00	331.500.000,00

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD				
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	624.739.634,00	0,00	0,00	624.739.634,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan:

- Utang Klaim Non Kapitasi Puskesmas merupakan Utang Jasa Pelayanan senilai Rp624.739.634,00;
- Utang Tamsil senilai Rp331.500.000,00; dan
- Utang TPG senilai Rp22.225.800,00.

2.1.06.01.99 Utang Belanja Pegawai BLUD

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp1.196.167.757,00 dan Rp1.082.194.737,00, naik senilai Rp113.973.020,00 atau 10,53%. Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Kota Mataram senilai Rp1.196.167.757,00 merupakan Utang Gaji Pegawai Kontrak, Honorarium Narasumber, dan IKJK.

2.1.06.02 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp52.203.901.238,44 dan Rp53.619.360.342,81, turun senilai Rp1.415.459.104,37 atau 2,64% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Barang dan Jasa	52.222.327.363,44	53.619.360.342,81	(2,61)	(1.397.032.979,37)
Utang Belanja Barang	105.427.040,00	600.000.000,00	(82,43)	(494.572.960,00)
Utang Belanja Jasa	6.202.549.391,00	6.211.263.929,00	(0,14)	(8.714.538,00)
Utang Belanja Perjalanan Dinas	18.799.396,00	0,00	0,00	18.799.396,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.895.551.536,44	46.808.096.413,81	(1,95)	(912.544.877,37)

2.1.06.02.01 Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp105.427.040,00 dan Rp600.000.000,00, turun senilai Rp494.572.960,00 atau 82,43% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Barang	105.427.040,00	600.000.000,00	(82,43)	(494.572.960,00)
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	600.000.000,00	(100,00)	(600.000.000,00)
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	105.427.040,00	0,00	0,00	105.427.040,00

Utang Belanja Barang Pakai Habis Obat-Obatan merupakan Utang Pengadaan Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp105.427.040,00.

2.1.06.02.02 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp6.202.922.662,00 dan Rp6.211.263.929,00, turun senilai Rp8.341.267,00 atau 0,13% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Jasa	6.202.549.391,00	6.211.263.929,00	(0,14)	(8.714.538,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	78.800.000,00	0,00	0,00	78.800.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	51.129.980,00	(100,00)	(51.129.980,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	14.113.584,00	9.642.589,00	46,37	4.470.995,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	62.365.180,00	56.320.400,00	10,73	6.044.780,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	294.490.294,00	298.398.463,00	(1,31)	(3.908.169,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	7.140.000,00	(100,00)	(7.140.000,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	61.595.468,00	55.654.951,00	10,67	5.940.517,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.695.365,00	6.250.400,00	7,12	444.965,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	3.906.934.749,00	0,00	0,00	3.906.934.749,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	3.728.088,00	(100,00)	(3.728.088,00)
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	4.948.845,00	(100,00)	(4.948.845,00)
Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	3.270.401.750,00	(100,00)	(3.270.401.750,00)
Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	92.880.000,00	92.880.000,00	0,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.679.274.751,00	1.164.282.463,00	44,23	514.992.288,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	1.190.486.000,00	(100,00)	(1.190.486.000,00)

Utang Belanja Jasa pada tabel diatas terdiri atas:

- a. Utang Kegiatan Emergency Medical Tim Dikes senilai Rp78.800.000,00;
- b. Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Dinas PUPR senilai Rp5.400.000,00;
- c. Utang Belanja Listrik, Telepon, internet dan Air senilai Rp433.719.191,00 merupakan Tagihan seluruh SKPD di Kota Mataram selain BLUD RSUD Kota Mataram. Tagihan listrik, air dan telepon beberapa SKPD masih dibayarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Mataram karena masih satu gedung yaitu pada Bappeda, DPMPTSP, Balitbang dan Diskominfo. Selain itu ada juga SKPD yang menggunakan pulsa listrik yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Utang Belanja PKB senilai Rp6.695.365,00 merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dibayar pada Dinas Pendidikan senilai Rp917.635,00, Dinas Kesehatan senilai Rp303.000,00, BPBD senilai Rp4.130.000,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp879.450,00, serta pada Kecamatan Sandubaya senilai Rp465.280,00;
- e. Utang Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.906.934.749,00;
- f. Utang Insentif Vaksinator pada Dinas Kesehatan senilai Rp92.880.000,00; dan
- g. Utang Belanja Pelayanan Kesehatan Diluar Cakupan Layanan BPJS pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.679.274.751,00;

2.1.06.02.99 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp45.895.551.536,44 dan Rp46.808.096.413,81, turun senilai Rp912.544.877,37 atau 1,95% Utang Barang Jasa Lainnya BLUD RSUD Kota Mataram senilai Rp45.895.551.536,44, termasuk utang listrik air telepon dan internet RSUD Kota Mataram senilai Rp308.099.335,00, merupakan utang jangka pendek BLUD RSUD Kota Mataram kepada *principal*, jasa pelayanan, Utang obat-obatan, dan Utang BHP medis yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

NO.	Keterangan	2023	2022
1	Obat	8.075.260.373,00	14.075.544.542,81
2	BMHP Bagian Penunjang	624.480.763,00	8.553.054.158,00
3	Jasa Pelayanan	7.383.555.879,00	5.635.371.742,00
5	Gas Medis	2.631.790.768,00	4.254.354.766,00
6	Listrik, Air, Telepon	308.099.335,00	263.618.846,00
7	Bagian Yanmed	40.981.200,00	28.791.000,00
8	Bagian Gizi	528.575.549,44	533.031.273,00
9	Penunjang Medik	11.029.795.520,00	2.172.078.165,00
10	Bagian Umum	13.618.829.995,00	10.345853943,00
11	Bagian Humas	121.384.000,00	40.290.000,00
12	Hutang pada RSUP	334.549.697,00	781.084.378,00
13	Isolasi Mandiri Pasien Covid	0,00	Rp23.625.000,00
14	Aplikasi Smart PSC	22.836.457,00	12.987.000,00
15	Kepegawaian	4.762.000,00	0,00
16	PMI	1.170.650.000,00	88.411.600,00
Total		45.895.551.536,44	46.808.096.413,81

2.1.06.06.01 Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp10.298.010.500,00 dan Rp19.173.160.500,00, turun senilai Rp8.875.150.000,00 atau 46,29%. Utang Belanja Modal Tanah dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja Modal Tanah	10.298.010.500,00	19.173.160.500,00	(46,29)	(8.875.150.000,00)
Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	875.500.000,00	11.874.950.000,00	(92,63)	(10.999.450.000,00)
Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan	7.298.210.500,00	7.298.210.500,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman	2.124.300.000,00	0,00	0,00	2.124.300.000,00

Utang Belanja Modal Tanah pada tabel diatas terdiri atas:

- Utang Tanah TPST Sandubaya senilai Rp875.500.000,00 merupakan sisa yang belum terbayarkan di Tahun 2023;
- Utang Tanah RTH Bertais (Gerimax) senilai Rp2.124.300.000,00 merupakan sisa yang belum terbayarkan di Tahun 2023; dan
- Utang Belanja Modal Tanah senilai Rp7.298.210.500,00 merupakan sisa Utang pembebasan tanah yang belum dapat dibayarkan karena sertifikat dijamin di Bank serta terdapat bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya.

2.1.06.13.08 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 senilai Rp423.298.845,00. Utang Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp423.298.845,00 merupakan Utang Transfer atas Kekurangan Pembayaran Iuran KJP dan KDN TPA Kebon Kongok Bagian Bulan Desember TA. 2023.

3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp3.800.016.554.555,36 dan Rp3.646.515.283.382,38 naik senilai Rp153.501.271.172,98 atau 4,21% dibanding Tahun 2022.

PENJELASAN ATAS AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

7 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Kota Mataram untuk periode per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.742.639.890.414,09 dan Rp1.485.629.757.668,97, naik senilai Rp257.010.132.745,12 atau 17,30% dibanding tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	481.785.982.790,99	398.174.496.817,97
Pendapatan Transfer – LO	1.191.614.572.588,00	1.062.893.104.332,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	69.239.335.035,10	24.562.156.519,00
Jumlah	1.742.639.890.414,09	1.485.629.757.668,97

Pendapatan-LO pada tabel diatas sudah termasuk Pendapatan-LO dari BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp207.037.089.771,07, Dana JKN senilai Rp18.448.371.739,00 dan Dana BOK senilai Rp3.327.043.000,00 yang dikelola oleh puskesmas di lingkup Kota Mataram, Dana BOS yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri di lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp34.932.192.080,81.

Pada Pendapatan-LO, selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan/penurunan piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi, Piutang Pendapatan Transfer, serta Piutang Lainnya. Pendapatan-LO Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

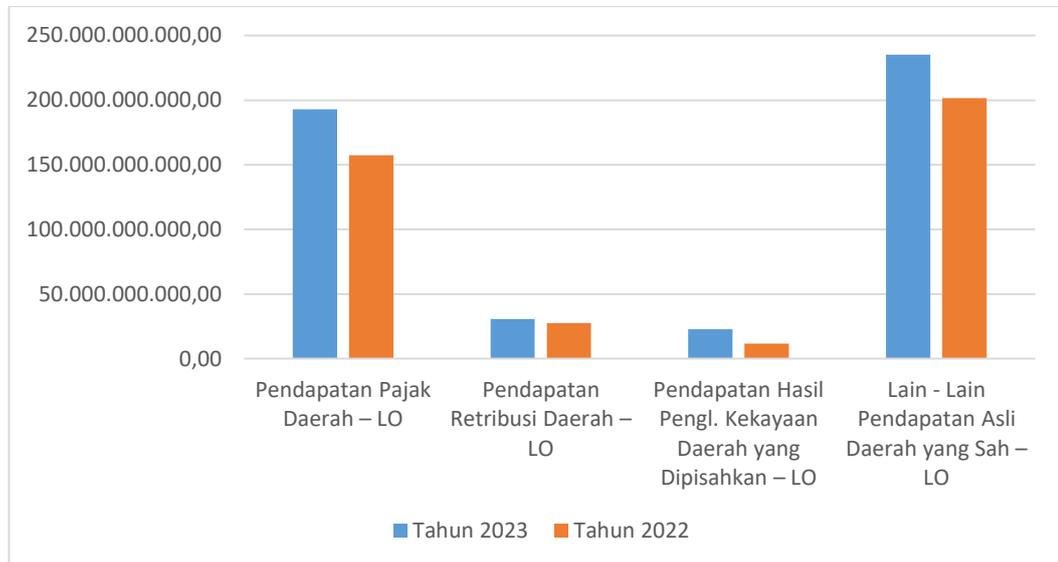
7.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah–LO Kota Mataram pada periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp481.785.982.790,99 dan Rp398.174.496.817,97, naik senilai Rp83.611.485.973,02 atau 21,00%. Pada Pendapatan Asli Daerah–LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan/penurunan piutang pendapatan Pajak dan retribusi, serta piutang lainnya. Pendapatan Asli Daerah–LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	192.952.846.285,56	157.375.616.607,92
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	30.813.513.645,23	27.426.330.246,93
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.915.757.700,78	11.643.009.463,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	235.103.865.159,42	201.729.540.500,12
Jumlah	481.785.982.790,99	398.174.496.817,97

Data pada tabel diatas menunjukkan kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar 22,61%, Pendapatan Retribusi Daerah-LO naik sebesar 12,35%, Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik sebesar 96,82%, serta Lain-lain PAD yang Sah-LO naik sebesar 16,54%. Perbandingan saldo PAD-LO ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 5.8. Pendapatan Asli Daerah – LO 2023 dan 2022

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

7.1.01 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp192.952.846.285,56 dan Rp157.375.616.607,92 mengalami kenaikan sebesar Rp35.577.229.677,64 atau 22,61% dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan – LO	0,00	0,00
Pajak Rokok – LO	0,00	0,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	0,00	0,00
Pajak Hotel – LO	30.452.367.153,00	25.381.957.029,00
Pajak Restoran – LO	40.103.811.666,76	32.604.533.168,00
Pajak Hiburan – LO	6.322.905.462,00	4.631.710.978,00
Pajak Reklame – LO	1.798.391.782,00	6.442.800.822,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	45.049.777.369,00	42.921.727.121,00
Pajak Parkir – LO	2.569.870.912,00	2.672.604.929,00
Pajak Air Tanah – LO	2.410.349.760,80	1.303.760.800,92
Pajak Sarang Burung Walet – LO	300.000,00	300.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	35.236.111.326,00	11.010.563.705,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	29.008.960.854,00	30.405.658.055,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jumlah	192.952.846.285,56	157.375.616.607,92

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya Piutang Pajak Daerah;
 - b. Koreksi Pencatatan Piutang tahun lalu;
 - c. Karena adanya penghapusan Piutang.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp6.217.854.045,56 (Rp192.952.846.285,56 – Rp186.734.992.240,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	6.217.854.045,56
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Kenaikan piutang pendapatan.	4.944.601.851,87
✓ Penghapusan Pajak Daerah	1.297.494.809,69
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Koreksi kurang pencatatan piutang pajak restoran	24.242.616,00
Jumlah Penjelasan Selisih	6.217.854.045,56

Pendapatan Pajak Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan piutang pendapatan pajak daerah sebesar Rp4.944.601.851,87, penghapusan piutang pajak daerah 1.297.494.809,69, serta koreksi kurang pencatatan piutang pajak restoran sebesar Rp24.242.616,00.

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp192.952.846.285,56 dan Rp157.375.616.607,92 mengalami kenaikan sebesar Rp35.577.229.677,64 atau 22,61% dengan rincian sebagai berikut.

7.1.01.06.01 Pajak Hotel-LO

Realisasi Pajak Hotel-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp30.452.367.153,00 dan Rp25.381.957.029,00, naik senilai 19,98% atau Rp5.070.410.124,00.

7.1.01.07 Pajak Restoran - LO

Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp40.103.811.666,76 dan Rp32.604.533.168,00, naik senilai 23,00% atau Rp7.499.278.498,76 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Restoran dan Sejenisnya – LO	37.624.029.706,76	30.371.262.569,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya – LO	2.479.781.960,00	2.233.270.599,00
Jumlah	40.103.811.666,76	32.604.533.168,00

7.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO

Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp37.624.029.706,76 dan Rp30.371.262.569,00, naik senilai 23,88% atau Rp7.252.767.137,76.

7.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO

Realisasi Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.479.781.960,00 dan Rp2.233.270.599,00, naik senilai 11,04% atau Rp246.511.361,00.

7.1.01.08 Pajak Hiburan - LO

Realisasi Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp6.322.905.462,00 dan Rp4.631.710.978,00, naik senilai 36,51% atau Rp1.691.194.484,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Tontonan Film – LO	2.421.505.007,00	2.130.784.283,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana – LO	419.678.775,00	437.085.070,00
Pajak Pameran – LO	177.558.637,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya – LO	375.530.000,00	266.289.721,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling – LO	205.238.085,00	148.261.500,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.572.908.233,00	1.502.251.804,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) -LO	150.486.725,00	147.038.600,00
Jumlah	6.322.905.462,00	4.631.710.978,00

7.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film - LO

Realisasi Pajak Tontonan Film-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.421.505.007,00 dan Rp2.130.784.283,00, naik senilai 13,64% atau Rp290.720.724,00.

7.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO

Realisasi Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp419.678.775,00 dan Rp437.085.070,00, turun senilai 3,98% atau Rp17.406.295,00.

7.1.01.08.04 Pajak Pameran - LO

Realisasi Pajak Pameran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp177.558.637,00 dan Rp0,00.

7.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO

Realisasi Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp375.530.000,00 dan Rp266.289.721,00, naik senilai 41,02% atau Rp109.240.279,00.

7.1.01.08.07 Pajak Permainan Billiar dan Bowling - LO

Realisasi Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp205.238.085,00 dan Rp148.261.500,00, naik senilai 38,43% atau Rp56.976.585,00.

7.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan - LO

Realisasi Pajak Pacuan kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.572.908.233,00 dan Rp1.502.251.804,00, naik senilai 71,27% atau Rp1.070.656.429,00.

7.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre) - LO

Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp150.486.725,00 dan Rp147.038.600,00, naik senilai 2,35% atau Rp3.448.125,00.

7.1.01.09 Pajak Reklame - LO

Realisasi Realisasi Pajak Reklame-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.798.391.782,00 dan Rp6.442.800.822,00, turun senilai 72,09% atau Rp4.644.409.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron – LO	1.696.092.184,00	6.352.684.652,00
Pajak Reklame Kain – LO	31.316.025,00	41.496.790,00
Pajak Reklame Berjalan	70.983.573,00	48.619.380,00
Jumlah	1.798.391.782,00	6.442.800.822,00

7.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO

Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.696.092.184,00 dan Rp6.352.684.652,00, turun senilai 73,30% atau Rp4.656.592.468,00.

7.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain- LO

Realisasi Pajak Reklame Kain-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp31.316.025,00 dan Rp41.496.790,00, turun senilai 24,53% atau Rp10.180.765,00.

7.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan- LO

Realisasi Pajak Reklame Berjalan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp70.983.573,00 dan Rp48.619.380,00, naik senilai 46,00% atau Rp22.364.193,00.

7.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain- LO

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp45.049.777.369,00 dan Rp42.921.727.121,00, naik senilai 4,96% atau Rp2.128.050.248,00.

7.1.01.11.01 Pajak Parkir- LO

Realisasi Pajak Parkir-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.569.870.912,00 dan Rp2.672.604.929,00, turun senilai 3,84% atau Rp102.734.017,00.

7.1.01.12.01 Pajak Air Tanah- LO

Realisasi Pajak Air Tanah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.410.349.760,80 dan Rp1.303.760.800,92, naik senilai 84,88% atau Rp1.106.588.959,88.

7.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LO

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sama, yaitu senilai Rp300.000,00.

7.1.01.15.01 PBBP2 - LO

Realisasi PBBP2 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp35.236.111.326,00 dan Rp11.010.563.705,00, naik senilai 220,02% atau Rp24.225.547.621,00.

7.1.01.16.01 BPHTB – Pemindahan Hak - LO

Realisasi BPHTB-Pemindahan Hak sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp29.008.960.854,00 dan Rp30.405.658.055,00, turun senilai 4,59% atau Rp1.396.697.201,00.

7.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk penurunan piutang retribusi sebesar Rp2.324.564.517, penghapusan piutang retribusi daerah sebesar Rp367.668.159,00, serta koreksi kurang pencatatan piutang retribusi daerah senilai Rp52.099.331,00.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp30.813.513.645,23 dan Rp27.426.330.246,93, mengalami kenaikan sebesar Rp3.387.183.398,30 atau 12,35% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum – LO	25.315.044.625,00	23.641.931.697,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	3.181.562.000,00	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.077.257.000,00	4.973.390.000,00
• Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	9.321.274.125,00	8.224.313.897,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	5.908.652.000,00	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	614.210.000,00	657.810.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	44.360.000,00	43.945.500,00
• Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	66.979.500,00	72.724.500,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.100.750.000,00	1.049.750.000,00
Retribusi Jasa Usaha	1.864.333.413,23	1.960.339.524,93
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	186.755.275,00	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	1.235.358.253,23	1.412.890.974,93
• Retribusi Tempat Pelelangan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Terminal – LO	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	0,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	442.219.885,00	343.482.600,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	0,00	0,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.634.135.607,00	1.824.059.025,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	1.772.159.025,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	69.600.000,00	51.900.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	0,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	0,00	0,00
• Retribusi Pengendalian Lalu Lintas – LO	0,00	0,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	3.403.943.947,00	0,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	160.591.660,00	0,00
• Retribusi Pertambangan Rakyat – LO	0,00	0,00
Jumlah	30.813.513.645,23	27.426.330.246,93

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penurunan piutang retribusi;
 - b. Penghapusan piutang retribusi daerah ;
 - c. Koreksi kurang pencatatan piutang retribusi daerah
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp93.525.704,00 (Rp30.813.513.645,23 – Rp30.719.987.941,23). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	93.525.704,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penghapusan Piutang Retribusi Daerah	367.668.159,00
	0,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penurunan Piutang retribusi	222.043.124,00
✓ Koreksi Kurang Pencatatan Piutang Retribusi	52.099.331,00
Jumlah Penjelasan Selisih	93.525.704,00

7.1.02.01 Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp25.315.044.625,00 dan Rp23.641.931.697,00, naik senilai 7,08% atau Rp1.673.112.928,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.181.562.000,00	2.939.298.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.077.257.000,00	4.973.390.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	9.321.274.125,00	8.224.313.897,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	5.908.652.000,00	5.680.699.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	614.210.000,00	657.810.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.360.000,00	43.945.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	66.979.500,00	72.724.500,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.100.750.000,00	1.049.750.000,00
Jumlah	25.315.044.625,00	23.641.931.697,00

7.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp3.181.562.000 dan Rp2.939.298.800,00, naik senilai 8,24% atau Rp242.263.200,00.

7.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp5.077.257.000,00 dan Rp4.973.390.000,00, naik senilai 2,09% atau Rp103.867.000,00.

7.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp9.321.274.125,00 dan Rp8.224.313.897,00, naik senilai 13,34% atau Rp1.096.960.228,00.

7.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Retribusi Los yang terealisasi senilai Rp5.908.642.000,00 dan Rp5.680.699.000,00, naik senilai 4,01% atau Rp227.953.000,00.

7.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp614.210.000,00 dan Rp657.810.000,00, turun senilai 6,63% atau Rp43.600.000,00.

7.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp44.360.000,00 dan Rp43.945.500,00, naik senilai 0,94% atau Rp414.500,00.

7.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang terealisasi senilai Rp66.979.500,00 dan Rp72.724.500,00, turun senilai 7,90% atau Rp5.745.000,00.

7.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp1.100.750.000,00 dan Rp1.049.750.000,00, naik senilai 4,86% atau Rp51.000.000,00.

7.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.864.333.413,23. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp1.960.339.524,93 turun senilai Rp96.006.111,70 atau 4,90% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO	186.755.275,00	203.965.950,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan -LO	1.235.358.253,23	1.412.890.974,93
Retribusi Rumah Potong Hewan -LO	442.219.885,00	343.482.600,00
Jumlah	1.864.333.413,23	1.960.339.524,93

7.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp186.755.275,00 dan Rp203.965.950,00, turun senilai 8,44% atau 17.210.675,00.

7.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp1.235.358.253,23 dan Rp1.412.890.974,93, turun senilai 12,57% atau Rp177.532.721,70.

7.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp442.219.885,00 dan Rp343.482.600,00, naik senilai 28,75% atau Rp98.737.285,00.

7.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp3.634.135.607,00 dan Rp1.824.059.025,00, naik 99,23% atau Rp1.810.076.582,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan -LO	0,00	1.772.159.025,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -LO	69.600.000,00	51.900.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) -LO	160.591.660,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung –LO	3.403.943.947,00	0,00
Jumlah	3.634.135.607,00	1.824.059.025,00

7.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp1.772.159.025,00. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

7.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

Pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp69.600.000,00 dan Rp51.900.000,00, naik senilai 34,10% atau Rp17.700.000,00.

7.1.02.03.06 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO

Pendapatan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp160.591.660,00 atau 100,00%. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp3.403.943.947,00 atau 100,00%. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp22.915.757.700,78 dan Rp11.643.009.463,00, naik sebesar Rp11.272.748.237,78 atau 96,82% berupa dividen yang diterima atas penyertaan modal pada perusahaan daerah, yaitu pada PT. Bank NTB Syariah, PT. Air Minum Giri Menang Mataram, PT. Jamkrida NTB Bersaing.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	10.816.813.639,00	3.334.034.945,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	89.388.700,00	25.426.352,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	12.009.555.361,78	8.283.548.166,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO	0,00	0,00
Jumlah	22.915.757.700,78	11.643.009.463,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya koreksi tambah piutang dividen atas penyertaan modal pada BUMD

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp8.721.219.807,78 (Rp22.915.757.700,78 – Rp14.194.537.893,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	8.721.219.807,78
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Adanya koreksi tambah piutang atas penyertaan modal pada BUMD	8.721.219.807,78
✓	0,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.721.219.807,78

7.1.03.02.01 Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp10.816.813.639,00 dan Rp3.334.034.945,00, naik senilai 224,44% atau Rp7.482.778.694,00.

7.1.03.02.02 Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Dividen dari PT. Jamkrida NTB Bersaing yang terealisasi senilai Rp89.388.700,00 dengan total penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 dividen terealisasi senilai Rp25.426.352,00.

7.1.03.02.03 Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Dividen dari PT. Air Minum Giri Menang Mataram yang terealisasi senilai Rp12.009.555.361,78, dan Rp8.283.548.166,00, naik senilai 44,98% atau Rp3.726.007.195,78.

7.1.04 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk penurunan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp40.000.000,00, serta penurunan piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp24.005.043.526,00.

Berikut Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp235.103.865.159,42 dan Rp201.729.540.500,12 naik senilai Rp33.374.324.659,30 atau 16,54% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	37.100.000,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	49.410.975,00	364.343.750,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	0,00
Jasa Giro – LO	3.021.036.633,26	2.418.099.359,02
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	3.062.500.602,34	2.692.979.452,06
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	0,00	1.359.584.287,73
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	23.917.396,00	28.266.747,00
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing – LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	43.591.246,45	12.457.575,26
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	1.714.298.499,80	1.107.866.961,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	2.104.300,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	127.220.624,00	226.765.500,80
Pendapatan BLUD – LO	207.037.089.771,07	178.480.541.756,25
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	18.448.371.739,00	15.038.635.111,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) – LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf – LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak – LO	1.537.223.372,50	0,00
Jumlah	235.103.865.159,42	201.729.540.500,12

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penurunan pendapatan diterima dimuka;
 - Penurunan piutang pendapatan BLUD
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp26.548.848.827,45 (Rp261.652.713.986,87 – Rp235.103.865.159,42). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	26.548.848.827,45
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penurunan Piutang Pendapatan BLUD	24.005.043.526,00
✓ Koreksi Pendapatan-LO TGR karena Bukan Merupakan Pendapatan-LO	2.581.702.724,90
✓ Reklasifikasi Pendapatan-LO atas setoran Aset Lainnya TGR	2.258.440,00

Uraian	Nilai
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penurunan Pendapatan diterima dimuka	40.000.000,00
✓ Koreksi Kurang Catat Piutang Jasa Giro Disnaker	155.863,45
Jumlah Penjelasan Selisih	26.548.848.827,45

7.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan– LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp37.100.000,00 dan Rp0,00 yang terdiri atas :

7.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – LO

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan hasil lelang aset milik RSUD Kota Mataram yang terealisasi senilai Rp37.100.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan– LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp49.410.975,00 dan Rp364.343.750,00 yang terdiri atas :

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Sewa BMD - LO	49.410.975,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan – LO	0,00	64.343.750,00
Hasil dari Bangun Guna Serah - LO	0,00	300.000.000,00
Jumlah	49.410.975,00	364.343.750,00

7.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD – LO

Hasil Sewa BMD-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan hasil sewa lahan milik Pemerintah Kota Mataram yang terealisasi senilai Rp49.410.975,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD – LO

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD -LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp64.343.750,00.

7.1.04.03.03 Hasil dari Bangun Guna Serah – LO

Hasil dari Bangun Guna Serah -LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp300.000.000,00.

7.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah – LO

Jasa Giro pada Kas Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp3.021.036.633,26 dan Rp2.418.099.359,02, naik senilai 24,93% atau Rp602.937.274,24.

7.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LO

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan Bunga Deposito dan Remunerasi TDF dengan total realisasi senilai Rp3.062.500.602,34, sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.692.979.452,06.

7.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp0.00 dan Rp1.359.584.287,73, turun senilai 100,00% atau Rp1.359.584.287,73 yang terdiri atas :

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	0.00	441.545.426,66
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	0.00	918.038.861,07
Jumlah	0.00	1.359.584.287,73

7.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara – LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terhadap Bendahara-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp0,00 dan Rp441.545.426,66, turun senilai 100,00% atau Rp441.545.426,66.

7.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain– LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain– LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp0.00 dan Rp918.038.861,07, turun senilai 100,00% atau Rp918.038.861,07.

7.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp23.917.396,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp28.266.747,00.

7.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp43.591.246,45. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp12.457.575,26.

7.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp1.714.298.499,80 dan Rp1.107.866.961,00, naik senilai 54,74% atau Rp606.431.538,80 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Denda Pajak Hotel- LO	8.616.819,00	4.724.749,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	157.672.226,00	35.686.186,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	4.412.088,00	198.897,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO	18.487.955,00	127.573.543,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir – LO	6.293.919,00	9.975.833,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LO	13.773.714,00	31.687.421,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.502.881.778,80	898.020.332,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	2.160.000,00	0,00
Jumlah	1.714.298.499,80	1.107.866.961,00

7.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO

Pendapatan Denda Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp8.616.819,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp4.724.749,00.

7.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO

Pendapatan Denda Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp157.672.226,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp35.686.186,00.

7.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LO

Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.412.088,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp198.897,00.

7.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO

Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp18.487.955,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp127.573.543,00.

7.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir – LO

Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp6.293.919,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp9.975.833,00.

7.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LO

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp13.773.714,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp31.687.421,00.

7.1.04.12.15 Pendapatan Denda PBBP2 – LO

Pendapatan Denda PBBP2-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.502.881.778,80. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp898.020.332,00.

7.1.04.12.16 Pendapatan Denda BPHTB – LO

Pendapatan Denda BPHTB-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp2.160.000,0. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp2.104.300,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.15 Pendapatan Dari Pengembalian – LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp127.220.624,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp226.765.500,80 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	118.801.104,00	226.765.500,80
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO	599.520,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	7.820.000,00	0,00
Jumlah	127.220.624,00	226.765.500,80

7.1.04.15.03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp118.801.104,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp226.765.500,80.

7.1.04.15.04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa yang terealisasi senilai Rp599.520,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.15.10 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terealisasi senilai Rp7.820.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,00.

7.1.04.16 Pendapatan BLUD – LO

Pendapatan BLUD-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Kota Mataram yang terealisasi senilai Rp207.037.089.771,07 dan Rp178.480.541.756,25, naik senilai 16,00% atau Rp28.556.548.014,82 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan dari BLUD – LO	207.037.089.771,07	208.395.772.031,25
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO	0,00	(29.915.230.275,00)
Jumlah	207.037.089.771,07	178.480.541.756,25

7.1.04.16.01 Pendapatan dari BLUD – LO
Pendapatan dari BLUD -LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp207.037.089.771,07. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp208.395.772.031,25.

7.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai minus Rp29.915.230.275,00.

7.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LO
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp18.448.371.739,00 dan Rp15.038.635.111,00, naik senilai 22,67% atau Rp3.409.736.628,00.

7.1.04.23.01 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak – LO
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp1.537.223.372,50 dan Rp0,00, naik senilai Rp1.537.223.372,50

atau 100,00%. Merupakan Jaminan Bongkar Tahun Lama yang Tidak dapat Ditelusuri Pemiliknya sebagai Pendapatan.

7.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO Kota Mataram adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp1.191.614.572.588,00 dan Rp1.062.893.104.332,00, naik sebesar Rp128.721.468.256,00 atau 12,11%. Pendapatan Transfer-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.558.230.036,00, kenaikan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.421.032.548,00 serta dana *Treasure Deposit Facility* sebesar Rp34.599.246.000,00.

Tabel 5.353. Rincian Pendapatan Transfer – LO 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.074.215.880.681,00	953.007.038.935,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	117.398.691.907,00	109.886.065.397,00
Jumlah	1.191.614.572.588,00	1.062.893.104.332,00

7.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp1.024.086.796.681,00 bersumber dari Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp44.177.540.000,00, Insentif Fiskal sebesar Rp5.951.544.000,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp117.398.691.907,00 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.354. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Perimbangan – LO	1.024.086.796.681,00	898.835.674.935,00
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	179.731.699.941,00	157.738.151.833,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	621.774.459.000,00	565.895.019.524,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	89.596.603.839,00	37.158.655.089,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	132.984.033.901,00	138.043.848.489,00
Dana Insentif Daerah – LO	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00
• Dana Insentif Daerah – LO	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO	0,00	0,00
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua – LO	0,00	0,00
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh – LO	0,00	0,00
• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LO	0,00	0,00
• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO	0,00	0,00
Dana Desa – LO	0,00	0,00
• Dana Desa – LO	0,00	0,00
Insentif Fiskal – LO	5.951.544.000,00	0,00
• Insentif Fiskal – LO	5.951.544.000,00	0,00
Jumlah	1.074.215.880.681,00	953.007.038.935,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Kenaikan Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Adanya Dana Treasure Deposit Facility (TDF)
 - c. Adanya Koreksi Pendapatan-LO dan Beban Hibah BOS/BOP Satdik Swasta (Reg-Kin)
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp18.962.882.787,00 (Rp1.074.215.880.681,00 – Rp1.055.252.997.894,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	18.962.882.787,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Kenaikan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.558.230.036,00
✓ Adanya Dana Treasure Deposit Facility (TDF)	34.599.246.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pendapatan BOS Swasta - LO	17.194.593.249,00
	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	18.962.882.787,00

7.2.01.01 Dana Perimbangan – LO

Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp1.024.086.796.681,00 dan Rp898.835.674.935,00, naik senilai 13,93% atau Rp125.251.121.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.355. Rincian Pendapatan Dana Perimbangan – LO 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	179.731.699.941,00	157.738.151.833,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	621.774.459.000,00	565.895.019.524,00
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LO	89.596.603.839,00	37.158.655.089,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - LO	132.984.033.901,00	138.043.848.489,00
Jumlah	1.024.086.796.681,00	898.835.674.935,00

7.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - LO

Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2023 terealisasi senilai Rp179.731.699.941,00, sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp157.738.151.833,00. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2023 terealisasi senilai Rp621.774.459.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp565.895.019.524,00. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LO

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp89.596.603.839,00 dan Rp37.158.655.089,00. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

7.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - LO

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp132.984.033.901,00 dan Rp138.043.848.489,00. Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

7.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah - LO

Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp44.177.540.000,00 dan Rp54.171.364.000,00. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

7.2.01.06.01 Insentif Fiskal - LO

Insentif Fiskal-LO Tahun 2023 terealisasi senilai Rp5.951.544.000,00. Berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Alokasi untuk insentif fiskal dibagi atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun

berjalan. Insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya diberikan atas penilaian kinerja untuk daerah dengan berkinerja baik dan penilaian untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik. Untuk tahun 2023 insentif fiskal kinerja tahun anggaran berjalan dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yaitu kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dan kategori kinerja dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan terealisasi senilai Rp117.398.691.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil – LO	116.142.446.707,00	109.886.065.397,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	31.295.594.939,00	35.798.966.911,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	22.092.697.355,00	26.078.344.840,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	36.336.902.266,00	20.931.837.769,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	57.194.282,00	41.005.486,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	26.360.057.865,00	27.035.910.391,00
Bantuan Keuangan – LO	1.256.245.200,00	0,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	1.256.245.200,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	117.398.691.907,00	109.886.065.397,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Kenaikan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi
- Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.421.032.548,00 (Rp117.398.691.907,00 – Rp115.977.659.359,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.421.032.548,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Kenaikan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	1.421.032.548,00
	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	0,00

Uraian	Nilai
	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.421.032.548,00

7.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp116.142.446.707,00 dan Rp109.886.065.397,00 yang diperoleh dari Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bahan bakar kendaraan bermotor, Bagi hasil pajak air permukaan dan Bagi hasil pajak rokok.

7.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO

Bantuan Keuangan-LO terealisasi senilai Rp1.256.245.200,00 dari anggaran. Bantuan Keuangan tersebut bersumber dari Provinsi NTB sebagai upaya dalam memperluas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

7.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp69.239.335.035,10 dan Rp24.503.973.315,00 naik sebesar Rp44.735.361.720,10 atau 182,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.357. Rincian Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah – LO	69.239.335.035,10	24.503.973.315,00
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	0,00	58.183.204,00
Jumlah	69.239.335.035,10	24.562.156.519,00

7.3.01 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Tahun 2023 selain pendapatan yang tercatat di LRA sebesar Rp3.750.000,00, juga ditambah piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara sebesar Rp54.075.884.889,00 serta pendapatan hibah aset sebesar Rp11.413.450.146,10 yang terdiri dari :

No	SKPD Penerima	Jenis	Sumber	Nilai
1	Dinas PUPR	Notebook	Kementerian PUPR	24.350.000,00
2	DPPKB	Persediaan (BMHP)	BKKBN	659.777.797,00
3	Dinas Perhubungan	Bantuan Teknis	Kementerian Perhubungan	308.698.217,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Escavator	DLHK Prov. NTB	395.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	Alat USG 2D	Kementerian Kesehatan	512.000.000,00
6	Dinas Kesehatan	Persediaan (Obat)	Dinas Kesehatan Prov NTB	3.304.824.132,10
7	Badan Keuangan Daerah	Tanah	Pemerintah Prov NTB	6.208.800.000,00
JUMLAH				11.413.450.146,10

Pendapatan Hibah – LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.595.048.217,00	2.280.965.400,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.568.401.929,10	19.890.348.915,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	2.332.659.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	54.075.884.889,00	0,00
Jumlah	69.239.335.035,10	24.503.973.315,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (PT. AMNT)
 - b. Koreksi tambah pendapatan hibah dari Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp65.489.335.035,00 (Rp69.239.335.035,10 – Rp3.750.000.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	65.489.335.035,10
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Koreksi tambah piutang pendapatan dari PT. AMNT	54.075.884.889,00
✓ Koreksi tambah pendapatan hibah dari Pusat dan Daerah	11.413.450.146,10
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	65.489.335.035,10

7.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Tahun 2023 dan 2022 terealisasi senilai Rp4.595.048.217,00 dan Rp2.280.965.400,00 naik sebesar Rp2.314.082.817,00 atau 101,45%

7.3.01.02.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp10.568.401.929,10 dan Rp19.890.348.915,00. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 merupakan hibah berupa Tanah dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Badan Keuangan Daerah.

7.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp2.332.659.000,00 yang terdiri dari.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri- LO	0,00	53.480.432,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri- LO	0,00	2.279.178.568,00
Jumlah	0,00	2.332.659.000,00

7.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri- LO

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp53.480.432,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan hibah berupa Aset tetap peralatan dan mesin dari Kementerian Investasi, Kemendagri dan PD. BPR NTB kepada OPD di Pemerintah Kota Mataram.

7.3.01.04.03 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri- LO

Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp2.279.178.568,00. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun 2022 merupakan hibah berupa Aset tetap Bangunan gedung tempat pendidikan dari Universitas Terbuka kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram.

7.3.01.05.01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp54.075.884.889,00 dan Rp0,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

7.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Lain-lain Pendapatan- LO. sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan Rp58.183.204,00

7.3.03.01 Lain-lain Pendapatan- LO

Lain-lain Pendapatan- LO terdiri dari pendapatan atas pengembalian hibah pada Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan Rp58.183.204,00

7.3.03.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan- LO terdiri dari pendapatan atas pengembalian hibah pada Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan Rp58.183.204,00. Pendapatan Lainnya Tahun 2022 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Belanja Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2021 senilai Rp58.183.204,00.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan	0,00	58.183.204,00
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	58.183.204,00
• Pendapatan atas Dana <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment</i>	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
Jumlah	0,00	58.183.204,00

Penjelasan:

Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

Karena pada Tahun 2023 tidak ada anggaran untuk **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** k belanja pendapatan atas pengembalian hibah

8. Beban LO

Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. Beban-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp1.539.835.181.646,70 dan Rp1.427.450.312.615,25 naik senilai Rp112.384.869.031,45 atau 7,87% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	581.726.492.803,00	567.551.975.625,00
Beban Barang dan Jasa	695.085.598.562,94	622.689.444.006,36
Beban Bunga	0,00	279.763.272,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	69.748.715.625,00	63.075.252.724,99
Beban Bantuan Sosial	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00
Beban Penyisihan Piutang	5.044.634.907,84	(6.118.738.698,42)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	161.024.356.437,92	161.056.223.860,32
Beban Transfer	2.864.648.845,00	1.466.365.000,00
Beban Tidak Terduga	34.297.616,00	879.033.300,00
Jumlah	1.539.835.181.646,70.	1.427.450.312.615,25

Beban-LO pada tabel diatas sudah termasuk Beban dari BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp213.049.989.866,46, Beban Operasi JKN senilai Rp17.216.959.756,00 dan Beban Operasi BOK senilai Rp2.209.599.919,00 yang dikelola secara langsung oleh Puskesmas di Kota Mataram, serta Beban Operasi Dana BOS yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Negeri di lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp43.111.627.476,93.

Pada Beban-LO, selain dari Belanja Operasi dan Transfer di LRA sudah termasuk penurunan persediaan sebesar Rp326.732.546,57 penyesuaian antara beban dan aset tetap sebesar Rp7.409.608.248,58, kenaikan utang belanja pegawai sebesar Rp660.164.721,00, beban dibayar dimuka berupa sewa gedung kantor sebesar Rp0,00, kenaikan penyisihan piutang sebesar Rp3.861.706.753,47, kenaikan akumulasi amortisasi dan penyusutan sebesar Rp171.127.851.194,52, serta koreksi lainnya.

8.1 Beban

Beban Operasi untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp1.375.911.878.747,78 dan Rp1.264.048.690.454,93 naik senilai Rp111.863.188.292,85 atau 8,85%. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, serta Beban Penyisihan Piutang. Tidak ada realisasi Beban Bunga dan Beban Subsidi pada Pemerintah Kota Mataram.

8.1.01. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp581.726.492.803,00 dan Rp567.551.975.625,00 naik senilai Rp14.174.517.178,00 atau 2,50%. Beban Pegawai sudah termasuk Beban Pegawai yang diakui sebagai Utang pada tahun berikutnya. Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	345.690.601.782,00	337.252.740.413,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	111.703.073.962,00	108.641.799.462,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.074.090.177,00	81.190.169.880,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.704.507.365,00	22.686.885.420,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.015.808.236,00	1.055.005.836,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	905.760.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	9.625.931.281,00	15.819.614.614,00
Jumlah	581.726.492.803,00	567.551.975.625,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Karena adanya pembayaran Utang Barang dan Jasa melalui Beban Pegawai
 - b. Adanya Kapitalisasi ke Aset Tetap
 - c. Kenaikan Utang Belanja Pegawai
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp546.321.279,00 (Rp581.726.492.803,00 – Rp582.272.814.082,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	546.321.279,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Pembayaran Utang Barang dan Jasa melalui Beban Pegawai	1.190.486.000,00
Kapitalisasi ke Aset Tetap	16.000.000,00
Pengurangan Beban LO:	
Kenaikan Utang Belanja Pegawai	660.164.721,00
Jumlah Penjelasan Selisih	546.321.279,00

8.1.01.01. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp345.690.601.782,00 dan Rp337.252.740.413,00, naik senilai 2,50% atau Rp8.437.861.369,00.

8.1.01.01.01. Beban Gaji Pokok ASN

Realisasi Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp261.041.547.388,00 dan Rp254.618.525.682,00, naik senilai 2,52% atau Rp6.423.021.706,00.

8.1.01.01.02. Beban Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp22.764.434.661,00 dan Rp22.099.961.678,00, naik senilai 3,01% atau Rp664.472.983,00.

8.1.01.01.03. Beban Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp8.459.965.273,00 dan Rp8.680.881.949,00. Turun senilai 2,54% atau Rp220.916.676,00.

8.1.01.01.04. Beban Tunjangan Fungsional ASN

Beban Tunjangan Fungsional ASN merupakan Beban Tunjangan Fungsional bagi PNS Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp13.630.358.800,00 dan Rp13.060.973.580,00, naik senilai 4,36% atau Rp569.385.220,00.

8.1.01.01.05. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Beban Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp5.276.645.301,00 dan Rp5.002.415.665,00. Naik senilai 5,48% atau Rp274.229.636,00.

8.1.01.01.06. Beban Tunjangan Beras ASN

Realisasi Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp14.577.420.029,00 dan Rp14.085.371.202,00. Naik senilai 3,49% atau Rp492.048.827,00.

8.1.01.01.07. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Realisasi Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp736.780.720,00 dan Rp800.481.003,00. Turun senilai 7,96% atau Rp63.700.283,00.

8.1.01.01.08. Beban Pembulatan Gaji ASN

Realisasi Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp3.780.215,00 dan Rp3.565.273,00. Naik senilai 6,03% atau Rp214.942,00.

8.1.01.01.09. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Realisasi Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp17.068.355.118,00 dan Rp16.824.352.457,00. Naik senilai 1,45% atau Rp244.002.661,00.

8.1.01.01.10. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan ASN

Realisasi Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp532.828.571,00 dan Rp519.052.981,00. Naik senilai 2,65% atau Rp13.775.590,00.

8.1.01.01.11. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Realisasi Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.598.485.706,00 dan Rp1.557.158.943,00. Naik senilai 2,65% atau Rp41.326.763,00.

8.1.01.02. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp111.703.073.962,00 dan Rp108.641.799.462,00. Naik senilai 2,82% atau Rp3.061.274.500,00.

8.1.01.02.01. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp42.274.816.249,00 dan Rp41.985.396.937,00. Naik senilai 0,69% atau Rp289.419.312,00.

8.1.01.02.03. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tahun 2023 senilai Rp283.801.100,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp155.837.000,00. Naik senilai 82,11% atau Rp127.964.100,00.

8.1.01.02.04. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Tahun 2023 senilai Rp2.029.718.692,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.006.920.000,00. Naik senilai 1,14% atau Rp22.798.692,00.

8.1.01.02.05. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun 2023 senilai Rp67.114.737.921,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp64.493.645.525,00. Naik senilai 4,06% atau Rp2.621.092.396,00.

8.1.01.03. Beban Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp90.074.090.177,00 dan Rp81.190.169.880,00. Naik senilai 10,94% atau Rp8.883.920.297,00.

8.1.01.03.01. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp7.539.486.700,00 dan Rp7.368.299.000,00. Naik senilai 2,32% atau Rp171.187.700,00.

8.1.01.03.02. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp947.600.000,00 dan Rp833.650.000,00. Naik senilai 13,67% atau Rp113.950.000,00.

8.1.01.03.03. Beban TPG PNSD

Realisasi Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp69.332.260.860,00 dan Rp65.165.535.280,00, naik senilai 6,39% atau Rp4.166.725.580,00.

8.1.01.03.05. Beban Tamsil Guru PNSD

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.878.837.750,00 dan Rp896.369.000,00, naik senilai 109,61% atau Rp982.468.750,00.

8.1.01.03.06. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Realisasi Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.942.021.367,00. dan (Rp6.675.700,00) naik senilai 44.170,60% atau Rp2.948.697.067,00.

8.1.01.03.07. Beban Honorarium

Realisasi Beban Honorarium Tahun 2023 adalah senilai Rp7.254.383.500,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.794.192.300,00. Naik senilai 6,77% atau Rp460.191.200,00.

8.1.01.03.08. Beban Jasa Pengelolaan BMD

Realisasi Beban Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2023 adalah senilai Rp179.500.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp138.800.000,00. Naik senilai 29,32% atau Rp40.700.000,00.

8.1.01.04. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah senilai Rp22.704.507.365,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp22.686.885.420,00. Naik senilai 0,08% atau Rp17.621.945,00.

8.1.01.04.01. Beban Uang Representasi DPRD

Realisasi Beban Uang Representasi DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp892.290.000,00 dan Rp890.715.000,00, naik senilai 0,18% atau Rp1.575.000,00.

8.1.01.04.02. Beban Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Beban Tunjangan Keluarga DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp113.017.800,00 dan Rp111.600.300,00, naik senilai 1,27% atau Rp1.417.500,00.

8.1.01.04.03. Beban Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Beban Tunjangan Beras DPRD Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp122.679.480,00 dan Rp122.534.640,00, naik senilai 0,12% atau Rp144.840,00.

8.1.01.04.04. Beban Uang Paket DPRD

Realisasi Beban Uang Representasi DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp76.482.000,00 dan Rp76.324.500,00, naik senilai 0,21% atau Rp157.500,00.

8.1.01.04.05. Beban Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Beban Tunjangan Jabatan DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.293.820.500,00 dan Rp1.291.536.750,00, naik senilai 0,18% atau Rp2.283.750,00

8.1.01.04.06. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp125.788.950,00 dan Rp124.510.050,00, naik senilai 1,03% atau Rp1.278.900,00.

8.1.01.04.07. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Realisasi Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp41.305.425,00 dan 2022 senilai Rp53.394.075,00, turun senilai 22,64% atau Rp12.088.650,00.

- 8.1.01.04.08. Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD**
Realisasi Beban Uang Representasi DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp7.056.000.000,00 dan Rp7.041.300.000,00, naik senilai 0,21% atau Rp14.700.000,00.
- 8.1.01.04.09. Beban Tunjangan Reses DPRD**
Realisasi Beban Tunjangan Reses DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah sama senilai Rp1.764.000.000,00.
- 8.1.01.04.10. Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**
Realisasi Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp17.353.322,00 dan Rp17.324.237,00, naik senilai 0,17% atau Rp29.085,00.
- 8.1.01.04.12. Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**
Realisasi Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp6.095.769.888,00 dan Rp6.082.920.868,00. Naik senilai 0,21% atau Rp12.849.020,00.
- 8.1.01.04.13. Beban Tunjangan Transportasi DPRD**
Realisasi Beban Tunjangan Transportasi DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah sama senilai Rp5.106.000.000,00.
- 8.1.01.04.14. Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD**
Realisasi Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp4.725.000,00. Turun senilai 100,00% atau Rp4.725.000,00.
- 8.1.01.05. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**
Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.015.808.236,00 dan Rp1.055.005.836,00, turun senilai 3,72% atau Rp39.197.600,00
- 8.1.01.05.01. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH**
Realisasi Beban Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah sama senilai Rp54.600.000,00.
- 8.1.01.05.02. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**
Realisasi Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah sama senilai Rp7.644.000,00.
- 8.1.01.05.03. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**
Realisasi Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah sama senilai Rp98.280.000,00.
- 8.1.01.05.04. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH**
Realisasi Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp7.531.680,00 dan Rp6.952.320,00, naik senilai 8,33% atau Rp579.360,00.
- 8.1.01.05.05. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**
Realisasi Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp854.556,00 dan Rp827.556,00, naik senilai 3,26% atau Rp27.000,00.

8.1.01.05.06. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Realisasi Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp1.000,00 dan Rp960,00, naik senilai 4,17% atau Rp40,00.

8.1.01.05.10. Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp836.897.000,00 dan Rp886.701.000,00, turun senilai 5,62% atau Rp49.804.000,00.

8.1.01.05.11. Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah yang merupakan Beban Insentif atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp10.000.000,00. Dan Rp0,00. Naik senilai 100,00% atau Rp10.000.000,00.

8.1.01.06. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp912.480.000,00 dan Rp905.760.000,00, naik senilai 0,74% atau Rp6.720.000,00.

8.1.01.06.01. Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Realisasi Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp312.480.000,00 dan Rp305.760.000,00, naik senilai 2,20% atau Rp6.720.000,00.

8.1.01.06.02. Beban Dana Operasional KDH/WKDH

Realisasi Beban Dana Operasional KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp600.000.000,00 dan Rp600.000.000,00, tidak ada kenaikan maupun penurunan.

8.1.01.99. Beban Pegawai BLUD

Realisasi Beban Pegawai BLUD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp9.625.931.281,00 dan Rp15.819.614.614,00, turun senilai 39,15% atau Rp6.193.683.333,00.

8.1.02. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp695.085.598.562,94. dan Rp622.689.444.006,36, naik senilai Rp72.396.154.556,58. atau 11,63%. Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, serta Beban Barang dan Jasa BLUD. Beban Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	135.944.208.803,85	116.268.605.464,84
Beban Jasa	255.448.232.802,00	244.272.173.104,66
Beban Pemeliharaan	18.479.059.286,00	14.631.817.217,00
Beban Perjalanan Dinas	36.593.733.301,00	33.898.127.243,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	6.156.440.165,00	4.504.606.400,00
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	43.111.627.476,93	41.772.027.233,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	199.352.296.728,16	167.342.087.343,86
Jumlah	695.085.598.562,94	622.689.444.006,36

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Karena adanya selisih persediaan, penambahan dibayar dimuka, pembayaran Utang Barang dan jasa melalui Beban Pegawai, adanya Beban ekstrakomtable, Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Barang dan jasa dan Koreksi Utang Jampersal; dan
 - b. Adanya penghapusan Persediaan kadaluwarsa, utang Beban Barang dan Jasa, Penyesuaian Beban dibayar dimuka serta kapitalisasi ke Aset Tetap.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp17.402.029.533,87 (Rp695.085.598.562,94 – Rp677.683.569.029,07). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	17.402.029.533,87
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Selisih Persediaan	6.326.732.546,57
Persediaan dari Hibah	3.964.601.929,00
Beban dibayar dimuka	2.551.530.000,00
Pembayaran Utang Barang dan Jasa melalui Beban Pegawai	1.190.486.000,00
Beban Ekstarcomtable	1.307.298.040,57
Reklas Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa	6.738.168.218,00
Koreksi Utang Jampersal	422.879.363,00
> Pengurangan Beban LO:	
Penghapusan Persediaan kadaluwarsa	195.825.000,00
Utang Beban Barang dan Jasa	1.397.032.979,37
Penyesuaian Beban dibayar dimuka yang merupakan Pembelian Aset	2.451.030.000,00
Kapitalisasi ke Aset Tetap	1.055.778.584,00
Jumlah Penjelasan Selisih	17.402.029.533,87

8.1.02.01. Beban Barang

Beban Barang Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp135.944.208.803,85. dan Rp116.268.605.464,84 naik senilai 16,92% atau Rp19.675.603.339,01.

8.1.02.01.01. Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp135.618.723.678,85. dan Rp116.016.736.579,84, naik senilai 16,90% atau Rp19.601.987.099,01.

8.1.02.01.02. Beban Barang Tak Pakai Habis

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp325.485.125,00 dan Rp251.868.885,00, naik senilai Rp73.616.240,00 atau 29,23%.

8.1.02.02. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp255.448.232.802,00 dan Rp244.272.173.104,66 naik senilai Rp11.176.059.697,34 atau 4,58%.

8.1.02.02.01. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp209.234.242.741,00 dan Rp200.745.266.683,00, naik senilai 4,23% atau Rp8.488.976.058,00.

8.1.02.02.02. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp31.867.935.254,00 dan Rp24.044.585.313,00, naik senilai 32,54% atau Rp7.823.349.941,00.

8.1.02.02.03. Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp0,00 dan Rp66.666.666.66,00. Turun senilai 100,00%.

8.1.02.02.04. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp2.769.814.498,00 dan Rp1.542.697.474,00, naik senilai 79,54% atau Rp1.227.117.024,00.

8.1.02.02.05. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp3.247.577.000,00 dan Rp3.300.559.050,00, turun senilai 1,61% atau Rp52.982.050,00.

8.1.02.02.06. Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp20.765.133,00 dan Rp12.000.000,00, naik senilai 73,04% atau Rp8.765.133,00.

8.1.02.02.07. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp203.250.000,00 dan Rp431.620.000,00, turun senilai 52,91% atau Rp228.370.000,00.

8.1.02.02.09. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.016.280.576,00 dan Rp4.075.328.615,00, turun senilai 50,52% atau Rp2.059.048.039,00.

8.1.02.02.10. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp2.956.172.300,00 dan Rp3.628.304.782,00, turun senilai 18,52% atau Rp672.132.482,00.

8.1.02.02.11. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban Jasa Ketersediaan Layanan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp0,00 dan Rp2.487.025.421,00. turun 100,00%.

8.1.02.02.12. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp30.000.000,00 dan Rp125.000.000,00, turun senilai 76,00% atau Rp95.000.000,00.

8.1.02.02.13. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp2.465.679.000,00 dan Rp3.633.119.100,00, turun senilai 32,13% atau Rp 1.167.440.100,00.

- 8.1.02.02.14. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp421.116.300,00. Dan Rp0,00 Naik 100,00%.
- 8.1.02.02.15. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp215.400.000,00 dan Rp180.000.000,00, naik senilai 19,67% atau Rp35.400.000,00.
- 8.1.02.03. Beban Pemeliharaan.**
Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp18.479.059.286,00 dan Rp14.631.817.217,00 naik senilai Rp3.847.242.069,00 atau 26,29%.
- 8.1.02.03.01. Beban Pemeliharaan Tanah.**
Beban Pemeliharaan Tanah Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp973.021.000,00 dan Rp1.761.955.500,00, turun senilai 44,78% atau Rp788.934.500,00.
- 8.1.02.03.02. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.**
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp10.964.624.843,00 dan Rp9.405.934.289,00, naik senilai 16,57% atau Rp 1.558.690.554,00.
- 8.1.02.03.03. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.**
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp 5.773.525.443,00 dan Rp 3.289.481.693,00, naik senilai 75,51% atau Rp 2.484.043.750,00.
- 8.1.02.03.04. Beban Pemeliharaan Jalan dan Irigasi**
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp285.488.000,00 dan Rp 174.445.735,00, naik senilai 63,65% atau Rp 111.042.265,00.
- 8.1.02.03.05. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp482.400.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 naik 100,00%.
- 8.1.02.04. Beban Perjalanan Dinas.**
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp36.593.733.301,00 dan Rp33.898.127.243,00 naik senilai Rp2.695.606.058,00 atau 7,95%.
- 8.1.02.04.01. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp36.526.202.313,00 dan Rp33.898.127.243,00, naik senilai 7,75% atau Rp2.628.075.070,00.
- 8.1.02.04.02. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah**
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp67.530.988,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00. Naik 100,00%.
- 8.1.02.05. Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat**
Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp6.156.440.165,00 dan Rp4.504.606.400,00, naik sebesar Rp1.651.833.765,00 atau 36,67%.

8.1.02.05.01. Beban Uang yang Diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp2.179.471.000,00 dan Rp1.548.841.000,00, naik senilai 40,72% atau Rp 630.630.000,00.

8.1.02.05.02. Beban Jasa yang Diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan naik senilai Rp3.976.969.165,00 atau 34,55%. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.955.765.400,00.

8.1.02.88. Beban Barang dan Jasa Bos

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp43.111.627.476,93 dan Rp41.772.027.233,00 naik sebesar Rp1.339.600.243,93 atau 3,21%. Pada Beban Barang dan Jasa BOS sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa BOS pada LRA serta penyesuaian atas perolehan dan pemakaian persediaan yang bersumber dari belanja BOS yang tercatat di Neraca.

8.1.02.99. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp199.352.296.728,16 dan Rp167.342.087.343,86 naik sebesar Rp32.010.209.384,30. atau 19,13%. Pada Beban Barang dan Jasa BLUD sudah termasuk belanja yang diakui pada LRA, perolehan dan pemakaian persediaan, serta penyesuaian terhadap Utang yang diakui di Neraca.

8.1.03. Beban Bunga.

Realisasi Beban Bunga untuk Tahun 2023 adalah sebesar 0,00. Beban Bunga Tahun 2022 sebesar Rp279.763.272,00 merupakan bunga pinjaman melalui BLUD. Turun senilai 100,00% atau (Rp279.763.272,00) diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	279.763.272,00
Jumlah	0,00	279.763.272,00

8.1.05. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp69.748.715.625,00 dan Rp63.075.252.724,99, naik senilai Rp6.673.462.900,01 atau 10,58%. Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kota Mataram selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.505.672.905,00	2.694.050.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.255.490.000,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.981.407.000,00	49.196.372.222,99
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	10.178.684.782,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720,00	1.006.145.720,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
Jumlah	69.748.715.625,00	63.075.252.724,99

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya Koreksi Beban Hibah Bos Swasta
 - b. Hibah Barang ke Pusat dan Hibah Barang ke Pemprov.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp15.433.430.344,00 (Rp69.748.715.625,00 – Rp85.182.145.969,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	15.433.430.344,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO	
Koreksi Beban Hibah Bos Swasta	17.194.593.249,00
Pengurangan Beban LO:	
Hibah Barang ke Pusat	505.672.905,00
Hibah Barang ke Pemprov	1.255.490.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	15.433.430.344,00

8.1.05.01. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp10.505.672.905,00 dan Rp2.694.050.000,00, naik senilai 289,96% atau Rp7.811.622.905,00.

8.1.05.01.01. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp10.000.000.000,00 dan Rp2.600.000.000,00, naik senilai 284,62% atau Rp7.400.000.000,00.

8.1.05.01.02. Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp505.672.905,00 dan Rp94.050.000,00. Naik senilai 437,66% atau Rp411.622.905,00.

8.1.05.02. Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp1.255.490.000,00 dan Rp0,00 naik senilai 100,00% atau Rp1.255.490.000,00.

8.1.05.05. Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp56.981.407.000,00 dan Rp49.196.372.222,99, naik senilai 15,82% atau Rp7.785.034.777,01.

8.1.05.05.01. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp2.805.000.000,00 dan Rp3.257.500.000,00, turun senilai 13,89% atau Rp452.500.000,00.

8.1.05.05.02. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp17.790.240.000,00 dan Rp 15.481.685.033,99, naik senilai 14,91% atau Rp2.308.554.966,01.

8.1.05.05.03. Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp36.177.667.000,00 dan Rp30.457.187.189,00, naik senilai 18,78% atau Rp 5.720.479.811,00.

8.1.05.05.05. Beban Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp208.500.000,00. dan Rp0,00 Naik senilai 100,00%.

8.1.05.06. Beban Hibah Dana Bos

Beban Hibah Dana BOS Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp0,00 dan Rp10.178.684.782,00, turun senilai 100,00% atau Rp10.178.684.782,00. Beban Hibah Dana BOS terdiri dari Beban Hibah Dana BOS Reguler dan BOS Kinerja ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta.

8.1.05.06.01. Beban Hibah Uang Dana Bos yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai (Rp11.353.655.649,00) dan Rp0,00 turun 100,00% atau Rp11.353.655.649,00.

8.1.05.06.02. Beban Hibah Uang Dana Bos yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp11.353.655.649,00 dan Rp10.178.684.782,00 naik senilai 11,54% atau Rp1.174.970.867,00.

8.1.05.07. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022 direalisasikan senilai Rp1.006.145.720,00 dan Rp1.006.145.720,00 atau 0,00%.

8.1.06. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 24.306.436.849,00 dan Rp16.570.993.525,00, naik sebesar Rp7.735.443.324,00 atau 46,68% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	10.401.780.000,00	4.594.220.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	573.000.000,00	4.165.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.331.656.849,00	7.681.273.525,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	130.500.000,00
Jumlah	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 karena Pemerintah ingin meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 Rp0,00 (Rp24.306.436.849,00 – Rp24.306.436.849,00).

8.1.06.01. Beban Bantuan Sosial Kepada Individu

Beban Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp10.401.780.000,00 dan Rp4.594.220.000,00, naik senilai 126,41% atau Rp5.807.560.000,00.

8.1.06.02. Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga.

Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp573.000.000,00 dan Rp4.165.000.000,00, turun senilai 86,24% atau Rp3.592.000.000,00.

8.1.06.03. Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp13.331.656.849,00 dan Rp7.681.273.525,00, naik senilai 73,56% atau Rp5.650.383.324,00.

8.1.06.03.01. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat

Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp11.296.680.000,00 dan Rp5.368.620.000,00 naik senilai 110,42% atau Rp5.928.060.000,00.

8.1.06.03.02. Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat

Beban Bantuan Sosial Uang Barang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp2.034.976.849,00 dan Rp2.312.653.525,00 turun senilai 12,01% atau Rp277.676.676,00.

8.1.06.04. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan bidang Lainnya)

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun 2023 dan 2022 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp0,00 dan Rp130.500.000,00 turun 100,00% atau Rp130.500.000,00.

8.1.07. Beban Penyisihan Piutang.

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.044.634.907,84 dan (Rp6.118.738.698,42), naik senilai 182,45% atau Rp11.163.373.606,26 Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Mataram selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.731.123.583,84	3.442.435.419,96
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	267.632.716,70	318.458.642,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	45.878.607,30	(9.879.632.760,38)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	5.044.634.907,84	(6.118.738.698,42)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut karena adanya Koreksi Ekuitas kelebihan pengakuan Penyisihan Piutang akibat SKRD IMB yang ternyata dibatalkan pengajuannya oleh WR dan Koreksi Ekuitas atas kelebihan Pengakuan Penyisihan Piutang Lainnya.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.182.928.154,37 [Rp5.044.634.907,84. - (Rp21.143.415.156,48 – Rp17.281.708.403,01)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	1.182.928.154,37
Pengurangan Penyisihan Piutang:	
Koreksi Ekuitas kelebihan pengakuan Penyisihan Piutang akibat SKRD IMB yang ternyata dibatalkan pengajuannya oleh WR	5.044.634.907,84
Koreksi Ekuitas atas kelebihan pengakuan penyisihan Piutang Lainnya	(3.861.706.753,47)
Jumlah Penjelasan Selisih	1.182.928.154,37

8.1.07.01. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.731.123.583,84 dan Rp3.442.435.419,96, naik senilai 37,44% atau Rp1.288.688.163,88.

8.1.07.01.06. Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel

Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp102.575.642,50 dan Rp198.338.190,42 turun senilai 48,28% atau Rp95.762.547,92.

8.1.07.01.07. Beban Penyisihan Pajak Restoran

Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp369.068.660,17 dan Rp375.707.191,15 turun senilai 1,77% atau Rp6.638.530,98.

8.1.07.01.09. Beban Penyisihan Pajak Reklame

Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.240.839,85 dan Rp20.006.358,25 naik senilai 41,16% atau Rp8.234.481,60.

8.1.07.01.11. Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir

Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp122.943.121,50 dan (Rp137.298.599,45) naik senilai 189,54% atau Rp260.241.720,95.

8.1.07.01.12. Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp189.744.916,67 dan Rp104.592.052,14 naik senilai 81,41% atau Rp85.152.864,53.

8.1.07.01.15. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.918.550.403,15 dan Rp2.881.090.227,45 naik senilai 36,01% atau Rp1.037.460.175,70.

8.1.07.02. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp267.632.716,70 dan Rp318.458.642,00 turun senilai 15,96% atau Rp50.825.925,30.

8.1.07.02.01. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp7.650.290,00 turun senilai 100,00% atau Rp7.650.290,00.

8.1.07.02.02. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp267.511.900,00 dan Rp304.865.740,00 turun senilai 12,25% atau Rp37.353.840,00.

8.1.07.02.03. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp120.816,70 dan Rp5.942.612,00 turun senilai 97,97% atau Rp5.821.795,30.

8.1.07.02.04. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp45.878.607,30 dan (Rp9.879.632.760,38) naik senilai 100,46% atau Rp9.925.511.367,68.

8.1.08. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp161.024.356.437,92 dan Rp161.056.223.860,32, turun sebesar 31.867.422,40 atau 0,02%. Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Mataram selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.601.334.776,79	76.636.597.303,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.578.673.978,61	18.406.631.194,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	66.302.139.387,52	65.420.047.978,67
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	542.208.295,00	592.947.384,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah	161.024.356.437,92	161.056.223.860,32

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena bertambahnya jumlah Aset tetap yang diperoleh dari Belanja Modal dan Hibah dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca; dan
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

8.1.08.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp74.601.334.776,79 dan Rp76.636.597.303,65, turun senilai 2,66% atau Rp2.035.262.526,87.

8.1.08.01.01. Beban Penyusutan Alat Besar.

Beban Penyusutan Alat Besar Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp80.576.001.621,78 dan Rp76.046.404.230,65, naik senilai 5,96% atau Rp4.529.597.391,13.

8.1.08.01.02. Beban Penyusutan Alat Angkutan.

Beban Penyusutan Alat Angkutan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp5.974.666.845,00) dan Rp590.193.073,00 turun senilai 1.112,32% atau Rp6.564.859.918,00.

8.1.08.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp19.578.673.978,62 dan Rp18.406.631.194,00 naik senilai 6,37% atau Rp1.172.042.784,62.

8.1.08.03. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi.

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp66.302.139.387,52 dan Rp65.420.047.978,67, turun senilai 1,35% atau Rp882.091.408,85.

8.1.08.03.01. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan.

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp218.335.303.032,52 dan Rp20.550.794.205,67 naik senilai 962,42% atau Rp197.784.508.826,85.

8.1.08.03.02. Beban Penyusutan Bangunan Air.

Beban Penyusutan Bangunan Air Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp152.033.163.645,00) dan Rp44.869.253.773,00 turun senilai 438,84% atau Rp196.902.417.418,00.

8.1.08.06. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp542.208.295,00 dan Rp592.947.384,00 turun senilai 8,56% atau Rp50.739.089,00.

8.3. Beban Transfer.

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp2.864.648.845,00 dan Rp1.466.365.000,00, naik sebesar Rp1.398.283.845,00 atau 95,36%. Nilai tersebut merupakan dukungan dana Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Pengelolaan dan Pengembangan TPA Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Pertama dan Kedua Tahun 2023 sebesar Rp1.402.000.040,00, Triwulan Ketiga dan Keempat sebesar Rp1.039.349.960,00, serta Utang Kekurangan Triwulan Keempat sebesar Rp423.298.845,00.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	2.864.648.845,00	1.412.147.625,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	(45.782.625,00)
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	2.864.648.845,00	1.466.365.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena adanya beban Utang Bantuan Keuangan pada Pemerintah Provinsi yaitu merupakan pembayaran KJPKDN Kebon Konggo bulan Desember Tahun Anggaran 2023.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp423.298.845,00 (Rp2.864.648.845,00 – Rp2.441.350.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Bantuan Keuangan KJPKDN Kebon Konggo	423.298.845,00

3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

8.3.02. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.864.648.845,00 dan Rp1.466.365.000,00 naik senilai 95,36% atau Rp1.398.283.845,00.

8.3.02.01. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi.

Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.864.648.845,00 dan Rp1.412.147.625,00 naik senilai 102,86% atau Rp1.452.501.220,00.

8.3.02.01.02. Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi.

Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.864.648.845,00 dan Rp1.412.147.625,00 naik senilai 102,86% atau Rp1.452.501.220,00.

8.3.02.02. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota.

Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp100.000.000,00 turun senilai 100,00% atau 100.000.000,00.

8.3.02.02.02. Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota.

Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp100.000.000,00 turun senilai 100,00% atau 100.000.000,00.

8.3.02.04. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.

Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp45.782.625,00) turun senilai 100,00% atau Rp45.782.625,00.

8.3.02.04.01. Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.

Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp45.782.625,00) turun senilai 100,00% atau Rp45.782.625,00.

8.2. Beban Tidak Terduga

Beban Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp34.297.616,00 dan Rp879.033.300,00, turun sebesar Rp844.735.684,00 atau 96,10% dengan uraian sebagai berikut:

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Tahun 2013, 2017-2022 a.n. I Nyoman Gde Sumantri	Rp	808.510,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak BPHTB Tahun 2022 a.n. Lalu Jaga Adubangga	Rp	17.000.000,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2 Tahun 2020, 2021, 2022 a.n. Maurad Sofyan Arifin	Rp	11.649.106,00
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tanah Pengganti kepada Pemerintah Kota Mataram pada Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Terusan Jalan Bung Hatta di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Tahun 2022 a.n. Adi Mujono	Rp	4.840.000,00

SURPLUS/DEFISIT OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Operasional dan jumlah Beban Operasional. Surplus/Defisit dari Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp202.804.708.767,39 dan Rp58.179.445.053,72. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, Surplus/Defisit dari Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp144.625.263.713,67 atau sebesar 248,58%.

7.4. Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasi merupakan selisih antara jumlah Surplus Non Operasional dan jumlah Defisit Non Operasional. Surplus dari Operasional Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp9.360.755,00 dan 452.045,00 naik sebesar 8.908.710,00 atau 1.970,76%, merupakan Surplus Pelepasan Dana Bergulir/LO. Rincian Surplus Non Operasional – LO adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	9.360.755,00	452.045,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	9.360.755,00	452.045,00

Penjelasan:

Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena adanya Penerimaan Kembali Dana Bergulir pada Koperasi.

7.4.01. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp9.360.755,00 dan 452.045,00 naik sebesar 8.908.710,00 atau 1.970,76%.

7.4.01.03. Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO.

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp9.360.755,00 dan 452.045,00 naik sebesar 8.908.710,00 atau 1.970,76%.

7.4.01.03.01. Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO.

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp9.360.755,00 dan 452.045,00 naik sebesar 8.908.710,00 atau 1.970,76%.

8.4. Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasi merupakan selisih antara jumlah Defisit Non Operasional dan jumlah Defisit Non Operasional. Defisit dari Operasional Tahun 2023 dan 2022 senilai Rp48.962.454.675,65 dan 0,00 naik sebesar 48.962.454.675,65 atau 100,00%, merupakan Defisit Penjualan Aset Lain-lain (rusak Berat/usang) dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya/LO.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
a. Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	48.766.629.675,65	0,00
b. Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
c. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
d. Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
e. Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
f. Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
g. Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
h. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	195.825.000,00	0,00
i. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	48.962.454.675,65	0,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Karena adanya Penjualan Aset Rusak/usang pada Rumah Sakit Umum Kota Mataram.
 - Karena adanya Koreksi Kurang Persediaan Kadaluwarsa Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp48.964.713.115,65 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Aset Rusak/usang sebesar Rp48.768.888.115,65 pada RSU Kota Mataram, dan adanya Koreksi Persediaan Kadaluwarsa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp195.825.000,00.

8.5. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Luar Biasa		
j. Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
k. Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
l. Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Surplus/(Defisit) – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Daerah – LO		
Pendapatan Asli Daerah – LO	481.785.982.790,99	398.174.496.817,97
Pendapatan Transfer – LO	1.191.614.572.588,00	1.062.893.104.332,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	69.239.335.035,10	24.562.156.519,00
Beban Operasional		
Beban Operasional	1.539.835.181.646,70	1.427.450.312.615,25
Kegiatan Non-Operasional		
Surplus Non-Operasional		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	9.360.755,00	452.045,00
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Defisit Non-Operasional		
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	48.766.629.675,65	0,00
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	195.825.000,00	0,00
Pos Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	153.851.614.846,74	58.179.897.098,72

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE.

9. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Mataram untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

9.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 375 Rincian Arus Kas 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.668.245.789.314,10	1.500.283.093.258,05
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.371.920.613.545,07	1.290.158.807.061,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	296.325.175.769,03	210.124.286.197,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang meruakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

9.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 376 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Penerimaan Pajak Daerah	186.734.992.240,00	174.244.254.094,00
✓ Pajak Hotel	30.681.859.458,00	24.410.353.087,00
✓ Pajak Restoran	40.468.500.744,00	31.922.870.556,00
✓ Pajak Hiburan	6.125.704.087,00	4.631.710.978,00
✓ Pajak Reklame	2.302.889.727,00	6.085.570.558,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	45.049.777.369,00	42.921.727.121,00
✓ Pajak Parkir	2.569.870.912,00	3.231.067.842,00
✓ Pajak Air Tanah	2.395.983.826,00	1.395.384.967,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	300.000,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.131.145.263,00	29.239.610.930,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.008.960.854,00	30.405.658.055,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah	30.719.987.941,23	26.844.304.569,93
✓ Retribusi Jasa Umum	25.373.011.487,00	23.586.106.811,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.181.562.000,00	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.083.812.000,00	4.997.080.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.317.445.987,00	8.200.045.351,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	5.908.642.000,00	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	614.210.000,00	657.810.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	44.360.000,00	43.945.500,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	66.979.500,00	72.724.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.156.000.000,00	994.503.660,00
✓ Retribusi Jasa Usaha	1.827.439.413,23	1.489.066.524,93
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	186.755.275,00	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.198.464.253,23	941.617.974,93
• Retribusi Rumah Potong Hewan	442.219.885,00	343.482.600,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu	3.519.537.041,00	1.769.131.234,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	69.600.000,00	51.900.000,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	160.591.660,00	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.289.345.381,00	0,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.194.537.893,00	12.273.219.522,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.233.207.101,00	3.964.245.004,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	41.066.722,00	25.426.352,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8.920.264.070,00	8.283.548.166,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	261.615.613.986,87	232.970.943.203,12
✓ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
✓ Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	49.410.975,00	64.343.750,00
✓ Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	300.000.000,00
✓ Jasa Giro	3.020.880.769,81	2.418.099.359,02
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
✓ Pendapatan Bunga	3.062.500.602,34	2.692.979.451,06
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.583.961.164,90	1.359.584.287,73
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	23.917.396,00	28.266.747,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43.591.246,45	12.457.575,26
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.714.298.499,80	1.112.483.771,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.104.300,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	127.220.624,00	226.765.500,80
✓ Pendapatan BLUD	231.002.133.297,07	209.717.327.649,25
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.448.371.739,00	15.038.635.111,00
✓ Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	1.537.223.372,50	0,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	1.055.252.997.894,00	940.653.144.466,00
✓ Dana Perimbangan	1.005.123.913.894,00	886.481.780.466,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00
✓ Insentif Fiskal	5.951.544.000,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	115.977.659.359,00	110.989.044.199,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil	114.721.414.159,00	110.989.044.199,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.820.864.001,00	35.836.593.901,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.146.907.905,00	25.801.040.355,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.335.432.893,00	22.271.925.332,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	58.151.495,00	43.574.220,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.360.057.865,00	27.035.910.391,00
✓ Bantuan Keuangan	1.256.245.200,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.256.245.200,00	0,00
➤ Penerimaan Hibah	3.750.000.000,00	2.250.000.000,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.750.000.000,00	2.250.000.000,00
➤ Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
✓ Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	0,00	0,00
➤ Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
✓ Lain-Lain Pendapatan	0,00	58.183.204,00
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	58.183.204,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00
Jumlah	1.668.245.789.314,10	1.500.283.093.258,05

9.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 377 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Pembayaran Belanja Pegawai	582.272.814.082,00	565.614.183.592,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	345.562.332.398,00	337.443.371.412,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.251.117.079,00	107.582.035.467,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.314.610.743,00	81.203.705.580,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.704.507.365,00	22.686.885.420,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.015.808.236,00	1.055.005.836,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	905.760.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	9.511.958.261,00	14.737.419.877,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	677.683.569.029,07	642.421.610.056,05
✓ Belanja Barang	120.636.882.877,00	118.443.292.480,00
✓ Belanja Jasa	254.421.305.976,00	243.829.612.718,00
✓ Belanja Pemeliharaan	19.428.914.871,00	15.806.598.217,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	36.574.933.905,00	33.912.019.243,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.616.490.165,00	4.504.606.400,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	42.604.999.381,93	41.988.173.720,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.400.041.853,14	183.937.307.278,05
➤ Pembayaran Belanja Bunga	0,00	279.763.272,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	279.763.272,00
➤ Pembayaran Belanja Subsidi	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah	85.182.145.969,00	62.881.075.691,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	2.694.050.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	62.822.344.600,00	49.002.195.189,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	11.353.655.649,00	10.178.684.782,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.401.780.000,00	4.594.220.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	573.000.000,00	4.165.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.331.656.849,00	7.681.273.525,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	130.500.000,00
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga	34.297.616,00	879.033.300,00
✓ Belanja Tak Terduga	34.297.616,00	879.033.300,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00
✓ Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00
Jumlah	1.371.920.613.545,07	1.290.158.807.061,05

9.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 378 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	37.100.000,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	284.229.453.862,00	176.255.861.795,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(284.192.353.862,00)	(176.255.861.795,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

9.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 379 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
✓ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.100.000,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	37.100.000,00	0,00
➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00
✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	37.100.000,00	0,00

9.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 380 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
✓ Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
➤ Perolehan Tanah	20.305.698.726,00	11.374.815.258,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin	115.171.860.211,00	48.269.561.084,00
✓ Belanja Modal Alat Besar	7.122.075.750,00	2.826.339.678,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	7.764.002.862,00	6.452.578.319,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	267.407.685,00	1.189.839.272,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	148.527.000,00	215.545.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.548.628.257,00	11.516.761.954,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.027.058.364,00	1.086.796.884,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	74.181.479.858,00	8.296.105.504,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	4.531.750.330,00	5.482.845.313,00
✓ Belanja Modal Komputer	6.456.701.354,00	8.981.651.626,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	326.103.150,00
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	149.850.000,00	50.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	319.348.000,00	12.900.000,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	72.704.000,00	5.730.000,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	4.055.750,00	20.500.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	1.559.321.000,00	1.762.214.384,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	18.950.001,00	43.650.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan	68.940.565.477,00	45.384.593.358,00
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	65.543.615.477,00	43.299.499.358,00
✓ Belanja Modal Monumen	3.800.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.393.150.000,00	2.085.094.000,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.240.765.500,00	65.770.745.466,00
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.069.470.700,00	50.653.932.995,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	14.963.683.900,00	7.234.405.600,00
✓ Belanja Modal Instalasi	156.746.000,00	954.758.217,00
✓ Belanja Modal Jaringan	9.050.864.900,00	6.927.648.654,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.271.723.948,00	3.206.146.629,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.733.805.971,00	2.874.790.953,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	105.663.477,00	95.643.676,00
✓ Belanja Modal Hewan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	3.175.000,00	43.900.000,00
✓ Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.239.073.000,00	149.812.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	190.006.500,00	42.000.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Aset Lainnya	48.840.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	48.840.000,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Goodwill	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	48.840.000,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
➤ Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
✓ Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah	284.229.453.862,00	176.255.861.795,00

9.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 381 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	9.360.755,00	5.000.452.045,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	5.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.360.755,00	452.045,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

9.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5. 382 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000.000,00
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	9.360.755,00	425.045,00
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	9.360.755,00	425.045,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		
➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD		
Jumlah	9.360.755,00	5.000.452.045,00

9.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5. 383 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	5.000.000.000,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➤ Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	5.000.000.000,00

9.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kota Mataram untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 384 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	350.897.626.878,00	92.311.227.156,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	352.298.780.864,80	92.347.448.532,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.401.153.986,80)	(36.221.376,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

9.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5. 385 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.644.483.621,00	88.868.084.563,00
➢ Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	273.240.590.350,00	3.278.626.711,00
➢ Koreksi Bank	0,00	565.882,00
➢ Kiriman Uang Masuk	0,00	163.950.000,00
➢ Kas Bendahara Penerima Tahun Sebelumnya	12.552.907,00	36.221.376,00
Jumlah	350.897.626.878,00	92.311.227.156,00

Untuk Tahun 2023, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Mataram telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD. ,sekolah-sekolah pengelola dana BOSP, Jaminan Bongkar dan Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU Tahun Berjalan.

9.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5. 386 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	79.106.792.912,80	88.868.084.563,00
➢ Pemberian Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran	273.169.762.976,00	3.278.626.711,00
➢ Koreksi Bank	0,00	565.882,00
➢ Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	22.224.976,00	36.221.376,00
➢ Kiriman Uang Keluar	0,00	163.950.000,00
Jumlah	352.298.780.864,80	92.347.448.532,00

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Mataram telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD ,sekolah-sekolah pengelola dana BOSP, Jaminan Bongkar dan Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU Tahun Berjalan.

Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 387 Rincian Kenaikan dan Penurunan Arus Kas 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	296.325.175.769,03	210.124.286.197,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(284.192.353.862,00)	(176.255.861.795,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.360.755,00	452.045,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.401.153.986,80)	(36.221.376,00)
Jumlah	10.741.028.675,23	33.832.655.071,00

9.5 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Tabel 5. 388 Rincian Saldo Awal Kas 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	92.402.688.657,34	63.079.928.652,87
Kas di Bendahara Penerimaan	12.552.907,00	36.221.376,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	71.069.850,00	0,00
Kas di BLUD	9.267.732.649,93	4.851.653.650,73
Kas Dana BOS	597.730.039,02	549.614.090,69
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.825.969.710,67	2.891.403.372,67
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	105.177.743.813,96	71.408.821.142,96

9.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 389 Rincian Koreksi Kas 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Kurang Silpa Tahun Lalu atas Hutang PFK	(16.673.006,85)	(63.732.400,00)
Jumlah	(16.673.006,85)	(63.732.400,00)

Koreksi SiLPA Tahun Lalu merupakan koreksi PFK BUD yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL.

9.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 390 Rincian Saldo Akhir Kas 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	95.910.385.836,68	90.402.688.657,34
Kas di Bendahara Penerimaan	22.224.976,00	12.552.907,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	242.476,00	71.069.850,00
Kas di BLUD Kas BLUD	17.190.437.990,71	9.267.732.649,93
Kas Dana Kapitasi FKTP	2.524.550.355,67	2.825.969.710,67,00
Kas Dana BOS	226.206.310,28	957.730.039,02

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya	28.051.537,00	0,00
Saldo Akhir Kas	115.902.099.482,34	105.177.743.813,96

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Mataram tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas senilai Rp105.177.743.813,96. Sedangkan di Tahun 2023 Saldo Akhir Kas senilai Rp115.902.099.482,34 dengan uraian:

Kas di Kas Daerah sebesar Rp95.910.385.836,68, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp22.224.976,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp242.476,00, Kas di BLUD sebesar Rp17.190.437.990,71, Kas Dana Kapitasi pada FKTP yaitu Puskesmas lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp2.524.550.355,67, Kas Dana BOS senilai Rp226.206.310,28, serta Kas Lainnya senilai Rp28.051.537,00, Kas lainnya di Bendahara selain BUD terkait PFK BOS. Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas sama dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2023

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.391 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	3.646.515.283.382,38	3.417.535.464.961,12

Pemerintah Kota Mataram menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kota Mataram yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

3.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.392 Surplus (Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) - LO	153.851.614.846,74	58.179.897.098,72

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kota Mataram masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO

3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.393 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

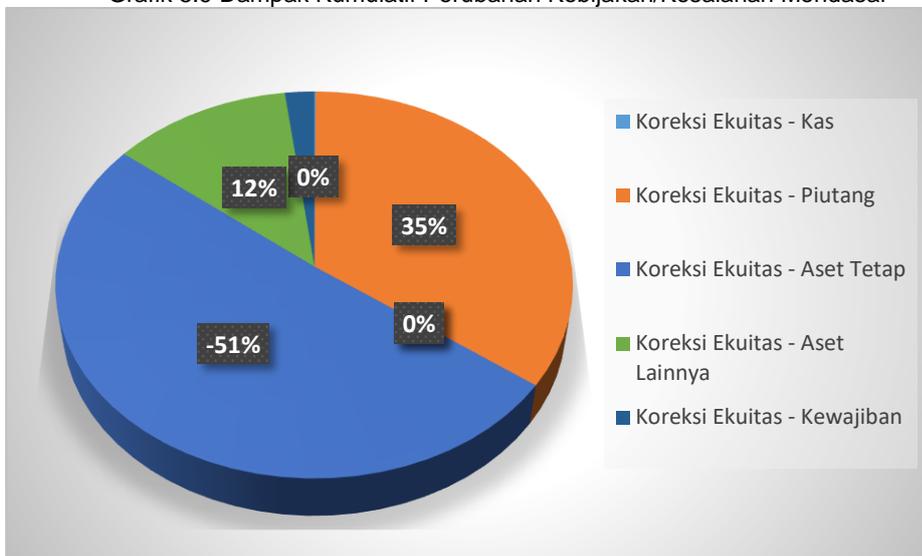
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas - Kas	(16.430.761,15)	(63.732.399,85)
Koreksi Ekuitas – Piutang	7.317.520.639,62	(8.597.959.258,50)
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	23.996.593.922,00
Koreksi Ekuitas – Investasi	0,00	(100.514.667.288,35)
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	(10.656.015.640,13)	262.904.633.538,14
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	2.581.702.724,90	(2.427.851.465,90)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban	422.879.363,00	(4.497.095.725,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	(350.343.673,76)	170.799.921.322,54

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Mataram melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Kas yang disebabkan adanya koreksi pemindahbukuan saldo rekening BLUD RSUD dari BTN ke BNI sebesar (Rp0,15), serta koreksi SiLPA Kas Daerah atas Lebih Catat Pajak Pusat senilai (Rp16.430.761,00);
2. Koreksi Ekuitas atas Piutang yang disebabkan atas adanya koreksi saldo awal piutang sebesar Rp24.242.616,00, koreksi pembayaran atas piutang yang telah disisihkan senilai Rp408.910.856,00, serta koreksi saldo awal penyisihan piutang RSUD senilai Rp6.884.367.167,62;
3. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap terdiri dari hasil inventarisir aset tetap sebesar Rp514.320.000,00, serta koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar (Rp11.170.335.640,13);
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya sebesar Rp2.581.702.724,90 merupakan setoran TGR;
5. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban merupakan koreksi hasil verifikasi utang jampersal yang tidak dapat terbayar sebesar Rp422.879.363,00.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Grafik 5.9 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar



3.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kota Mataram per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.394 Saldo Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	3.800.016.554.555,36	3.646.515.283.382,38

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai upaya perbaikan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan serta regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Kota Mataram ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 dan keadaan kekayaan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 2023, yang diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu aspek dari tata laksana pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Mataram, Mei 2024

WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.01	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.02	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.03	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	4.1.04	209.709.617.714,00	261.652.713.986,87	124,77	232.970.943.203,12
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	4.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	4.2.01				
11	Dana Bagi Hasil	4.2.01.01.01	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.01.02	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.01.01.03	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.01.01.04	157.473.584.000,00	150.178.627.150,00	95,37	138.043.848.489,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 16)		1.034.905.906.120,00	1.005.123.913.894,00	97,12	886.481.780.466,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	4.2.01				
17	Dana Insentif Daerah	4.2.01.02	44.177.540.000,00	44.177.540.000,00	100,00	54.171.364.000,00
18	Insentif Fiskal	4.2.01.06	5.951.544.000,00	5.951.544.000,00	100,00	0,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d. 19)		50.129.084.000,00	50.129.084.000,00	100,00	54.171.364.000,00
20	TRANSFER ANTAR DAERAH	4.2.02				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.02.01	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00
22	Bantuan Keuangan	-	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00
23	Jumlah Transfer Antar Daerah (25 s.d. 25)		127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00
24						
25	Total Pendapatan Transfer (17 + 20 + 23 + 26)		1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.3.01				
27	Pendapatan Hibah	4.3.01.01	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00
28	Dana Darurat	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	4.3.03.01	0,00	0,00	0,00	58.183.204,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 32)		3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00
31	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)		1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27	1.500.283.093.258,05
32						
33	BELANJA	5				
34	BELANJA OPERASI	5.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.01	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34	565.614.183.592,00
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86	642.421.610.056,05
37	Belanja Bunga	5.1.03	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
38	Belanja Subsidi	5.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Hibah	5.1.05	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.06	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00
41	Jumlah Belanja Operasi (38 s.d. 42)		1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05
42	BELANJA MODAL	5.2				
43	Belanja Tanah	5.2.01	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.02	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.03	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.04	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.05	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95	3.206.146.629,00
48	Belanja Aset Lainnya	5.2.06	50.000.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00
49	Jumlah Belanja Modal (46 s.d. 50)		308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00
50	BELANJA TAK TERDUGA	5.3				
51	Belanja Tak Terduga	5.3.01	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga (54 s.d. 54)		4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
53						
54	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.4				
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.02	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
56	Jumlah Transfer (54 s.d. 54)		2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
57						
58	JUMLAH BELANJA(56 + 61)		1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70	1.464.164.668.856,05
59						
60	SURPLUS/(DEFISIT) (34 - 62)		(101.350.936.763,00)	14.382.821.907,03	(14,19)	36.118.424.402,00
61						
62						
63						

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
64	PEMBIAYAAN	6				
65						
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1				
67	Penggunaan SILPA	6.1.01	103.600.936.763,00	103.584.506.002,31	99,98	69.732.060.316,46
67	Penerimaan Kembali Dana Berguit	6.1.04	0,00	9.360.755,00	0,00	452.045,00
67	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	6.1.05	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
68	Jumlah Penerimaan (69 s.d. 69)		103.600.936.763,00	103.593.866.757,31	99,99	74.732.512.361,46
69						
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.2				
71	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.2.02	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00
71	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	6.2.03	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
72	Jumlah Pengeluaran (73 s.d. 73)		2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	7.250.000.000,00
73	PEMBIAYAAN NETTO (70 - 74)		101.350.936.763,00	101.343.866.757,31	99,99	67.482.512.361,46
74						
75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (64 + 75)		0,00	115.726.688.664,34		103.600.936.763,46

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2024
WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA



NERACA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	ASET	1		
2				
3	ASET LANCAR	1.1		
4	Kas dan Setara Kas	1.1.01	115.902.099.482,34	105.177.743.813,96
4	Kas Di Kas Daerah	1.1.01.01	95.910.385.836,68	92.402.688.657,34
6	Kas Di Bendahara Penerimaan	1.1.01.02	22.224.976,00	12.552.907,00
7	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.1.01.03	242.476,00	71.069.850,00
8	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	1.1.01.04	17.190.437.990,71	9.267.732.649,93
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.01.05	2.524.550.355,67	2.825.969.710,67
9	Kas Dana BOS	1.1.01.06	226.206.310,28	597.730.039,02
11	Kas lainnya	1.1.01.07	28.051.537,00	-
12	Setara Kas	-	-	-
12	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
12	Piutang Pajak	1.1.03	42.205.053.714,31	37.260.451.862,44
14	Piutang Retribusi	1.1.04	2.324.564.517,00	2.546.607.641,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.1.05	5.631.928.516,00	-
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.06	20.443.700.340,70	44.448.588.003,25
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.07	13.912.124.505,00	12.353.894.469,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	1.1.08	13.482.886.163,00	12.061.853.615,00
18	Piutang Lainnya	1.1.09	54.547.029.889,00	-
19	Penyisihan Piutang	1.1.10	(17.281.708.403,01)	(21.143.415.156,48)
20	Beban Dibayar Dimuka	1.1.11	1.224.092.000,00	3.775.622.000,00
21	Persediaan	1.1.12	26.387.032.058,19	32.713.764.604,76
22	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 21)		278.778.802.782,53	229.195.110.852,93
23				
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.2		
25	Investasi Non Permanen			
26	Dana Bergulir	1.2.01.05.01	61.789.188,00	338.039.948,00
27	Penyisihan investasi Non Permanen	1.2.01.05.02	(61.789.188,00)	(338.039.948,00)
28	Jumlah Investasi Non Permanen (25 s.d. 26)		-	-
29	Investasi Permanen			
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.2.02	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s.d. 29)		185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 30)		185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
33				
34	ASET TETAP	1.3		
35	Tanah	1.3.01	1.332.906.253.110,00	1.314.205.363.090,00
36	Peralatan dan Mesin	1.3.02	940.058.935.876,37	825.320.527.441,69
37	Gedung dan Bangunan	1.3.03	1.221.838.466.235,75	1.155.983.738.425,43
38	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.3.04	1.205.477.427.032,08	1.134.657.254.831,51
39	Aset Tetap Lainnya	1.3.05	14.485.603.528,74	11.694.038.944,75
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.3.06	1.340.948.450,00	551.517.000,00
41	Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(1.630.116.764.495,49)	(1.458.464.280.712,30)
42	Jumlah Aset Tetap (34 s.d. 40)		3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08
45				
46	PROPERTI INVESTASI	1.3.08		
47	Properti Investasi	1.3.09	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
48	Jumlah Properti Investasi (47 s.d. 47)		13.685.481.323,00	13.629.680.823,00

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
49				
50	ASET LAINNYA	1.5		
51	<i>Treasure Deposit Facility</i>	1.5.01.01	34.599.246.000,00	-
52	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.5.01.02	620.942.673,00	19.612.113,00
53	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.5.02	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
54	Aset Tidak Berwujud	1.5.03	4.834.396.800,00	4.595.550.300,00
55	Aset Lain-lain	1.5.04	43.610.189.665,72	92.250.944.341,36
56	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05	(4.019.400.922,00)	(3.477.192.627,00)
57	Jumlah Aset Lainnya (44 s.d. 48)		310.774.104.216,72	324.517.644.127,36
58				
59	JUMLAH ASET (21 + 31 + 41 + 49)		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69
60				
61	KEWAJIBAN	2		
62				
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.01	175.410.818,00	1.576.807.050,50
65	Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.02	66.666.667,00	106.666.667,00
66	Utang Belanja	2.1.03	74.163.717.570,44	82.945.637.983,81
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s.d. 57)		74.405.795.055,44	84.629.111.701,31
68				
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-		
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
71	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s.d. 62)		-	-
72	JUMLAH KEWAJIBAN (548+ 63)		74.405.795.055,44	84.629.111.701,31
73				
74	EKUITAS	3		
75	EKUITAS	3	3.800.016.554.555,36	3.646.515.283.382,38
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (64+67)		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2024
WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA

**ASET PEMERINTAH KOTA MATARAM
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

		2023	2022
TOTAL ASET LANCAR		278.778.802.782,53	229.195.110.852,93
TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG		185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
ASET TETAP	5.5.1.3		
Tanah	5.5.1.3.1	1.332.906.253.110,00	1.314.205.363.090,00
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	940.058.935.876,37	825.320.527.441,69
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	1.221.838.466.235,75	1.155.983.738.425,43
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.5.1.3.4	1.205.477.427.032,08	1.134.657.254.831,51
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	14.485.603.528,74	11.694.038.944,75
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	1.340.948.450,00	551.517.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(1.630.116.764.495,49)	(1.458.464.280.712,30)
Jumlah Aset Tetap		3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.3.8		
Properti Investasi	5.3.1.3.8	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
Jumlah Properti Investasi		13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Treasure Deposit Facility	5.3.1.1	34.599.246.000,00	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	620.942.673,00	19.612.113,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	4.834.396.800,00	4.595.550.300,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	43.610.189.665,72	92.250.944.341,36
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	- 4.019.400.922,00 -	3.477.192.627,00
Jumlah Aset Lainnya		310.774.104.216,72	324.517.644.127,36
Jumlah Aset		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69
TOTAL ASET		3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69

Sumber dari Neraca Audited Tahun 2023